



Katalog BPS : 7203002

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Financial Statistics of Province Government

2011-2014



BADAN PUSAT STATISTIK

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Financial Statistics of Province Government



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI 2011-2014

Financial Statistics of Province Government 2011-2014

ISSN. 0126.7906

No. Publikasi / Publication Number : 06310.1407

Katalog BPS / BPS Catalogue : 7203002

Ukuran Buku / Book Size : 29,7 Cm x 21 Cm

Jumlah Halaman / Number of Pages : 151 halaman / pages

Naskah / Manuscript :

Subdirektorat Statistik Keuangan

Subdirectorate of Financial Statistics

Gambar Kulit / Cover design :

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Subdirectorate of Statistical Compilation and Publication

Diterbitkan oleh / Published by :

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

BPS – Statistics Indonesia

Dicetak oleh / Printed by :

Bagian Pengandaan

Printing Division

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi merupakan publikasi tahunan yang diolah dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari kantor Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia yang diperoleh melalui Survei Keuangan Pemerintah Daerah.

Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat data tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (realisasi APBD) Pemerintah Provinsi, untuk periode tahun 2011-2013. Selain data realisasi APBD, publikasi ini memuat pula data tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga publikasi ini dapat disajikan. Kritik dan saran yang membangun dari pengguna data sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Jakarta, Desember 2014
Kepala Badan Pusat Statistik,



Dr. Suryamin, M.Sc.

INTRODUCTION

Provincial Government Financial Statistics is an annual publication that compiled and published by BPS-Statistic Indonesia. The financial data are obtained from the office of the provincial government through the Financial Survey conducted throughout Indonesia.

The data and information presented in this publication contains data on the realization of Revenue and Expenditure (Budget realization) of the provincial government, for the years 2011-2013. In addition, this publication also contains data on State Revenue and Expenditure in 2014.

We are grateful and thanks to all those who have given their support which make this publication published. Constructive criticisms and suggestions from the users are expected for further improvement.

Jakarta, December 2014
BPS-STATISTICS INDONESIA



Dr. Suryamin, M.Sc.
Chief Statistician

DAFTAR ISI/CONTENTS

	<u>HALAMAN</u>
	<i>PAGE</i>
Kata Pengantar/ <i>Preface</i>	iii
Daftar Isi/ <i>Contents</i>	v
I. Penjelasan Umum/ <i>General Explanation</i>	1
II. Uraian Ringkas/ <i>Brief Description</i>	19

TABEL

TABLE

1. Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/ <i>Actual Receipt and Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2011-2014</i>	37
2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan/ <i>Actual Receipt of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Receipt 2011-2014</i>	43
3A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/ <i>Actual Revenue of Provincial Government Throughout Indonesia 2011-2014</i>	79
3B. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/ <i>Actual Financing Receipt of Provincial Government Throughout Indonesia 2011-2014</i>	91
4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pengeluaran/ <i>Actual Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure 2011-2014</i>	95

DAFTAR ISI/CONTENTS

<u>TABEL</u> <i>TABLE</i>	<u>HALAMAN</u> <i>PAGE</i>
5A. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Indirect Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2011-2014</i>	131
5B. Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Direct Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2011-2014</i>	140
5C. Realisasi Belanja Pembiayaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Financing Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2011-2014</i>	144

I. PENJELASAN UMUM

I.1. Pendahuluan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi secara umum memuat data tentang Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia. Periode yang dicakup adalah empat tahun anggaran, yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2014.

Beberapa indikator/informasi penting yang dimuat dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi ini, antara lain:

- a. Informasi tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Provinsi.
- b. Informasi tentang potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing provinsi.
- c. Informasi untuk menentukan jenis dan besaran bantuan bagi masing-masing provinsi, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).

Dengan kata lain Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai potensi dan kemampuan dari

I. GENERAL EXPLANATION

I.1. Preliminary

Provincial Government Finance Statistics publication covers data on Receipt and Expenditure of provincial governments all around Indonesia. The time period is for the four fiscal years, ie from 2011 to 2014.

Some indicators/important information covered in the publication of Provincial Government Finance Statistics, among others are:

- a. Information on actual revenue and expenditure of Provincial Government.*
- b. Information on the potential and the contribution of fund sources in each province.*
- c. Information to determine the type and amount of grant/relief fund for each province, both the Special Allocation Fund (DAK) and the General Allocation Fund (DAU).*

In other words, the Provincial Government Finance Statistics publication can be used as an indicator to assess the potential and capabilities of each provinces, in attempting to

masing-masing provinsi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

I.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kantor Gubernur masing-masing provinsi yang dikumpulkan melalui survei Keuangan Daerah dengan menggunakan Daftar K-1 dan APBD-1.

I.3. Konsep dan Definisi

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi adalah realisasi / perhitungan APBD Provinsi pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

improve the welfare of local communities in its region.

I.2. Scope and Data Collection Method

Provincial Government Finance Statistics data is obtained from Regional Finance and Asset Management Agency of the Governor office all over Indonesia which is collected through Financial Survey by using the questioner K-1 and APBD-1.

1.3. Concept and Definition

Actual Receipt and Expenditure of Provincial Government is the realization/provincial budget calculations for every fiscal year.

Revenue

Revenue consists of:

- a. *Original Local Government Revenue*
- b. *Balanced Budget*
- c. *Other Legal Revenue*

Original Local Government Revenue is revenue that withheld based on local regulations in accordance with the

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan

legislation, for the purposes of financing their activities. PAD consists of local taxes, retributions, income of regional government corporate and management of separated regional government wealth and other local government revenue.

***Local Taxes** is revenue that levied based on the local laws and regulations. Local taxes can be divided into two categories: 1) local tax that set up by local rule, and 2) state tax that are managed and used by the local government. Local tax revenue consists of motor vehicle tax, title transfer tax, motor vehicle fuel tax, and others.*

***Retributions** is a levy taken in accordance with any services or facilities provided by the local government directly to taxpayers. Retributions include health care, testing of motor vehicles, the replacement cost of printing maps, fishing vessel testing,*

bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek, dan lain-lain.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan / atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

the use of regional assets, wholesale or retail markets, the sale of local production, the land use designation permits, licenses route of public transport and other.

Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Regional Government Wealth is revenue in the form of income of regional government corporate and separated regional government wealth which consists of the Regional Water Company's earnings, the profit share of bank, the profit share of non-banking financial institutions, the other locally-owned company's profits, and the return on equity/investment to a third party.

Other Original Local Government Revenue is the revenue of local government that includes the sale of regional assets that can not be separated, giro services, interest income and commissions, discounts or other forms as a result of the sale and / or supply of goods and/or services by region.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi Hasil Pajak terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan

***Balanced Budget** is the fund coming from the state budget that allocated to regions to fund their needs in the context of decentralization. Balanced budget consists of Tax share/Non Tax share, General Allocation Fund (DAU), and the Special Allocation Fund (DAK).*

***Tax share** consists of land and building tax (PBB), customs of land and buildings right (BPHTB), income tax of Article 25 and Article 29, and Article 21 of the Personal Income Tax, and others.*

***Non-Tax Share** consist of dues of utilization right of forest (HPH), provision of forest resources (PSDH), land titling state, landrent, dues of exploration/exploitation/ royalties, levies on fishery enterprise and result of fishery, mining oil/gas nature result, and others.*

***General Allocation Fund (DAU)** is the transfer of fund from the central government to local government that is intended to reduce the fiscal gap and the equalization of fiscal capacity*

untuk menutup **kesenjangan fiskal** (*fiscal gap*) dan **pemerataan** kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu **kemandirian** pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya.

across regions in order to support the independence of local governments in carrying out its functions and duties to serve the public.

Special allocation fund (DAK) is a fund set up to the region to meet specific need. There are three criterias for special need as set out in the legislation, namely:

- *The need can not be calculated by using the formula of the general allocation fund*
- *The need is a commitment or a national priority*
- *The need is to finance reforestation and afforestation of the region*

Thus DAK is basically a specific transfer for the purposes that have been outlined.

Other Legal Revenue is other income that coming from the central government and or from the central agencies, as well as from other local government. Other revenue comprises; grants; emergency fund, which is fund of the state budget allocated to areas

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri pendapatan hibah; dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas; dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; bantuan dana kontijensi/penyeimbang/penyesuaian dari pemerintah; bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; dan pendapatan yang sah lainnya.

Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta

get a national disaster, extraordinary experiencing a national disaster, extraordinary events and/or solvency crisis; tax share from provincial and other local governments; contingency funds/balancing/adjustment from government; financial assistance from provincial and other local governments, and other legal income

Local Government Expenditure

Local Government Expenditure

consists of:

1. *Indirect Expenditure*
2. *Direct Expenditure*

***Indirect Expenditure** is part of personnel expenditure, interest expenditure, subsidies expenditure, grant expenditure, social assistance expenditure, sharing fund expenditure, financial assistance expenditure and unpredicted expenditure. Those items are not directly related to the implementation of programs and activities.*

***Indirect Personnel Expenditure** is a compensation in the form of salaries and benefits, and other income provided*

penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

to civil servants based on legislation. Include here are representations and benefits for head and the members of parliament, salaries and benefits of regional head and deputy head of the region, as well as other income that stipulated under law budgeted.

Interest Expenditure is expenditure used to pay debt interest that calculated based on the principal outstanding under the short term, medium term and long term agreement.

Subsidies Expenditure is expenditure that has been budgeted and used to support the cost of production to the certain company/organisation, so that the selling price of the goods/services produced can be affordable. The intended company/agency must be providing products or services for public/society needs.

Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga / organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, yang dilakukan secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

Bantuan Partai Politik adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

***Grant Expenditure** is expenditure that has been setting out to give to others as a grant, both in form of money, goods and or services. The grant can be given to the central government, other local governments, village government, regional corporate/state/ enterprises, agencies/institutions/ organizations, or community groups/individuals.*

***Social Assistance Expenditure** is expenditure that is budgeted to provide assistance to civil society organizations, political parties and others with the aim to improve the welfare of the community.*

***Social Assistance to Community Organizations** is the provision of assistance to community organizations for social purposes. This assistance done selectively and has clarity in its use.*

***Social Assistance to Political Party** is the provision of assistance to the political parties that is budgeted under law as social assistance.*

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari:

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan

Sharing Fund Expenditure to Provincial/District/City and Village Government is expenditure that has been budgeted as sharing fund which is derived from provincial revenue, and given to district/city, village, or a particular local government revenue that is given to other local governments in accordance with law.

This expenditure consists of:

- *Tax shares expenditure to the provincial government*
- *Local tax shares expenditure to the district / city*
- *Local tax shares expenditure to the village government*
- *Local retribution shares to the district / city*
- *Local retribution shares to village government*

Financial Assistance Expenditure to Provincial/District/City and Village Government is a general or specific assistance from the provincial government to the district / city, village government, or other local governments for the purpose of equalizing and increasing the financial capability.

kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

General financial assistance is the assistance from the local government where the use and the management of fund delivered is done by the recipient government. Specific financial assistance is the assistance where the used and the management of fund is directed by the donor government.

Financial Assistance consists of:

- *Financial assistance to the provincial government*
- *Financial assistance to district / city government*
- *Financial assistance to the village government*
- *Financial assistance to local governments/other village governments*

Unpredicted Expenditure is expenses used for the activities that are unusual or unexpected such as natural disaster and social disaster, including refund of the excess revenue from previous years.

Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan

***Direct Expenditure** is a part of personnel expenditure, goods and services expenditure, and capital expenditures, that are budgeted directly related to the implementation of programs and activities.*

***Direct Personnel Expenditure** is expenses used for honorarium/ wages, overtime and other expenses to increase employee motivation and quality in implementing government programs and activities.*

***Goods and Services Expenditure** is expenses used for purchasing/ procurement of goods that worth less than a year (non durable goods), and or the use of services in carrying out the programs and activities of the local government.*

Purchasing/procurement of the goods and services among other are for non durable goods, materials, office services, insurance premiums, vehicle maintenance, printing and copying, building rent, vehicle rent, heavy equipment rent, leasing of office supplies and equipment, food and beverages, uniforms, wearpack, official journey, travel duty, returning officers and other goods and services

pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan

Capital Expenditure is expenses used for purchasing/procurement of a tangible fixed asset that worth more than a year (durable goods).

The establishment of these assets include provision of land, heavy equipment, transportation equipment, workshop tools, agricultural tools, equipment and office supplies, computers, mebeulair, kitchen appliances, room interior design, studio equipment, communication tools, measuring tools, medical equipment, laboratory equipment, construction of roads, bridges, water installations, street lighting, parking area and urban forests, electric and telephone installations, buildings, books/literature, arts, animal procurement/ livestock and plants, as well as weapons/ security.

Local Government Financing is any revenue that needs to be paid back and /or expenditure that will be readmitted, both in the current fiscal year and in the next fiscal years. Net financing is the difference between financing receipt and financing expenditure.

dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan daerah ;
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
 - b. Transfer dari dana cadangan
 - c. Penerimaan pinjaman dan obligasi
 - d. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
2. Pengeluaran pembiayaan daerah ;
 - a. Transfer ke dana cadangan
 - b. Penyertaan modal
 - c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
 - d. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu.

Total net financing should be able to cover the budget deficit, on the other way around budget surplus would be allocated to finance expenses, whether for payment of principal, as well as for investment or the creation of a reserved fund.

Local government financing consists of:

1. *Local government financing receipt;*
 - a. *Last fiscal year budget surplus*
 - b. *Transfer from reserved fund*
 - c. *Receipt form loans and bonds*
 - d. *Income of separated selling assets*
2. *Local government financing expenditure;*
 - a. *Transfer to reserved fund*
 - b. *Equity*
 - c. *Principal payment of debt*
 - d. *Current fiscal year budget surplus*

Last Fiscal Year Budget Surplus is *last fiscal year surplus/deficit plus the financing receipt less financing expenditure.*

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat

***Reserved Fund Disbursement** is revenue derived from the disbursement of the reserve fund, i.e from reserved fund account to general cash account along the current fiscal year.*

***Income of Separated Property Sales Results** is the selling of government assets through third parties, or the income of local government divestment of equity.*

***Local Government Revenue from Loan** is revenue from the loans, including the issuance of local bonds that will be issued in the current fiscal year.*

***Revenue from Lending** is all revenue obtained from lending to the central government and/or to other local governments.*

***Establishment of Reserved Fund** is expenditure to establish a reserved fund to finance activities that the provision of funds can not fully implemented in one fiscal year.*

sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

Equity (Investment) of Local Government is government expenses that allocated to equity/investment, both in the short and long term, permanent or non-permanent. This investment can be in the form of deposit, the purchase of government securities (GS), Bank Indonesia Certificates (SBI), Treasury Bills (SPN), shares, investment in state/public enterprises, purchase of bonds and long-term debt.

Payment of Principal Debt is the payment of the principal debt which is calculated based on the short, medium and long term agreement.

Regional Lending is government spending in the form of lending to the central government, local government, and/or third parties.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

Current Fiscal Year Budget Surplus is a surplus/deficit added by the financing receipt subtracted by financing expenditure.

<http://www.bps.go.id>

II. URAIAN RINGKAS

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk menghasilkan kapasitas pemerintahan yang memiliki kemampuan yang handal dan profesional. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah.

Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.

II. BRIEF DESCRIPTION

Regional development is an effort to create the government which has reliable and professional capabilities. As an integral part of national development which aims to improve the living standar and welfare of the people, development in the local government, both at the provincial level and district/city level must be carried out effectively and efficiently. There by, the regional independency and equality of development will be achieved.

The issue of financial independence becomes very important, particularly the ones that relate to regional financial contribution to regional economic growth. The contribution of local government expenditure on regional economic growth is an opportunity that should be utilized optimally to stimulate the local economy.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Di dalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut.

Dealing with the matter, the provincial government formulates the Receipt and Expenditure Budget (APBD) Province as a form of regional development planning. In the APBD, the details of programs that will be implemented along with funding sources were recorded. Budgeting should be arranged in such a way, so it can improve the performance of regional government and public services oriented.

The sources of funds for financing the regional development should be come from the region's own financial ability, with the aim to accelerate the government independency. In other words the local government must be spured to increase the capability in financing the organization and public services by utilized their own potensial fund.

II.1. Pendapatan Daerah

Tabel A menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2011-2013 terus mengalami peningkatan, dengan total pendapatan 140,00 triliun rupiah pada tahun 2011; 186,01 triliun rupiah pada tahun 2012; dan menjadi 205,78 triliun rupiah pada tahun 2013 atau mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 32,86 persen dan 10,63 persen. Pada tahun 2014 pendapatan pemerintah provinsi ditargetkan naik 19,31 persen menjadi 245,52 triliun rupiah. Peningkatan target pertumbuhan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan asli daerah terutama komponen retribusi daerah serta komponen dana perimbangan berupa bagi hasil pajak. Hal ini merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan pemerintah provinsi dalam meningkatkan pendapatan daerah sejak beberapa tahun yang lalu. Hasil yang signifikan terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil

II.1. Revenue

Table A shows that the realization of the Provincial government's total revenue in Indonesia during 2011-2013 continue to increase, with the total revenue of 140.00 trillion rupiahs in 2011, 186.01 trillion rupiahs in 2012, and 205.78 trillion rupiahs in 2013, or increased by 32.86 percent; and 10.63 percent respectively. In 2014, the revenue of provincial government is targeted to increase by 19.31 percent to 245.52 trillion rupiahs. The increasing was mostly caused by the increasing of original government revenue, especially from retributions component and the increasing of balanced budget, especially from tax share. This condition is the result of the efforts that have been made to increase revenue of the provincial government since few years ago. The significant result of it was in DKI Jakarta.

The Original Local Government Revenue (PAD) is one of the important sources of income for the region. The local government that has capability to increase its PAD significantly, meaning that this region has been able to utilized

Tabel A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan (Miliar Rupiah), 2011-2014
Actual Revenue of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Revenue (Billion Rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pendapatan	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah	73 620	86 542	101 596	120 376
a.	Pajak Daerah	62 759	72 997	86 980	103 490
b.	Retribusi Daerah	1 409	2 646	1 268	2 715
c.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 524	2 642	2 838	3 119
d.	Lain-lain PAD yang Sah	6 928	8 257	10 511	11 052
2.	Dana Perimbangan	52 780	61 998	64 834	77 475
a.	Bagi Hasil Pajak	16 448	21 315	17 781	26 359
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	12 509	11 969	14 300	15 154
c.	Dana Alokasi Umum	22 553	27 382	30 978	34 101
d.	Dana Alokasi Khusus	1 270	1 333	1 775	1 860
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	13 601	37 470	39 350	47 666
JUMLAH/TOTAL		140 001	186 010	205 780	245 517

*) Data APBD

meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

Selama periode tahun 2011-2013, PAD terus mengalami kenaikan, yaitu dari 73,62 triliun rupiah pada tahun 2011 menjadi 86,54 triliun rupiah pada tahun 2012 dan 101,60 triliun rupiah pada tahun 2013. Pajak daerah merupakan komponen yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap PAD.

the existing potential optimally.

During the period 2011-2013, the development of PAD was steady increasing, i.e, from 73.62 trillion rupiah in 2011 to 86.54 trillion rupiahs in 2012 and 101.60 trillion rupiahs in 2013. This increasing was supported by local tax revenue as the biggest contribution to PAD in each years.

The second biggest contribution was from others legal PAD, followed by management of separated local government wealth, and retributions.

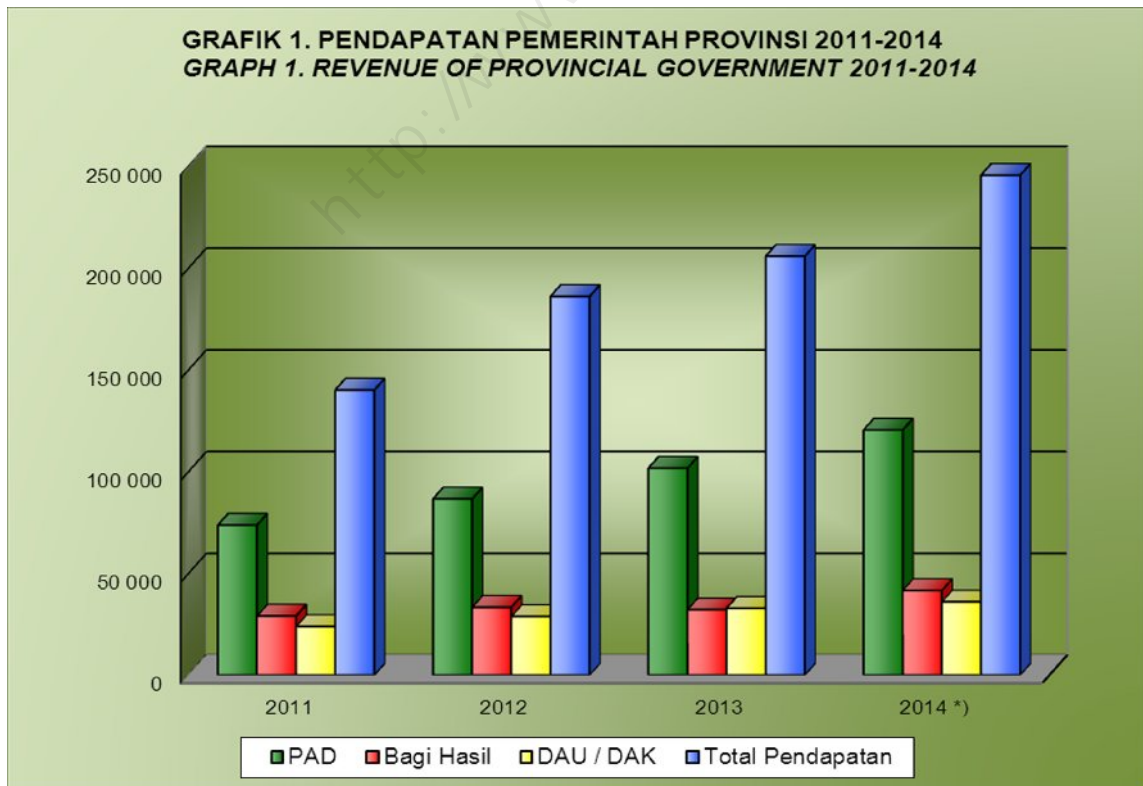
Komponen lain-lain PAD yang sah berada pada peringkat kedua, kemudian diikuti oleh pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan retribusi daerah.

Pada tahun 2014, PAD ditargetkan naik menjadi 120,38 triliun rupiah, sedangkan penerimaan pajak daerah ditargetkan meningkat sebesar 18,98 persen.

PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah

In 2014, PAD was targeted to 120.38 trillion rupiahs, while tax revenue was targeted to increase by 18.98 percent.

PAD is an important component in measuring the financial independence of a local government. The greater the role of PAD in the budget, the more independence is the local government. If the level of independence of a region is "very low", it can be said that the central government has the dominant role than the local government itself.



semakin kecil. Jika tingkat kemandirian suatu daerah “**rendah sekali**”, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian “**rendah**”, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “**sedang**”, menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “**tinggi**”, bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Meanwhile, if a region has a degree of independence "low", it means that the central government intervention has been decreased, because the region is considered to be a little more able to implement regional autonomy. Then, for the government with "medium" category, it means that the government region has been able to implement regional autonomy, while the category of "high", it could be mean that the local government has been able and independent in carrying out the affairs of local autonomy.

Tabel B. Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Tingkat Kemandirian 2011-2014
The Distribution of Province in Indonesia by Independence Rate Categories 2011-2014

Kategori Kemandirian	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rendah Sekali (0-25 %)	7	9	8	7
Rendah (>25-50 %)	14	16	15	17
Sedang (>50-75 %)	9	8	10	9
Tinggi (>75%)	3	0	0	0
Jumlah	33	33	33	33

*) Data APBD

Kontribusi PAD terhadap pendapatan pemerintah provinsi pada tahun 2011 hingga 2013 masih berkisar antara 40 hingga 50 persen, sehingga secara rata-rata tingkat kemandirian provinsi di Indonesia pada tahun-tahun tersebut masih dikategorikan rendah. Pada tahun 2011 tingkat kemandirian provinsi di Indonesia sebesar 52,59 persen dimana sudah masuk dalam kategori sedang. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa secara umum pemerintah provinsi semakin mandiri.

Pada tahun 2012, kontribusi PAD mengalami penurunan menjadi 46,53 persen, sedangkan pada tahun 2013 kontribusi PAD kembali mengalami kenaikan menjadi 49,37 persen. Pemerintah provinsi sangat berhati-hati dalam menargetkan anggaran PAD-nya pada tahun 2014, karena khawatir tidak dapat memenuhi target, sehingga porsi PAD terhadap total pendapatannya kembali menurun menjadi 49,03 persen.

Selanjutnya, pada tabel C dapat dilihat bahwa kontribusi pendapatan daerah yang berasal dari PAD tetap memberikan peranan terbesar. Pajak daerah merupakan komponen PAD yang memiliki kontribusi paling besar dengan besaran yang berfluktuasi pada

PAD contribution to total revenue of provincial government in 2011 to 2013 was in the range 40 to 50 percent. Thus, on average, the independence level of provinces categorized as low level. In 2011, the independence level of provinces was 52.59 percent which was in medium level. It indicated that, in general, the provincial government became more independent than before.

In 2012, PAD contribution decreased to 46.53 percent; but in 2013 it increased to 49.37 percent. The provincial government was very careful in targeting the PAD in 2014, for the reason of fearness that they could not meet the target. Consequently, PAD contribution to total revenue decreased to 49.03 percent in 2014.

Moreover, from table C it can be seen that the PAD contribution to total revenue had dominant effect.

Local taxes were component of PAD which had the biggest contribution, with the value is quite fluctuative in each years. The values were 44.83 percent in 2011, 39.24 percent in 2012, and 42.27 percent in 2013. The local taxes contribution to PAD also has been targeted to 42.15 percent in 2014.

tiap tahunnya, yaitu sebesar 44,83 persen pada tahun 2011; 39,24 persen pada tahun 2012; 42,27 persen pada tahun 2013; dan ditargetkan sebesar 42,15 persen pada tahun 2014.

Revenue derived from the balanced budget has tendency to decrease with a contribution of 37.70 percent, 33.33 percent, and 31.51 percent during the period of 2011-2013.

Tabel C. Kontribusi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan (persen), 2011-2014
Revenue Contribution of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Revenue (percent), 2011 - 2014

No.	Jenis Pendapatan	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah	52,59	46,53	49,37	49,03
a.	Pajak Daerah	44,83	39,24	42,27	42,15
b.	Retribusi Daerah	1,01	1,42	0,62	1,11
c.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,80	1,42	1,38	1,27
d.	Lain-lain PAD yang Sah	4,95	4,44	5,11	4,50
2.	Dana Perimbangan	37,70	33,33	31,51	31,56
a.	Bagi Hasil Pajak	11,75	11,46	8,64	10,74
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8,93	6,43	6,95	6,17
c.	Dana Alokasi Umum	16,11	14,72	15,05	13,89
d.	Dana Alokasi Khusus	0,91	0,72	0,86	0,76
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	9,71	20,14	19,12	19,41
JUMLAH/TOTAL		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Data APBD

Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan memiliki kecenderungan menurun dengan kontribusi sebesar 37,70 persen; 33,33 persen; dan 31,51 persen terhadap total pendapatan pada tahun 2011-2013. Pada tahun 2014 dana perimbangan dianggarkan memiliki kontribusi sebesar 31,56 persen.

In 2014 the balanced budget contribution has been determined as much as 31.56 percent.

Penerimaan dari dana perimbangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu i) dana bagi hasil berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam, ii) dana alokasi yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Kontribusi terbesar pada dana perimbangan ini berasal dari DAU, diikuti dengan bagi hasil pajak. Disisi lain jika dilihat dari DAU dan DAK yang diberikan pemerintah pusat, menandakan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat kurang dari 20 persen.

Sumber penerimaan pendapatan daerah yang memiliki kontribusi terkecil adalah lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2011 kontribusi komponen ini hanya sebesar 9,71 persen sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar 20,14 persen dan 19,12 persen. Dan di tahun 2014 lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan mempunyai kontribusi sebesar 19,41 persen. Peningkatan kontribusi disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan pada tiap-tiap provinsi.

The balanced budget consists of two parts, namely, i) the revenue from tax shares and natural resource shares, ii) the allocation of funds which include General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) that came from central government fund transfers. The highest contribution of the balanced budget was from General Allocation Fund (DAU), followed by tax shares. Viewed from the DAU and DAK that given by central government, it showed that dependency level of local government to central government is less than 20 percent.

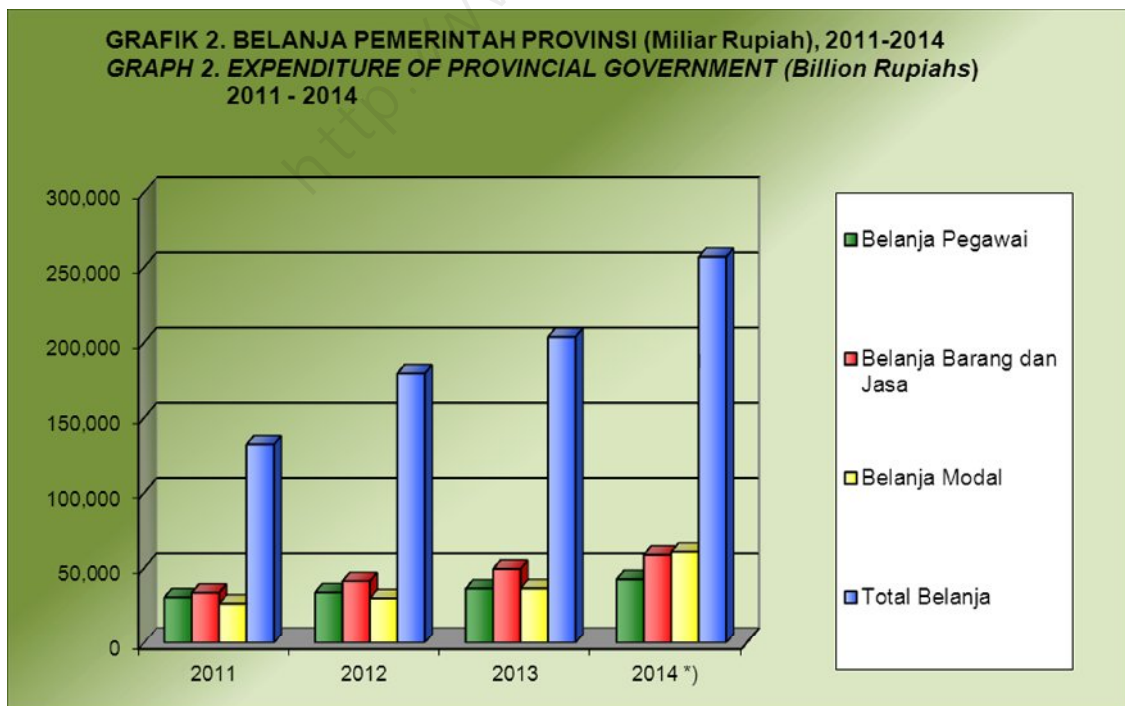
Then, the other component of local government revenue is others legal revenue that has the smallest contribution to total revenue. In 2011, its contribution amounted to 9.71 percent, while in 2012 and 2013 it was 20.14 percent and 19.12 percent respectively. Similarly, for 2014, others legal revenue contributions was expected to increase to 19.41 percent. This increasing is due to the increased of funding adjustments received by each province.

II.3. Belanja Daerah

Secara umum realisasi belanja daerah pada kurun waktu 2011-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 132,22 triliun rupiah pada tahun 2011 menjadi 179,45 triliun rupiah tahun 2012 dan 203,75 triliun rupiah pada tahun 2013. Pada tahun 2014 belanja daerah dianggarkan sebesar 257,01 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 26,14 persen dibanding tahun 2013. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada hampir seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja tidak

II.3. Local Government Expenditure

In general, local government expenditure during 2011-2013 increased every years, that was, from 132.22 trillion rupiahs in 2011 to 179.45 trillion rupiahs in 2012 and 203.75 trillion rupiahs in 2013. Whereas, in 2014 local government expenditure was targeted to 257.00 trillion rupiahs or increased by 26.14 percent compared to 2013. This increasing was due to the increase in almost all types of expenditure, both indirect expenditure and direct expenditure.



langsung maupun pada bagian belanja langsung.

Dilihat dari sisi realisasi pendapatan dan belanja daerah, pada tahun 2011-2013 secara umum terjadi surplus. Namun untuk tahun 2014, diperkirakan akan terjadi defisit anggaran dimana pendapatan bernilai 245,52 triliun rupiah (Tabel A) sedangkan belanja daerah bernilai 257,00 triliun rupiah (Tabel D). Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan komponen pembiayaan untuk menutup kekurangannya. Secara rinci realisasi belanja pemerintah disajikan pada tabel D.

In terms of the realization of revenue and expenditure, in general, during 2011-2013, the provinces budget experienced a surplus. Whereas, in fiscal year 2014, the local government expenditure was estimated have deficit budget, that the reflected in the value of revenue that was 245.52 trillion rupiahs and the expenditure 257.00 trillion rupiahs. The deficit can be covered by the local government financing receipt. In details, the actual expenditure of local government can be seen in Table D.

Tabel D. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja (Miliar Rupiah), 2011-2014
Actual Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure (Billion Rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Belanja	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	66 590	101 469	109 748	128 702
1.	Belanja Pegawai	24 826	27 209	28 593	34 183
2.	Belanja Bunga	15	26	36	82
3.	Belanja Subsidi	40	27	26	46
4.	Belanja Hibah	7 369	33 609	35 964	34 998
5.	Belanja Bantuan Sosial	4 008	1 402	2 267	2 616
6.	Belanja Bagi Hasil	17 301	20 956	22 612	29 376
7.	Belanja Bantuan Keuangan	12 842	18 004	20 048	26 287
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	191	236	202	1 112
B.	BELANJA LANGSUNG	65 627	77 977	94 001	128 307
1.	Belanja Pegawai	5 638	6 637	7 874	8 419
2.	Belanja Barang dan Jasa	33 657	41 370	49 557	58 964
3.	Belanja Modal	26 333	29 970	36 569	60 924
JUMLAH/TOTAL		132 217	179 446	203 749	257 009

*) Data APBD

Dari struktur belanja secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa komponen belanja didominasi oleh belanja barang dan jasa. Pada tahun 2011-2013, belanja tersebut berturut-turut tercatat sebesar 33,66 triliun rupiah, 41,37 triliun rupiah, dan 49,56 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 22,92 persen pada tahun 2012 dan 19,79 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014 belanja barang dan jasa dianggarkan mempunyai kontribusi yang lebih kecil dibandingkan dengan belanja modal, yaitu sebesar 58,92 triliun rupiah, sedangkan belanja modal sebesar 60,92 triliun rupiah.

Komponen belanja berikutnya yang cukup dominan adalah belanja pegawai, dalam hal ini gabungan dari belanja pegawai langsung dan tidak langsung. Pada tahun 2011, belanja tersebut tercatat sebesar 30,46 triliun rupiah dan pada tahun 2012 sebesar 33,85 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 11,10 persen dari tahun 2011. Sementara itu, pada tahun 2013 realisasi belanja pegawai sebesar 36,47 triliun rupiah atau naik sebesar 7,74 persen dari tahun 2012. Dan di tahun 2014, belanja pegawai

Based on the expenditure structure, it can be seen that the dominant component of the expenditure was goods and services expenditure. During 2011 to 2013, the goods and services expenditure was recorded to 33.66 trillion rupiahs, 41.37 trillion rupiahs and 49.55 trillion rupiahs or increased by 22.92 percent in 2012 and 19.79 percent in 2013. In 2014, goods and services expenditure has been budgeted lower than capital expenditure, namely 58.92 trillion rupiahs, while capital expenditure was 60.92 trillion rupiahs.

The next dominant component of expenditure was personnel expenditure, covering both direct and indirect personnel expenditure. In 2011, it recorded at 30.46 trillion rupiahs, and in 2012 it amounted to 33.85 trillion rupiahs or increased by 11.10 percent to those in 2011. Meanwhile, personnel expenditure in 2013 was 36.47 trillion rupiahs or increased by 7.74 persen from one year before. Then, in 2014 it budgeted to 42.60 trillion rupiahs or increased by 16.82 percent.

Tabel E. Kontribusi Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja (persen), 2011-2014
Contribution of Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure (percent), 2011-2014

No.	Jenis Belanja	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	50,36	56,55	53,86	50,08
1.	Belanja Pegawai	18,78	15,16	14,03	13,30
2.	Belanja Bunga	0,01	0,01	0,02	0,03
3.	Belanja Subsidi	0,03	0,02	0,01	0,02
4.	Belanja Hibah	5,57	18,73	17,65	13,62
5.	Belanja Bantuan Sosial	3,03	0,78	1,11	1,02
6.	Belanja Bagi Hasil	13,09	11,68	11,10	11,43
7.	Belanja Bantuan Keuangan	9,71	10,03	9,84	10,23
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	0,14	0,13	0,10	0,43
B.	BELANJA LANGSUNG	49,64	43,45	46,14	49,92
1.	Belanja Pegawai	4,26	3,70	3,86	3,28
2.	Belanja Barang dan Jasa	25,46	23,05	24,32	22,94
3.	Belanja Modal	19,92	16,70	17,95	23,71
JUMLAH/TOTAL		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Data APBD

dianggarkan mengalami kenaikan sebesar 16,82 persen atau sebesar 42,60 triliun rupiah.

Tabel E menunjukkan kontribusi dari struktur belanja secara keseluruhan, dimana pada tahun 2011-2014 belanja tidak langsung memberikan kontribusi yang lebih besar dari belanja langsung. Pada tahun 2011, komponen belanja tidak langsung yang memiliki kontribusi terbesar adalah belanja pegawai yaitu sebesar 18,78 persen. Sedangkan untuk tahun 2012 hingga tahun 2014 belanja hibah menjadi komponen yang paling dominan peranannya dalam belanja

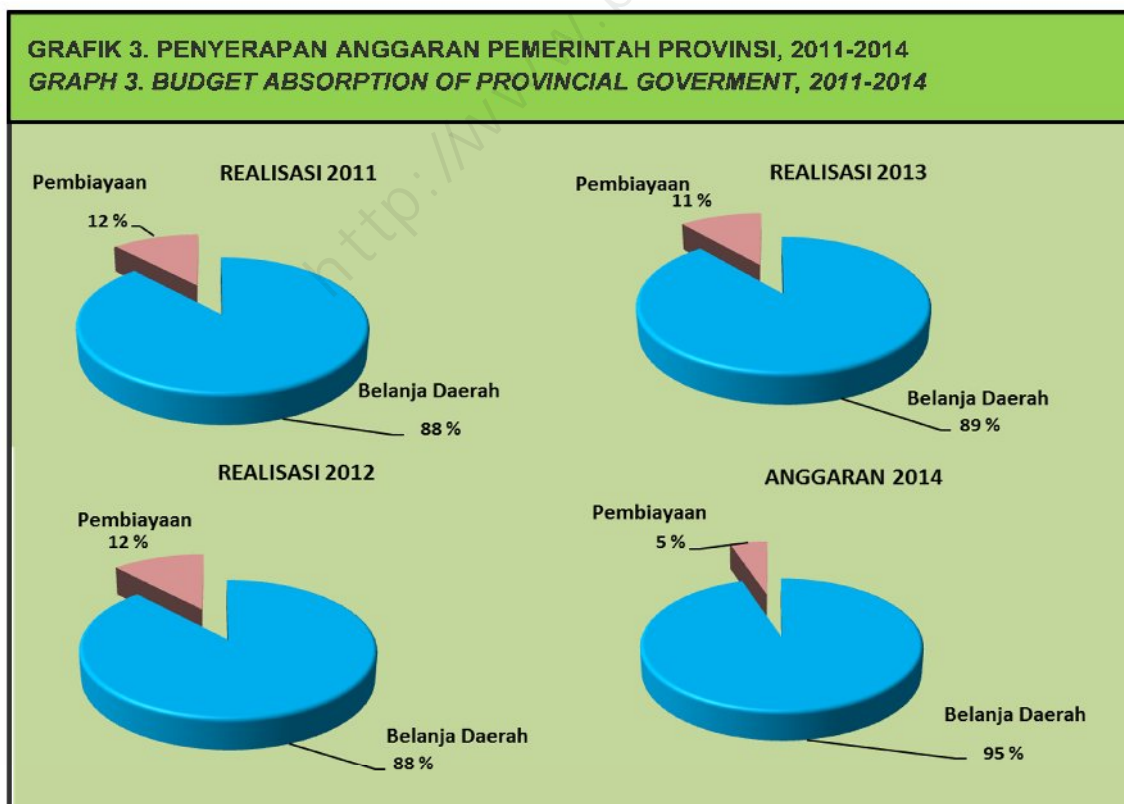
Table E figured out of the contribution of each component to total expenditure during 2011-2014, where indirect expenditure was higher than direct expenditure. In 2011, personnel expenditure was the component with the highest contribution to indirect expenditure, that was 18.78 percent. But in the period 2012 to 2014, grant expenditure was the component with the highest contribution, namely 18.73 percent, 17.65 percent, and 13.62 percent, respectively.

tidak langsung dengan kontribusi masing-masing sebesar 18,73 persen, 17,65 persen, dan 13,62 persen.

Sementara itu, untuk belanja langsung, komponen yang mempunyai kontribusi yang besar adalah belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Kontribusi keduanya sebesar 45,37 persen pada tahun 2011, 39,76 persen pada tahun 2012, 42,27 persen pada tahun 2013, dan dianggarkan mempunyai kontribusi sebesar 46,65 persen pada tahun 2014.

Meanwhile, in direct expenditure structure, the component with high portion were goods and services expenditure and capital expenditure. The contribution of both expenditures were 45.37 percent in 2011, 39.76 percent in 2012, 42.27 percent in 2013. It has been targeted to have contribution of 46.65 in 2014.

The absorption of local budget, which is represented by the percentage of actual expenditure to total revenue,



Penyerapan anggaran daerah yang merupakan presentase realisasi belanja terhadap pendapatan daerah terus mengalami kenaikan selama kurun waktu 2011-2013. Pada tahun 2011 penyerapan anggaran mencapai 88,20 persen, naik menjadi 88,47 persen pada tahun 2012 dan 88,87 persen pada tahun 2013. Sedangkan target penyerapan anggaran pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 95,35 persen (grafik 3).

showed increasing during 2011-2013. In 2011, it was recorded as much as 88.20 percent, then increased to 88.47 percent in 2012. In 2013, the absorption of budget increased to 88.87 percent. Meanwhile, the target of budget absorption in 2014 was 95.35 percent (graph 3).

TABEL

TABLE 1.

<http://www.bps.go.id>

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.a (juta rupiah), 2011
 TABLE 1.a ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
 (million rupiahs), 2011

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aceh	7 610 320	1 306 726	8 917 046	7 374 625	1 542 421	8 917 046
2.	Sumatera Utara	4 958 482	404 885	5 363 367	4 611 477	751 890	5 363 367
3.	Sumatera Barat	2 071 161	335 221	2 406 382	2 328 765	77 617	2 406 382
4.	Riau	5 440 441	421 520	5 861 961	4 265 130	1 596 831	5 861 961
5.	Jambi	2 078 807	353 260	2 432 067	1 750 242	681 825	2 432 067
6.	Sumatera Selatan	3 963 985	390 315	4 354 300	3 806 080	548 220	4 354 300
7.	Bengkulu	1 166 982	39 679	1 206 661	1 009 215	197 446	1 206 661
8.	Lampung	2 527 991	161 182	2 689 173	2 566 079	123 094	2 689 173
9.	Bangka Belitung	1 193 497	240 433	1 433 930	1 176 684	257 246	1 433 930
10.	Kepulauan Riau	1 876 879	375 005	2 251 884	1 947 593	304 291	2 251 884
11.	DKI Jakarta	28 297 361	4 926 078	33 223 439	26 423 682	6 799 757	33 223 439
12.	Jawa Barat	11 053 860	2 449 743	13 503 603	10 295 570	3 208 033	13 503 603
13.	Jawa Tengah	7 547 670	1 239 076	8 786 746	7 776 706	1 010 040	8 786 746
14.	DI Yogyakarta	1 604 911	254 232	1 859 143	1 294 221	564 922	1 859 143
15.	Jawa Timur	11 493 376	1 564 783	13 058 159	11 685 921	1 372 238	13 058 159
16.	Banten	3 755 614	535 848	4 291 462	3 901 218	390 244	4 291 462
17.	Bali	2 662 077	704 385	3 366 462	2 564 801	801 661	3 366 462
18.	Nusa Tenggara Barat	1 689 351	17 280	1 706 631	1 650 601	56 030	1 706 631
19.	Nusa Tenggara Timur	1 324 470	120 235	1 444 705	1 231 883	212 822	1 444 705
20.	Kalimantan Barat	2 202 217	231 734	2 433 951	1 996 323	437 628	2 433 951
21.	Kalimantan Tengah	1 921 945	132 100	2 054 045	1 524 344	529 701	2 054 045
22.	Kalimantan Selatan	3 148 043	324 879	3 472 922	2 465 734	1 007 188	3 472 922
23.	Kalimantan Timur	9 817 100	1 652 438	11 469 538	8 143 273	3 326 265	11 469 538
24.	Sulawesi Utara	1 365 705	109 274	1 474 979	1 285 865	189 114	1 474 979
25.	Sulawesi Tengah	1 410 594	220 705	1 631 299	1 426 082	205 217	1 631 299
26.	Sulawesi Selatan	3 110 567	290 515	3 401 082	3 177 044	224 038	3 401 082
27.	Sulawesi Tenggara	1 288 980	198 733	1 487 713	1 328 025	159 688	1 487 713
28.	Gorontalo	697 576	96 844	794 420	724 528	69 892	794 420
29.	Sulawesi Barat	718 871	25 752	744 623	731 368	13 255	744 623
30.	Maluku	1 138 187	55 485	1 193 672	1 109 921	83 751	1 193 672
31.	Maluku Utara	936 792	15 732	952 524	724 375	228 149	952 524
32.	Papua Barat	3 699 884	353 184	4 053 068	3 629 960	423 108	4 053 068
33.	Papua	6 227 545	955 939	7 183 484	6 290 376	893 108	7 183 484
JUMLAH/TOTAL		140 001 241	20 503 200	160 504 441	132 217 711	28 286 730	160 504 441

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.b (juta rupiah), 2012
TABLE 1.b ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
 (million rupiahs), 2012

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aceh	9 180 143	1 508 841	10 688 984	8 757 320	1 931 664	10 688 984
2.	Sumatera Utara	7 201 840	720 865	7 922 705	7 633 634	289 071	7 922 705
3.	Sumatera Barat	2 922 582	361 250	3 283 832	2 962 291	321 541	3 283 832
4.	Riau	6 847 315	1 906 680	8 753 995	6 670 764	2 083 231	8 753 995
5.	Jambi	2 654 694	632 401	3 287 095	2 531 598	755 497	3 287 095
6.	Sumatera Selatan	5 223 884	477 176	5 701 060	5 060 923	640 137	5 701 060
7.	Bengkulu	1 562 525	197 340	1 759 865	1 518 453	241 412	1 759 865
8.	Lampung	3 742 004	117 690	3 859 694	3 834 736	24 958	3 859 694
9.	Bangka Belitung	1 384 937	242 124	1 627 061	1 332 039	295 022	1 627 061
10.	Kepulauan Riau	2 473 412	290 738	2 764 150	2 249 826	514 324	2 764 150
11.	DKI Jakarta	35 379 180	6 475 552	41 854 732	31 558 707	10 296 025	41 854 732
12.	Jawa Barat	16 878 129	3 003 186	19 881 315	16 922 477	2 958 838	19 881 315
13.	Jawa Tengah	11 694 480	707 736	12 402 216	11 446 844	955 372	12 402 216
14.	DI Yogyakarta	2 171 734	293 609	2 465 343	2 053 826	411 517	2 465 343
15.	Jawa Timur	15 543 040	1 359 475	16 902 515	15 311 543	1 590 972	16 902 515
16.	Banten	5 413 705	374 845	5 788 550	5 317 736	470 814	5 788 550
17.	Bali	3 633 134	787 312	4 420 446	3 562 733	857 713	4 420 446
18.	Nusa Tenggara Barat	2 242 817	17 714	2 260 531	2 189 182	71 349	2 260 531
19.	Nusa Tenggara Timur	2 241 542	188 711	2 430 253	2 164 356	265 897	2 430 253
20.	Kalimantan Barat	2 932 913	383 302	3 316 215	3 043 957	272 258	3 316 215
21.	Kalimantan Tengah	2 514 031	451 606	2 965 637	2 351 347	614 290	2 965 637
22.	Kalimantan Selatan	4 381 611	933 954	5 315 565	4 004 269	1 311 296	5 315 565
23.	Kalimantan Timur	11 886 471	2 837 724	14 724 195	11 357 198	3 366 997	14 724 195
24.	Sulawesi Utara	1 834 908	189 114	2 024 022	1 771 118	252 904	2 024 022
25.	Sulawesi Tengah	1 962 393	209 217	2 171 610	2 013 022	158 588	2 171 610
26.	Sulawesi Selatan	4 433 963	212 338	4 646 301	4 603 648	42 653	4 646 301
27.	Sulawesi Tenggara	1 811 984	23 591	1 835 575	1 714 896	120 679	1 835 575
28.	Gorontalo	933 170	63 969	997 139	885 021	112 118	997 139
29.	Sulawesi Barat	959 030	19 000	978 030	868 133	109 897	978 030
30.	Maluku	1 436 646	78 104	1 514 750	1 355 988	158 762	1 514 750
31.	Maluku Utara	1 196 746	199 701	1 396 447	1 259 660	136 787	1 396 447
32.	Papua Barat	3 873 388	398 119	4 271 507	3 898 932	372 575	4 271 507
33.	Papua	7 462 045	779 591	8 241 636	7 239 667	1 001 969	8 241 636
JUMLAH/TOTAL		186 010 396	26 442 575	212 452 971	179 445 844	33 007 127	212 452 971

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.c (juta rupiah), 2013
 TABLE 1.c ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
 (million rupiahs), 2013

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aceh	10 671 827	1 968 699	12 640 526	11 220 428	1 420 098	12 640 526
2.	Sumatera Utara	7 397 986	14 108	7 412 094	7 260 468	151 626	7 412 094
3.	Sumatera Barat	3 147 839	276 751	3 424 590	3 113 313	311 277	3 424 590
4.	Riau	6 994 646	1 978 313	8 972 959	7 525 283	1 447 676	8 972 959
5.	Jambi	2 886 305	690 767	3 577 072	3 010 741	566 331	3 577 072
6.	Sumatera Selatan	5 468 140	521 335	5 989 475	5 678 704	310 771	5 989 475
7.	Bengkulu	1 696 370	241 356	1 937 726	1 727 006	210 720	1 937 726
8.	Lampung	3 901 951	23 711	3 925 662	3 884 536	41 126	3 925 662
9.	Bangka Belitung	1 529 111	285 022	1 814 133	1 609 667	204 466	1 814 133
10.	Kepulauan Riau	2 843 718	514 289	3 358 007	2 715 832	642 175	3 358 007
11.	DKI Jakarta	39 517 544	9 463 721	48 981 265	38 301 502	10 679 763	48 981 265
12.	Jawa Barat	19 237 611	2 934 631	22 172 242	18 396 745	3 775 497	22 172 242
13.	Jawa Tengah	13 343 358	1 306 017	14 649 375	12 724 776	1 924 599	14 649 375
14.	DI Yogyakarta	2 583 057	403 200	2 986 257	2 509 643	476 614	2 986 257
15.	Jawa Timur	17 372 769	1 753 509	19 126 278	16 738 658	2 387 620	19 126 278
16.	Banten	6 230 230	450 814	6 681 044	5 295 139	1 385 905	6 681 044
17.	Bali	4 109 378	899 203	5 008 581	3 868 741	1 139 840	5 008 581
18.	Nusa Tenggara Barat	2 379 594	28 135	2 407 729	2 379 594	28 135	2 407 729
19.	Nusa Tenggara Timur	2 393 070	245 945	2 639 015	2 381 311	257 704	2 639 015
20.	Kalimantan Barat	3 262 314	222 258	3 484 572	3 296 607	187 965	3 484 572
21.	Kalimantan Tengah	2 809 096	559 334	3 368 430	2 928 725	439 705	3 368 430
22.	Kalimantan Selatan	4 350 811	1 203 925	5 554 736	4 750 074	804 662	5 554 736
23.	Kalimantan Timur	11 631 697	3 198 904	14 830 601	13 780 245	1 050 356	14 830 601
24.	Sulawesi Utara	2 062 083	252 914	2 314 997	2 025 591	289 406	2 314 997
25.	Sulawesi Tengah	2 132 935	147 789	2 280 724	2 145 228	135 496	2 280 724
26.	Sulawesi Selatan	4 867 593	149 803	5 017 396	4 924 218	93 178	5 017 396
27.	Sulawesi Tenggara	1 972 560	203 680	2 176 240	1 812 945	363 295	2 176 240
28.	Gorontalo	1 052 626	101 033	1 153 659	1 050 817	102 842	1 153 659
29.	Sulawesi Barat	1 073 860	101 380	1 175 240	1 044 071	131 169	1 175 240
30.	Maluku	1 545 465	149 438	1 694 903	1 576 449	118 454	1 694 903
31.	Maluku Utara	1 315 899	125 225	1 441 124	1 387 593	53 531	1 441 124
32.	Papua Barat	5 637 697	372 575	6 010 272	4 512 430	1 497 842	6 010 272
33.	Papua	8 361 139	768 416	9 129 555	8 171 352	958 203	9 129 555
JUMLAH/TOTAL		205 780 279	31 556 200	237 336 479	203 748 432	33 588 047	237 336 479

ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.d (juta rupiah), 2014
 TABLE 1.d RECEIPT AND EXPENDITURE BUDGET OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
 (million rupiahs), 2014

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	11 164 408	2 203 620	13 368 028	13 368 028	0	13 368 028
2.	Sumatera Utara	8 488 644	37 657	8 526 301	8 526 301	0	8 526 301
3.	Sumatera Barat	3 497 297	225 000	3 722 297	3 608 889	113 408	3 722 297
4.	R i a u	7 126 649	1 150 102	8 276 751	8 276 751	0	8 276 751
5.	J a m b i	2 981 991	283 338	3 265 329	3 265 329	0	3 265 329
6.	Sumatera Selatan	7 136 876	280 690	7 417 566	6 548 054	869 512	7 417 566
7.	Bengkulu	1 805 516	103 661	1 909 177	1 896 632	12 545	1 909 177
8.	Lampung	4 298 707	25 998	4 324 705	4 318 205	6 500	4 324 705
9.	Bangka Belitung	1 755 460	260 399	2 015 859	2 015 859	0	2 015 859
10.	Kepulauan Riau	2 970 687	524 313	3 495 000	3 460 000	35 000	3 495 000
11.	DKI Jakarta	64 715 735	7 284 400	72 000 135	64 882 747	7 117 388	72 000 135
12.	Jawa Barat	19 907 973	1 588 817	21 496 790	21 194 365	302 425	21 496 790
13.	Jawa Tengah	13 737 158	300 000	14 037 158	13 997 158	40 000	14 037 158
14.	D I Yogyakarta	3 100 198	280 822	3 381 020	3 330 070	50 950	3 381 020
15.	Jawa Timur	18 799 577	813 991	19 613 568	18 796 935	816 633	19 613 568
16.	Banten	6 878 072	759 418	7 637 490	7 349 402	288 088	7 637 490
17.	B a l i	3 958 173	751 494	4 709 667	4 489 667	220 000	4 709 667
18.	Nusa Tenggara Barat	2 863 555	10 650	2 874 205	2 834 205	40 000	2 874 205
19.	Nusa Tenggara Timur	2 720 974	97 957	2 818 931	2 738 061	80 870	2 818 931
20.	Kalimantan Barat	3 729 897	100 000	3 829 897	3 754 897	75 000	3 829 897
21.	Kalimantan Tengah	3 041 907	234 500	3 276 407	3 218 907	57 500	3 276 407
22.	Kalimantan Selatan	4 701 326	655 000	5 356 326	5 266 326	90 000	5 356 326
23.	Kalimantan Timur	12 130 000	1 800 000	13 930 000	13 805 000	125 000	13 930 000
24.	Sulawesi Utara	2 329 336	148 283	2 477 619	2 452 619	25 000	2 477 619
25.	Sulawesi Tengah	2 379 648	67 536	2 447 184	2 440 484	6 700	2 447 184
26.	Sulawesi Selatan	5 593 933	296 445	5 890 378	5 838 878	51 500	5 890 378
27.	Sulawesi Tenggara	2 055 647	180 608	2 236 255	2 186 170	50 085	2 236 255
28.	Gorontalo	1 203 082	101 576	1 304 658	1 294 658	10 000	1 304 658
29.	Sulawesi Barat	1 226 173	81 067	1 307 240	1 305 240	2 000	1 307 240
30.	M a l u k u	1 839 703	87 016	1 926 719	1 906 633	20 086	1 926 719
31.	Maluku Utara	1 619 653	30 000	1 649 653	1 567 153	82 500	1 649 653
32.	Papua Barat	5 270 316	649 880	5 920 196	5 870 210	49 986	5 920 196
33.	P a p u a	10 489 109	825 969	11 315 078	11 205 078	110 000	11 315 078
JUMLAH/TOTAL		245 517 380	22 240 207	267 757 587	257 008 911	10 748 676	267 757 587

TABEL

TABLE 2.

<http://www.bps.go.id>

TABEL 2 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	140 001 241 096	186 010 396 198	205 780 279 058	245 517 380 341
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	73 620 310 358	86 541 912 951	101 596 400 437	120 376 276 490
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	62 759 000 075	72 996 679 774	86 979 670 640	103 490 380 800
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	1 408 726 470	2 645 679 139	1 267 843 490	2 714 976 953
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	2 524 288 765	2 642 209 423	2 837 923 962	3 119 212 354
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	6 928 295 048	8 257 344 615	10 510 962 345	11 051 706 383
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	52 779 890 539	61 998 339 390	64 834 193 347	77 474 772 055
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	16 447 715 087	21 314 535 277	17 781 418 940	26 358 756 908
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	12 508 737 244	11 969 460 145	14 299 514 233	15 154 363 360
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	22 553 282 483	27 381 818 820	30 977 874 897	34 101 379 297
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	1 270 155 725	1 332 525 148	1 775 385 277	1 860 272 490
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	13 601 040 199	37 470 143 857	39 349 685 274	47 666 331 796
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	20 503 199 782	26 442 574 719	31 556 200 366	22 240 207 056
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		160 504 440 878	212 452 970 917	237 336 479 424	267 757 587 397

*) Data APBD

TABEL 2.1 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.1 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF ACEH BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	7 610 320 146	9 180 143 048	10 671 826 520	11 164 408 627
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	802 840 174	901 720 376	1 325 435 091	1 312 371 179
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	586 181 446	687 476 817	752 846 745	909 747 859
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	9 416 022	6 317 974	6 346 062	0
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	66 007 132	96 317 228	123 628 755	112 748 543
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	141 235 574	111 608 357	442 613 529	289 874 777
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 262 044 905	1 334 800 286	2 675 448 212	2 462 715 671
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	224 636 959	251 127 885	254 514 663	250 706 191
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 270 150 474	122 177 984	1 253 339 521	937 442 903
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	716 646 172	911 080 707	1 092 445 518	1 201 612 787
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	50 611 300	50 413 710	75 148 510	72 953 790
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	4 545 435 067	6 943 622 386	6 670 943 217	7 389 321 777
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	1 306 726 214	1 508 840 609	1 968 699 122	2 203 619 848
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		8 917 046 360	10 688 983 657	12 640 525 642	13 368 028 475
*) Data APBD					

TABEL 2.2 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.2 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA UTARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	4 958 481 902	7 201 839 293	7 397 986 772	8 488 643 829
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	3 578 462 082	4 052 104 891	4 091 285 887	4 944 501 839
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	3 141 123 907	3 636 074 646	3 685 437 788	4 533 946 180
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	31 297 594	33 494 628	79 173 619	18 364 946
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	289 249 771	263 801 190	229 337 171	242 514 468
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	116 790 810	118 734 427	97 337 309	149 676 245
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 373 897 545	1 605 181 560	1 710 602 556	1 906 486 133
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	379 382 434	451 848 733	424 244 826	467 151 977
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	7 162 107	8 315 200	8 088 878	10 564 030
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	948 867 504	1 103 389 237	1 223 445 404	1 349 132 276
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	38 485 500	41 628 390	54 823 448	79 637 850
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	6 122 275	1 544 552 842	1 596 098 329	1 637 655 857
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	404 884 723	720 866 154	14 107 542	37 657 126
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		5 363 366 625	7 922 705 447	7 412 094 314	8 526 300 955

*) Data APBD

TABEL 2.3 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.3 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 071 161 196	2 922 582 140	3 147 840 359	3 497 297 058
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 147 303 770	1 225 466 023	1 366 178 102	1 568 556 942
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	933 800 000	994 570 032	1 085 164 285	1 262 050 267
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	32 331 466	38 054 666	34 595 713	13 036 290
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	80 602 797	80 348 993	93 871 535	99 508 220
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	100 569 507	112 492 332	152 546 569	193 962 165
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	897 640 879	1 143 895 852	1 240 879 867	1 359 925 006
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	90 617 394	183 066 225	131 404 781	167 070 500
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 609 290	9 768 542	5 610 600	8 860 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	764 680 895	918 560 365	1 039 922 511	1 129 886 306
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	40 733 300	32 500 720	63 941 975	54 108 200
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	26 216 547	553 220 265	540 782 390	568 815 110
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	335 221 212	361 250 283	276 750 267	225 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 406 382 408	3 283 832 423	3 424 590 626	3 722 297 058

*) Data APBD

TABEL 2.4 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.4 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF RIAU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	5 440 440 485	6 847 315 820	6 994 646 205	7 126 649 001
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	2 210 130 782	2 588 688 445	2 725 623 913	2 840 010 798
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 773 621 889	2 058 595 751	2 110 997 530	2 322 000 532
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	8 490 985	12 174 266	24 359 497	25 000 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	131 607 412	139 601 792	146 463 620	166 746 206
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	296 410 496	378 316 636	443 803 266	326 264 060
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	3 226 836 381	3 618 842 731	3 610 182 230	3 638 491 673
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	465 189 186	502 497 680	618 581 036	525 984 814
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	2 324 772 671	2 564 673 767	2 226 231 958	2 247 784 765
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	380 051 124	489 179 914	726 630 916	820 984 584
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	56 823 400	62 491 370	38 738 320	43 737 510
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	3 473 322	639 784 644	658 840 062	648 146 530
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	421 520 453	1 906 680 479	1 978 312 715	1 150 102 342
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		5 861 960 938	8 753 996 299	8 972 958 920	8 276 751 343

*) Data APBD

TABEL 2.5 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.5 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAMBI BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 078 806 913	2 654 694 237	2 886 305 068	2 981 991 350
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	984 232 580	995 822 608	1 063 922 065	973 070 077
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	838 851 529	808 258 461	841 884 452	808 437 580
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	10 195 268	12 053 725	15 363 759	16 382 166
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	21 703 149	29 984 606	26 879 028	40 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	113 482 634	145 525 816	179 794 826	108 250 331
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 075 207 719	1 332 579 087	1 489 852 560	1 631 447 786
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	165 268 384	217 355 132	246 548 942	239 090 645
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	301 321 322	350 162 175	353 397 070	394 663 919
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	583 882 413	731 952 242	836 578 062	948 337 712
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	24 735 600	33 109 538	53 328 486	49 355 510
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	19 366 614	326 292 542	332 530 443	377 473 487
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	353 260 385	632 401 128	690 767 077	283 338 396
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 432 067 298	3 287 095 365	3 577 072 145	3 265 329 746
*) Data APBD					

TABEL 2.6 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.6 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA SELATAN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	3 963 984 966	5 223 884 081	5 468 139 691	7 136 875 876
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 849 119 912	2 001 739 389	2 021 696 787	2 482 128 778
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 671 518 572	1 803 818 849	1 882 596 916	2 275 320 400
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	11 682 782	13 376 825	16 522 296	16 671 012
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	78 956 548	85 892 644	59 352 769	113 471 240
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	86 962 010	98 651 071	63 224 806	76 666 126
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 992 557 000	2 378 798 651	2 649 216 454	3 841 411 648
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	379 632 596	490 241 630	572 654 634	683 024 160
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	933 824 103	1 127 002 330	1 180 856 653	2 110 089 828
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	646 813 301	716 153 261	870 516 767	985 542 760
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	32 287 000	45 401 430	25 188 400	62 754 900
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	122 308 054	843 346 041	797 226 450	813 335 450
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	390 314 822	477 175 785	521 334 563	280 690 624
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		4 354 299 788	5 701 059 866	5 989 474 254	7 417 566 500

*) Data APBD

TABEL 2.7 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.7 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BENGKULU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 166 982 246	1 562 525 395	1 696 369 921	1 805 515 620
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	440 928 213	483 768 275	525 207 935	532 938 109
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	333 103 966	370 247 703	394 141 932	400 991 260
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	6 590 792	7 655 853	12 326 203	11 329 064
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	12 488 395	7 636 009	12 069 161	13 980 842
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	88 745 060	98 228 710	106 670 639	106 636 943
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	712 256 295	882 996 673	977 347 954	1 074 576 601
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	18 519 664	61 848 269	53 933 686	50 540 235
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	49 738 995	17 216 628	17 179 110	15 014 159
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	607 388 036	775 311 166	854 647 828	955 095 187
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	36 609 600	28 620 610	51 587 330	53 927 020
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	13 797 738	195 760 447	193 814 032	198 000 910
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	39 678 718	197 339 471	241 356 037	103 660 555
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 206 660 964	1 759 864 866	1 937 725 958	1 909 176 175

*) Data APBD

TABEL 2.8 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.8 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF LAMPUNG BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 527 990 902	3 742 004 283	3 901 950 614	4 298 707 767
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 395 675 721	1 687 701 199	1 771 297 935	2 005 245 670
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 199 945 831	1 465 711 124	1 547 336 215	1 789 309 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	8 689 231	8 209 834	8 672 979	7 896 841
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	19 398 638	21 270 704	25 144 919	24 352 983
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	167 642 021	192 509 537	190 143 822	183 686 846
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 063 287 255	1 280 851 522	1 384 043 537	1 471 956 084
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	126 734 977	164 927 667	145 424 014	147 746 141
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	124 369 040	145 696 928	117 848 110	139 305 282
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	769 973 038	939 139 287	1 060 663 183	1 136 053 041
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	42 210 200	31 087 640	60 108 230	48 851 620
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	69 027 926	773 451 562	746 609 142	821 506 013
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	161 181 629	117 688 684	23 710 615	25 997 615
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 689 172 531	3 859 692 967	3 925 661 229	4 324 705 382

*) Data APBD

TABEL 2.9 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.9 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANGKA BELITUNG BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 193 497 245	1 384 937 385	1 529 111 282	1 755 460 469
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	459 208 310	438 373 573	495 796 075	494 204 467
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	418 338 202	396 527 427	447 462 199	446 313 795
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	3 565 501	3 689 016	5 327 341	3 897 379
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	4 016 266	7 193 086	5 390 252	7 500 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	33 288 341	30 964 044	37 616 283	36 493 293
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	700 510 364	821 499 996	907 835 915	1 126 642 872
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	55 995 923	63 591 599	60 622 259	93 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	145 043 626	98 684 932	85 902 968	183 446 266
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	481 589 915	634 087 815	717 140 118	806 820 146
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	17 880 900	25 135 650	44 170 570	43 376 460
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	33 778 571	125 063 816	125 479 292	134 613 130
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	240 432 353	242 123 559	285 022 225	260 398 812
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 433 929 598	1 627 060 944	1 814 133 507	2 015 859 281

*) Data APBD

TABEL 2.10 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.10 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KEPULAUAN RIAU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 876 879 092	2 473 411 609	2 843 717 790	2 970 687 382
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	620 901 422	723 053 960	907 982 039	875 913 016
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	572 738 970	685 601 565	852 188 093	837 918 016
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	1 655 565	5 352 202	13 413 198	6 285 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	0	2 559 183	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	46 506 887	32 100 193	39 821 565	31 710 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 246 904 170	1 594 446 909	1 753 710 493	1 871 268 804
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	217 469 127	1 110 423 502	198 090 541	161 259 571
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	611 786 301	0	862 879 432	970 321 825
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	395 745 542	460 857 807	656 067 610	698 009 318
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	21 903 200	23 165 600	36 672 910	41 678 090
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	9 073 500	155 910 740	182 025 258	223 505 562
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	375 005 362	290 737 799	514 289 374	524 312 618
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 251 884 454	2 764 149 408	3 358 007 164	3 495 000 000

*) Data APBD

TABEL 2.11 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.11 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	28 297 361 175	35 379 180 052	39 517 544 012	64 715 734 943
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	17 825 986 987	22 040 801 448	26 852 192 453	39 559 414 993
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	15 221 249 846	17 721 493 016	23 370 213 237	32 500 000 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	609 349 051	1 820 435 448	333 787 344	1 746 418 633
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	278 789 768	351 823 211	397 234 722	447 550 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	1 716 598 322	2 147 049 773	2 750 957 150	4 865 446 360
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	9 149 708 963	11 554 964 808	9 387 539 402	17 770 000 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	8 747 636 170	10 984 787 700	8 863 205 864	17 434 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	192 163 351	294 849 251	225 151 072	250 000 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	209 909 442	275 327 857	299 182 466	86 000 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	1 321 665 225	1 783 413 796	3 277 812 157	7 386 319 950
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	4 926 078 266	6 475 552 012	9 463 721 531	7 284 400 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		33 223 439 441	41 854 732 064	48 981 265 543	72 000 134 943

*) Data APBD

TABEL 2.12 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.12 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	11 053 859 588	16 878 128 995	19 237 611 310	19 907 972 852
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	8 502 643 155	9 982 917 415	12 360 109 870	13 037 556 434
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	7 696 484 754	9 149 214 330	11 236 145 855	12 215 081 305
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	50 737 863	57 326 324	63 654 936	57 677 820
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	229 147 336	232 647 377	261 601 089	273 408 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	526 273 202	543 729 384	798 707 990	491 389 309
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 526 078 027	2 832 746 609	2 950 532 546	2 820 258 175
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	999 708 518	1 199 350 816	1 026 017 163	859 786 759
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	299 051 801	315 078 753	371 990 322	194 570 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 181 553 108	1 269 960 760	1 472 453 011	1 687 686 386
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	45 764 600	48 356 280	80 072 050	78 215 030
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	25 138 406	4 062 464 971	3 926 968 894	4 050 158 243
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	2 449 742 872	3 003 186 559	2 934 630 844	1 588 816 675
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		13 503 602 460	19 881 315 554	22 172 242 154	21 496 789 527

*) Data APBD

TABEL 2.13 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.13 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TENGAH BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	7 547 669 804	11 694 479 699	13 343 358 327	13 737 158 183
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	5 564 233 152	6 629 308 010	8 212 800 641	8 347 874 665
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	4 599 046 987	5 590 597 156	6 716 170 095	7 097 094 340
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	64 549 242	68 250 252	69 970 596	78 031 283
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	211 976 159	238 231 933	263 267 978	279 440 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	688 660 764	732 228 669	1 163 391 972	893 309 042
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 950 189 365	2 318 806 100	2 467 814 629	2 606 901 162
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	511 527 047	610 215 375	583 478 946	589 474 308
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	110 692 295	141 067 324	130 953 804	134 330 425
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 276 180 223	1 516 892 951	1 670 859 369	1 803 931 189
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	51 789 800	50 630 450	82 522 510	79 165 240
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	33 247 287	2 746 365 589	2 662 743 057	2 782 382 356
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	1 239 075 792	707 735 960	1 306 017 472	300 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		8 786 745 596	12 402 215 659	14 649 375 799	14 037 158 183

*) Data APBD

TABEL 2.14 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.14 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DI YOGYAKARTA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 604 910 831	2 171 734 308	2 583 056 764	3 100 197 643
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	867 112 885	1 004 063 126	1 216 102 750	1 233 738 562
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	735 226 106	871 630 605	1 063 314 118	1 098 908 544
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	35 985 658	34 115 158	38 043 014	36 670 322
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	28 961 383	35 492 533	40 817 517	45 505 543
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	66 939 738	62 824 830	73 928 101	52 654 153
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	722 339 653	894 544 325	957 561 851	1 038 621 026
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	75 967 202	112 691 591	89 148 689	101 555 821
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	6 070 523	5 743 298	5 582 494	10 045
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	620 812 328	757 056 696	828 334 768	899 923 550
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	19 489 600	19 052 740	34 495 900	37 131 610
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	15 458 293	273 126 857	409 392 163	827 838 055
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	254 231 964	293 608 593	403 200 659	280 821 707
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 859 142 795	2 465 342 901	2 986 257 423	3 381 019 350

*) Data APBD

TABEL 2.15 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.15 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TIMUR BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	11 493 375 583	15 543 039 549	17 372 768 544	18 799 577 310
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	8 898 616 683	9 725 627 569	11 596 376 615	12 503 564 802
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	7 298 242 129	7 816 590 831	9 404 934 972	10 685 000 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	66 359 751	118 823 638	105 580 782	104 887 319
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	365 149 165	352 899 912	332 020 395	339 967 745
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	1 168 865 638	1 437 313 188	1 753 840 466	1 373 709 738
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 528 086 450	3 069 016 102	2 919 371 008	3 459 730 702
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	1 110 351 896	1 507 072 635	1 134 478 292	1 255 344 937
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	15 201 655	16 892 271	240 250 663	235 961 610
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 347 501 699	1 491 561 136	1 496 594 268	1 866 548 185
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	55 031 200	53 490 060	48 047 785	101 875 970
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	66 672 450	2 748 395 878	2 857 020 921	2 836 281 806
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	1 564 783 382	1 359 475 042	1 753 509 144	813 990 632
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		13 058 158 965	16 902 514 591	19 126 277 688	19 613 567 942

*) Data APBD

TABEL 2.16 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.16 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANTEN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	3 755 614 332	5 413 705 184	6 230 229 814	6 878 071 982
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	2 895 569 551	3 395 883 044	4 118 551 716	4 675 126 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	2 769 882 159	3 257 728 615	3 943 816 592	4 473 832 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	3 780 186	6 418 728	13 669 634	66 970 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	31 532 942	32 293 949	38 331 096	38 600 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	90 374 264	99 441 752	122 734 394	95 724 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	849 490 704	1 015 105 168	1 126 004 172	1 151 026 982
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	341 626 487	451 137 610	494 140 096	402 493 470
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	2 300 934	3 446 980	4 181 762	3 325 530
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	460 383 683	530 833 378	617 081 101	728 490 012
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	45 179 600	29 687 200	10 601 213	16 717 970
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	10 554 077	1 002 716 972	985 673 926	1 051 919 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	535 848 290	374 844 507	450 814 202	759 418 050
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		4 291 462 622	5 788 549 691	6 681 044 016	7 637 490 032

*) Data APBD

TABEL 2.17 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.17 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BALI BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 662 077 116	3 633 133 585	4 109 377 804	3 958 173 005
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 723 617 736	2 042 091 096	2 529 976 146	2 303 812 231
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 496 933 887	1 813 341 219	2 202 392 551	2 104 381 047
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	33 541 288	50 545 903	32 012 802	35 031 026
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	70 314 131	76 701 656	106 105 514	74 476 425
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	122 828 430	101 502 318	189 465 279	89 923 733
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	705 288 133	908 371 147	980 714 800	1 065 533 024
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	128 698 319	180 266 157	131 057 469	191 634 801
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	0	0	13 456 075	0
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	560 673 539	694 079 080	792 365 876	832 297 473
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	15 916 275	34 025 910	43 835 380	41 600 750
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	233 171 247	682 671 342	598 686 858	588 827 750
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	704 385 153	787 311 641	899 202 574	751 494 035
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		3 366 462 269	4 420 445 226	5 008 580 378	4 709 667 040

*) Data APBD

TABEL 2.18 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.18 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 689 351 249	2 242 817 129	2 379 593 701	2 863 554 742
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	741 291 175	745 979 811	858 454 205	1 143 740 848
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	506 909 926	580 615 755	697 834 322	928 703 596
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	59 564 965	10 129 108	12 917 378	12 590 577
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	135 639 075	53 821 736	52 715 118	93 287 340
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	39 177 209	101 413 212	94 987 387	109 159 335
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	855 310 099	1 054 470 183	1 075 004 986	1 215 275 789
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	131 498 518	169 222 739	148 645 947	165 721 034
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	31 176 098	22 303 389	9 598 323	14 500 985
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	646 671 083	809 617 715	859 353 026	980 390 340
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	45 964 400	53 326 340	57 407 690	54 663 430
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	92 749 975	442 367 135	446 134 510	504 538 105
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	17 280 030	17 713 224	28 134 779	10 650 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 706 631 279	2 260 530 353	2 407 728 480	2 874 204 742

*) Data APBD

TABEL 2.19 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE *ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA TIMUR BY KIND OF RECEIPT*
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	1 324 470 172	2 241 542 051	2 393 070 440	2 720 973 576
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	391 828 733	459 657 187	528 832 134	695 415 928
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	266 729 264	315 287 237	363 720 612	528 047 773
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	10 446 385	9 850 009	8 589 942	29 711 663
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	33 862 764	42 740 305	53 317 241	55 816 821
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	80 790 320	91 779 636	103 204 339	81 839 671
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	887 291 439	1 098 619 869	1 165 848 623	1 290 418 373
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	86 798 049	100 345 548	83 417 371	83 304 726
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 036 546	538 607	616 889	1 190 147
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	752 057 444	940 646 764	1 003 991 703	1 131 687 590
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	47 399 400	57 088 950	77 822 660	74 235 910
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	45 350 000	683 264 995	698 389 683	735 139 275
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	120 234 844	188 710 799	245 944 915	97 957 302
JUMLAH/TOTAL		1 444 705 016	2 430 252 850	2 639 015 355	2 818 930 878

*) Data APBD

TABEL 2.20 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.20 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	2 202 217 037	2 932 912 821	3 262 314 100	3 729 897 332
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 080 456 052	1 164 425 412	1 347 396 425	1 656 664 943
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	901 500 403	986 813 358	1 129 549 657	1 430 145 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	84 659 762	89 055 036	108 076 248	112 945 680
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	40 348 020	47 620 148	55 010 160	66 426 450
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	53 947 867	40 936 870	54 760 360	47 147 813
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 037 860 159	1 249 834 007	1 382 042 462	1 511 410 039
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	126 761 996	154 586 920	131 778 562	127 272 902
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	27 244 775	28 104 240	31 378 670	30 724 801
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	845 483 888	1 023 229 807	1 144 712 840	1 290 222 856
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	38 369 500	43 913 040	74 172 390	63 189 480
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	83 900 826	518 653 402	532 875 213	561 822 350
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	231 734 083	383 302 411	222 258 326	100 000 000
JUMLAH/TOTAL		2 433 951 120	3 316 215 232	3 484 572 426	3 829 897 332

*) Data APBD

TABEL 2.21 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.21 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TENGAH BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 921 944 863	2 514 031 289	2 809 096 139	3 041 907 062
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	815 244 765	945 362 708	1 093 821 486	1 244 421 265
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	707 444 895	836 503 945	973 244 830	1 117 405 470
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	6 493 504	6 963 110	7 371 574	8 353 045
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	19 942 191	22 159 324	25 298 652	27 025 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	81 364 175	79 736 329	87 906 430	91 637 750
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 083 088 116	1 296 011 128	1 442 477 674	1 516 383 568
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	138 131 347	163 501 928	169 674 606	135 025 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	97 225 434	131 068 852	146 986 818	167 000 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	795 816 335	951 256 068	1 062 516 940	1 152 428 738
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	51 915 000	50 184 280	63 299 310	61 929 830
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	23 611 982	272 657 453	272 796 979	281 102 229
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	132 100 592	451 605 920	559 334 316	234 500 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 054 045 455	2 965 637 209	3 368 430 455	3 276 407 062

*) Data APBD

TABEL 2.22 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN SELATAN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	3 148 042 882	4 381 610 479	4 350 810 456	4 701 326 016
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 868 595 794	2 517 518 566	2 502 279 216	2 975 593 720
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 643 513 495	2 199 594 030	2 136 882 989	2 652 000 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	41 134 809	9 275 042	20 534 550	18 205 496
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	53 898	42 309 263	916 252	33 665 500
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	183 893 592	266 340 231	343 945 425	271 722 724
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 195 565 014	1 534 463 778	1 505 123 319	1 374 100 536
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	133 959 403	196 743 601	195 943 995	159 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	519 483 059	646 336 615	584 114 343	488 375 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	504 876 152	652 535 312	683 511 441	701 725 536
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	37 246 400	38 848 250	41 553 540	25 000 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	83 882 074	329 628 135	343 407 921	351 631 760
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	324 878 615	933 954 408	1 203 925 399	655 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		3 472 921 497	5 315 564 887	5 554 735 855	5 356 326 016

*) Data APBD

TABEL 2.23 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.23 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TIMUR BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	9 817 099 927	11 886 470 505	11 631 697 052	12 130 000 000
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	4 501 210 028	5 409 949 386	5 885 262 004	5 519 834 356
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	3 679 366 875	4 486 404 585	4 929 791 599	4 650 182 250
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	13 699 032	22 495 632	33 676 707	11 845 906
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	215 652 587	208 293 801	291 684 072	273 175 200
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	592 491 534	692 755 368	630 109 626	584 631 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	5 295 875 915	6 071 586 086	5 335 759 150	6 186 052 364
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	688 989 457	715 648 111	825 858 411	820 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	4 517 251 513	5 268 684 084	4 446 313 563	5 307 355 949
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	51 446 845	52 637 761	55 539 336	57 312 515
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	38 188 100	34 616 130	8 047 840	1 383 900
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	20 013 984	404 935 033	410 675 898	424 113 280
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	1 652 437 549	2 837 723 895	3 198 903 975	1 800 000 000
JUMLAH/TOTAL		11 469 537 476	14 724 194 400	14 830 601 027	13 930 000 000

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABEL 2.24 **ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI UTARA BY KIND OF RECEIPT**
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 365 705 444	1 834 908 288	2 062 083 090	2 329 335 727
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	535 087 975	633 650 533	789 631 755	944 590 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	477 202 211	554 846 121	667 921 447	820 520 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	8 866 084	14 790 121	25 269 651	38 000 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	23 107 361	24 433 971	33 010 612	40 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	25 912 319	39 580 320	63 430 045	46 070 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	729 361 142	933 366 697	1 029 942 557	1 109 527 682
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	67 711 925	92 316 876	84 261 033	93 300 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	12 650 010	6 975 400	5 651 107	6 700 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	619 711 007	790 534 491	885 684 277	949 852 622
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	29 288 200	43 539 930	54 346 140	59 675 060
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	101 256 327	267 891 058	242 508 778	275 218 045
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	109 273 479	189 114 090	252 914 032	148 282 819
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 474 978 923	2 024 022 378	2 314 997 122	2 477 618 546

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABEL 2.25 **ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGAH BY KIND OF RECEIPT**
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 410 593 609	1 962 393 167	2 132 935 005	2 379 647 474
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	519 974 416	605 821 437	662 226 616	769 714 314
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	421 221 594	494 753 016	555 077 910	684 649 806
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	14 058 850	3 123 783	3 622 024	3 596 870
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	17 796 093	5 474 894	8 170 067	10 762 638
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	66 897 879	102 469 744	95 356 615	70 705 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	864 098 666	1 042 926 565	1 160 797 527	1 237 627 671
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	73 268 339	83 175 645	81 976 567	74 059 324
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	9 489 468	14 426 121	18 212 925	11 740 853
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	743 161 759	902 087 729	994 658 685	1 087 885 014
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	38 179 100	43 237 070	65 949 350	63 942 480
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	26 520 527	313 645 165	309 910 862	372 305 489
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	220 705 398	209 216 673	147 788 886	67 536 399
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 631 299 007	2 171 609 840	2 280 723 891	2 447 183 873

*) Data APBD

TABEL 2.26 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.26 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI SELATAN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	3 110 566 841	4 433 963 020	4 867 592 610	5 593 932 515
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 959 515 902	2 198 776 396	2 560 045 632	3 107 044 871
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 729 075 998	1 949 194 027	2 253 427 933	2 822 473 546
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	111 625 000	113 058 779	60 528 671	74 281 997
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	62 366 615	67 557 465	71 057 299	71 851 328
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	56 448 289	68 966 125	175 031 729	138 438 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 106 989 189	1 349 192 581	1 422 165 817	1 575 061 517
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	230 606 605	299 680 577	256 812 149	279 891 983
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	17 738 615	9 797 950	11 317 890	12 594 313
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	816 757 969	996 939 584	1 089 771 438	1 209 598 741
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	41 886 000	42 774 470	64 264 340	72 976 480
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	44 061 750	885 994 043	885 381 161	911 826 127
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	290 514 746	212 338 656	149 803 013	296 444 645
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		3 401 081 587	4 646 301 676	5 017 395 623	5 890 377 160

*) Data APBD

TABEL 2.27 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.27 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGGARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 288 979 728	1 811 984 328	1 972 559 881	2 055 647 061
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	346 169 831	439 184 125	514 857 030	529 175 895
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	262 509 202	336 932 584	408 107 144	425 267 142
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	18 543 870	19 160 705	24 471 159	24 260 960
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	13 488 191	25 046 620	23 843 795	24 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	51 628 568	58 044 216	58 434 932	55 647 793
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	817 385 234	1 020 125 146	1 160 895 854	1 212 197 396
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	64 314 517	69 714 283	67 214 668	60 039 386
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	18 429 560	45 493 192	59 378 675	39 771 989
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	700 836 557	870 257 871	981 035 741	1 053 636 011
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	33 804 600	34 659 800	53 266 770	58 750 010
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	125 424 663	352 675 057	296 806 997	314 273 770
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	198 733 017	23 590 982	203 679 670	180 608 336
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 487 712 745	1 835 575 310	2 176 239 551	2 236 255 397

*) Data APBD

TABEL 2.28 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.28 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF GORONTALO BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	697 576 031	933 169 935	1 052 625 775	1 203 082 145
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	158 083 317	180 039 376	214 684 375	274 275 308
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	144 751 936	168 068 662	200 883 464	257 943 069
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	0	88 420	571 212	300 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	0	0	4 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	13 331 381	11 882 294	13 229 699	12 032 239
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	515 369 177	637 007 089	722 098 488	801 585 807
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	26 066 409	30 667 268	26 408 286	24 523 089
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	127 466	191 189	392 411	409 220
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	461 118 102	582 140 302	652 284 261	734 279 438
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	28 057 200	24 008 330	43 013 530	42 374 060
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	24 123 537	116 123 470	115 842 912	127 221 030
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	96 844 215	63 968 779	101 032 865	101 576 219
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		794 420 246	997 138 714	1 153 658 640	1 304 658 364

*) Data APBD

TABEL 2.29 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.29 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	718 871 064	959 029 569	1 073 860 195	1 226 172 804
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	114 310 885	140 396 940	154 131 860	215 352 541
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	96 383 467	119 939 739	132 801 331	175 605 898
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	2 041 884	1 422 265	2 326 506	3 029 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	25 406	0	530 814	1 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	15 860 128	19 034 936	18 473 209	35 717 643
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	512 742 098	671 146 618	772 106 138	849 334 743
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	34 885 738	43 462 087	39 214 271	20 947 570
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	416 862	217 890	377 275	1 587 341
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	441 578 798	590 680 361	685 497 592	776 214 122
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	35 860 700	36 786 280	47 017 000	50 585 710
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	91 818 081	147 486 011	147 622 197	161 485 520
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	25 751 453	19 000 000	101 379 671	81 067 249
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		744 622 517	978 029 569	1 175 239 866	1 307 240 053

*) Data APBD

TABEL 2.30 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.30 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 138 187 347	1 436 645 207	1 545 464 676	1 839 702 646
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	221 882 123	267 502 524	304 364 506	439 589 124
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	164 845 694	204 292 148	217 800 853	321 575 058
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	25 426 006	25 576 587	43 994 598	46 425 366
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	17 190 530	19 133 252	19 311 339	57 501 900
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	14 419 893	18 500 537	23 257 716	14 086 800
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	828 272 878	959 240 295	1 026 829 361	1 180 985 112
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	75 254 690	82 945 042	72 694 999	86 039 712
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	4 366 535	8 741 099	3 052 290	5 106 928
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	703 993 953	829 491 474	897 657 192	1 019 704 312
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	44 657 700	38 062 680	53 424 880	70 134 160
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	88 032 346	209 902 388	214 270 809	219 128 410
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	55 485 451	78 105 094	149 438 146	87 015 918
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 193 672 798	1 514 750 301	1 694 902 822	1 926 718 564

*) Data APBD

TABEL 2.31 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.31 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU UTARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	936 792 069	1 196 746 356	1 315 899 116	1 619 653 000
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	84 811 588	115 905 322	165 886 908	204 900 627
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	76 653 533	91 735 153	137 782 856	152 200 079
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	3 921 064	7 201 989	16 604 423	35 744 900
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	65 943	73 140	170 360	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	4 171 048	16 895 040	11 329 269	16 955 648
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	691 007 327	858 295 011	940 667 169	1 119 301 843
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	67 685 366	66 657 071	50 805 123	82 094 136
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	31 698 350	50 620 895	47 582 504	55 961 067
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	540 389 811	703 159 025	772 591 162	906 623 550
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	51 233 800	37 858 020	69 688 380	74 623 090
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	160 973 154	222 546 023	209 345 039	295 450 530
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	15 732 309	199 701 142	125 225 151	30 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		952 524 378	1 396 447 498	1 441 124 267	1 649 653 000

*) Data APBD

TABEL 2.32 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	3 699 884 166	3 873 388 417	5 637 696 634	5 270 315 965
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	152 163 909	175 450 133	236 282 890	203 783 300
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	119 509 796	142 529 273	184 122 827	165 988 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	1 137 679	1 420 766	1 944 900	767 300
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	4 961 194	8 809 755	13 020 674	13 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	26 555 240	22 690 339	37 194 489	24 028 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 483 865 431	1 516 156 701	2 992 755 350	2 393 668 735
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	193 485 191	191 649 305	232 101 384	210 250 935
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	549 396 430	384 475 833	1 630 850 129	999 937 411
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	700 444 910	901 398 453	1 064 872 637	1 122 264 659
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	40 538 900	38 633 110	64 931 200	61 215 730
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	2 063 854 826	2 181 781 583	2 408 658 394	2 672 863 930
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	353 183 633	398 118 932	372 575 438	649 880 134
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		4 053 067 799	4 271 507 349	6 010 272 072	5 920 196 099

*) Data APBD

TABEL 2.33 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 2.33 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	6 227 545 145	7 462 044 974	8 361 139 391	10 489 109 379
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	363 100 750	623 162 648	597 707 375	762 150 888
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	275 091 606	401 691 994	453 677 291	597 341 988
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	18 889 331	15 773 347	24 524 172	50 369 092
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	19 887 905	22 598 926	25 792 803	27 929 962
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	49 231 908	183 098 381	93 713 109	86 509 846
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 893 484 847	2 118 450 110	2 511 020 686	2 604 847 531
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	269 335 254	311 768 070	287 065 667	317 422 781
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	275 748 035	130 708 426	200 789 929	175 716 769
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 276 285 908	1 569 782 444	1 889 267 850	1 991 202 341
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	72 115 650	106 191 170	133 897 240	120 505 640
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	3 970 959 548	4 720 432 216	5 252 411 330	7 122 110 960
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	955 938 778	779 591 449	768 415 821	825 969 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		7 183 483 923	8 241 636 423	9 129 555 212	11 315 078 379

*) Data APBD

TABEL

TABLE 3.

<http://www.tops.go.id>

TABEL
TABLE

3.A

REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2011-2014
ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	7 610 320 146	9 180 143 048	10 671 826 520	11 164 408 627
2.	Sumatera Utara	4 958 481 902	7 201 839 293	7 397 986 772	8 488 643 829
3.	Sumatera Barat	2 071 161 196	2 922 582 140	3 147 840 359	3 497 297 058
4.	R i a u	5 440 440 485	6 847 315 820	6 994 646 205	7 126 649 001
5.	J a m b i	2 078 806 913	2 654 694 237	2 886 305 068	2 981 991 350
6.	Sumatera Selatan	3 963 984 966	5 223 884 081	5 468 139 691	7 136 875 876
7.	Bengkulu	1 166 982 246	1 562 525 395	1 696 369 921	1 805 515 620
8.	Lampung	2 527 990 902	3 742 004 283	3 901 950 614	4 298 707 767
9.	Bangka Belitung	1 193 497 245	1 384 937 385	1 529 111 282	1 755 460 469
10.	Kepulauan Riau	1 876 879 092	2 473 411 609	2 843 717 790	2 970 687 382
11.	DKI Jakarta	28 297 361 175	35 379 180 052	39 517 544 012	64 715 734 943
12.	Jawa Barat	11 053 859 588	16 878 128 995	19 237 611 310	19 907 972 852
13.	Jawa Tengah	7 547 669 804	11 694 479 699	13 343 358 327	13 737 158 183
14.	D I Yogyakarta	1 604 910 831	2 171 734 308	2 583 056 764	3 100 197 643
15.	Jawa Timur	11 493 375 583	15 543 039 549	17 372 768 544	18 799 577 310
16.	Banten	3 755 614 332	5 413 705 184	6 230 229 814	6 878 071 982
17.	B a l i	2 662 077 116	3 633 133 585	4 109 377 804	3 958 173 005
18.	Nusa Tenggara Barat	1 689 351 249	2 242 817 129	2 379 593 701	2 863 554 742
19.	Nusa Tenggara Timur	1 324 470 172	2 241 542 051	2 393 070 440	2 720 973 576
20.	Kalimantan Barat	2 202 217 037	2 932 912 821	3 262 314 100	3 729 897 332
21.	Kalimantan Tengah	1 921 944 863	2 514 031 289	2 809 096 139	3 041 907 062
22.	Kalimantan Selatan	3 148 042 882	4 381 610 479	4 350 810 456	4 701 326 016
23.	Kalimantan Timur	9 817 099 927	11 886 470 505	11 631 697 052	12 130 000 000
24.	Sulawesi Utara	1 365 705 444	1 834 908 288	2 062 083 090	2 329 335 727
25.	Sulawesi Tengah	1 410 593 609	1 962 393 167	2 132 935 005	2 379 647 474
26.	Sulawesi Selatan	3 110 566 841	4 433 963 020	4 867 592 610	5 593 932 515
27.	Sulawesi Tenggara	1 288 979 728	1 811 984 328	1 972 559 881	2 055 647 061
28.	Gorontalo	697 576 031	933 169 935	1 052 625 775	1 203 082 145
29.	Sulawesi Barat	718 871 064	959 029 569	1 073 860 195	1 226 172 804
30.	M a l u k u	1 138 187 347	1 436 645 207	1 545 464 676	1 839 702 646
31.	Maluku Utara	936 792 069	1 196 746 356	1 315 899 116	1 619 653 000
32.	Papua Barat	3 699 884 166	3 873 388 417	5 637 696 634	5 270 315 965
33.	P a p u a	6 227 545 145	7 462 044 974	8 361 139 391	10 489 109 379
JUMLAH/TOTAL		140 001 241 096	186 010 396 198	205 780 279 058	245 517 380 341

*) Data APBD

TABEL
TABLE

3.1

**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah),
2011-2014**
**ACTUAL ORIGINAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2011-2014**

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	802 840 174	901 720 376	1 325 435 091	1 312 371 179
2.	Sumatera Utara	3 578 462 082	4 052 104 891	4 091 285 887	4 944 501 839
3.	Sumatera Barat	1 147 303 770	1 225 466 023	1 366 178 102	1 568 556 942
4.	R i a u	2 210 130 782	2 588 688 445	2 725 623 913	2 840 010 798
5.	J a m b i	984 232 580	995 822 608	1 063 922 065	973 070 077
6.	Sumatera Selatan	1 849 119 912	2 001 739 389	2 021 696 787	2 482 128 778
7.	Bengkulu	440 928 213	483 768 275	525 207 935	532 938 109
8.	Lampung	1 395 675 721	1 687 701 199	1 771 297 935	2 005 245 670
9.	Bangka Belitung	459 208 310	438 373 573	495 796 075	494 204 467
10.	Kepulauan Riau	620 901 422	723 053 960	907 982 039	875 913 016
11.	DKI Jakarta	17 825 986 987	22 040 801 448	26 852 192 453	39 559 414 993
12.	Jawa Barat	8 502 643 155	9 982 917 415	12 360 109 870	13 037 556 434
13.	Jawa Tengah	5 564 233 152	6 629 308 010	8 212 800 641	8 347 874 665
14.	D I Yogyakarta	867 112 885	1 004 063 126	1 216 102 750	1 233 738 562
15.	Jawa Timur	8 898 616 683	9 725 627 569	11 596 376 615	12 503 564 802
16.	Banten	2 895 569 551	3 395 883 044	4 118 551 716	4 675 126 000
17.	B a l i	1 723 617 736	2 042 091 096	2 529 976 146	2 303 812 231
18.	Nusa Tenggara Barat	741 291 175	745 979 811	858 454 205	1 143 740 848
19.	Nusa Tenggara Timur	391 828 733	459 657 187	528 832 134	695 415 928
20.	Kalimantan Barat	1 080 456 052	1 164 425 412	1 347 396 425	1 656 664 943
21.	Kalimantan Tengah	815 244 765	945 362 708	1 093 821 486	1 244 421 265
22.	Kalimantan Selatan	1 868 595 794	2 517 518 566	2 502 279 216	2 975 593 720
23.	Kalimantan Timur	4 501 210 028	5 409 949 386	5 885 262 004	5 519 834 356
24.	Sulawesi Utara	535 087 975	633 650 533	789 631 755	944 590 000
25.	Sulawesi Tengah	519 974 416	605 821 437	662 226 616	769 714 314
26.	Sulawesi Selatan	1 959 515 902	2 198 776 396	2 560 045 632	3 107 044 871
27.	Sulawesi Tenggara	346 169 831	439 184 125	514 857 030	529 175 895
28.	Gorontalo	158 083 317	180 039 376	214 684 375	274 275 308
29.	Sulawesi Barat	114 310 885	140 396 940	154 131 860	215 352 541
30.	M a l u k u	221 882 123	267 502 524	304 364 506	439 589 124
31.	Maluku Utara	84 811 588	115 905 322	165 886 908	204 900 627
32.	Papua Barat	152 163 909	175 450 133	236 282 890	203 783 300
33.	P a p u a	363 100 750	623 162 648	597 707 375	762 150 888
JUMLAH/TOTAL		73 620 310 358	86 541 912 951	101 596 400 437	120 376 276 490

*) Data APBD

TABEL 3.1.1 REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE ACTUAL LOCAL INCOME TAXES OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	586 181 446	687 476 817	752 846 745	909 747 859
2.	Sumatera Utara	3 141 123 907	3 636 074 646	3 685 437 788	4 533 946 180
3.	Sumatera Barat	933 800 000	994 570 032	1 085 164 285	1 262 050 267
4.	R i a u	1 773 621 889	2 058 595 751	2 110 997 530	2 322 000 532
5.	J a m b i	838 851 529	808 258 461	841 884 452	808 437 580
6.	Sumatera Selatan	1 671 518 572	1 803 818 849	1 882 596 916	2 275 320 400
7.	Bengkulu	333 103 966	370 247 703	394 141 932	400 991 260
8.	Lampung	1 199 945 831	1 465 711 124	1 547 336 215	1 789 309 000
9.	Bangka Belitung	418 338 202	396 527 427	447 462 199	446 313 795
10.	Kepulauan Riau	572 738 970	685 601 565	852 188 093	837 918 016
11.	DKI Jakarta	15 221 249 846	17 721 493 016	23 370 213 237	32 500 000 000
12.	Jawa Barat	7 696 484 754	9 149 214 330	11 236 145 855	12 215 081 305
13.	Jawa Tengah	4 599 046 987	5 590 597 156	6 716 170 095	7 097 094 340
14.	D I Yogyakarta	735 226 106	871 630 605	1 063 314 118	1 098 908 544
15.	Jawa Timur	7 298 242 129	7 816 590 831	9 404 934 972	10 685 000 000
16.	Banten	2 769 882 159	3 257 728 615	3 943 816 592	4 473 832 000
17.	B a l i	1 496 933 887	1 813 341 219	2 202 392 551	2 104 381 047
18.	Nusa Tenggara Barat	506 909 926	580 615 755	697 834 322	928 703 596
19.	Nusa Tenggara Timur	266 729 264	315 287 237	363 720 612	528 047 773
20.	Kalimantan Barat	901 500 403	986 813 358	1 129 549 657	1 430 145 000
21.	Kalimantan Tengah	707 444 895	836 503 945	973 244 830	1 117 405 470
22.	Kalimantan Selatan	1 643 513 495	2 199 594 030	2 136 882 989	2 652 000 000
23.	Kalimantan Timur	3 679 366 875	4 486 404 585	4 929 791 599	4 650 182 250
24.	Sulawesi Utara	477 202 211	554 846 121	667 921 447	820 520 000
25.	Sulawesi Tengah	421 221 594	494 753 016	555 077 910	684 649 806
26.	Sulawesi Selatan	1 729 075 998	1 949 194 027	2 253 427 933	2 822 473 546
27.	Sulawesi Tenggara	262 509 202	336 932 584	408 107 144	425 267 142
28.	Gorontalo	144 751 936	168 068 662	200 883 464	257 943 069
29.	Sulawesi Barat	96 383 467	119 939 739	132 801 331	175 605 898
30.	M a l u k u	164 845 694	204 292 148	217 800 853	321 575 058
31.	Maluku Utara	76 653 533	91 735 153	137 782 856	152 200 079
32.	Papua Barat	119 509 796	142 529 273	184 122 827	165 988 000
33.	P a p u a	275 091 606	401 691 994	453 677 291	597 341 988
JUMLAH/TOTAL		62 759 000 075	72 996 679 774	86 979 670 640	103 490 380 800

*) Data APBD

TABEL 3.1.2 REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI RETRIBUSI DAERAH SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM RETRIBUTIONS THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	9 416 022	6 317 974	6 346 062	0
2.	Sumatera Utara	31 297 594	33 494 628	79 173 619	18 364 946
3.	Sumatera Barat	32 331 466	38 054 666	34 595 713	13 036 290
4.	R i a u	8 490 985	12 174 266	24 359 497	25 000 000
5.	J a m b i	10 195 268	12 053 725	15 363 759	16 382 166
6.	Sumatera Selatan	11 682 782	13 376 825	16 522 296	16 671 012
7.	Bengkulu	6 590 792	7 655 853	12 326 203	11 329 064
8.	Lampung	8 689 231	8 209 834	8 672 979	7 896 841
9.	Bangka Belitung	3 565 501	3 689 016	5 327 341	3 897 379
10.	Kepulauan Riau	1 655 565	5 352 202	13 413 198	6 285 000
11.	DKI Jakarta	609 349 051	1 820 435 448	333 787 344	1 746 418 633
12.	Jawa Barat	50 737 863	57 326 324	63 654 936	57 677 820
13.	Jawa Tengah	64 549 242	68 250 252	69 970 596	78 031 283
14.	D I Yogyakarta	35 985 658	34 115 158	38 043 014	36 670 322
15.	Jawa Timur	66 359 751	118 823 638	105 580 782	104 887 319
16.	Banten	3 780 186	6 418 728	13 669 634	66 970 000
17.	B a l i	33 541 288	50 545 903	32 012 802	35 031 026
18.	Nusa Tenggara Barat	59 564 965	10 129 108	12 917 378	12 590 577
19.	Nusa Tenggara Timur	10 446 385	9 850 009	8 589 942	29 711 663
20.	Kalimantan Barat	84 659 762	89 055 036	108 076 248	112 945 680
21.	Kalimantan Tengah	6 493 504	6 963 110	7 371 574	8 353 045
22.	Kalimantan Selatan	41 134 809	9 275 042	20 534 550	18 205 496
23.	Kalimantan Timur	13 699 032	22 495 632	33 676 707	11 845 906
24.	Sulawesi Utara	8 866 084	14 790 121	25 269 651	38 000 000
25.	Sulawesi Tengah	14 058 850	3 123 783	3 622 024	3 596 870
26.	Sulawesi Selatan	111 625 000	113 058 779	60 528 671	74 281 997
27.	Sulawesi Tenggara	18 543 870	19 160 705	24 471 159	24 260 960
28.	Gorontalo	0	88 420	571 212	300 000
29.	Sulawesi Barat	2 041 884	1 422 265	2 326 506	3 029 000
30.	M a l u k u	25 426 006	25 576 587	43 994 598	46 425 366
31.	Maluku Utara	3 921 064	7 201 989	16 604 423	35 744 900
32.	Papua Barat	1 137 679	1 420 766	1 944 900	767 300
33.	P a p u a	18 889 331	15 773 347	24 524 172	50 369 092
JUMLAH/TOTAL		1 408 726 470	2 645 679 139	1 267 843 490	2 714 976 953

*) Data APBD

**REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI HASIL PERUSAHAAN MILIK
DAERAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2011-2014**

TABEL 3.1.3
TABLE

**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM INCOME OF REGIONAL
GOVERNMENT CORPORATE AND MANAGEMENT OF SEPARATED REGIONAL
GOVERNMENT WEALTH THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014**

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	66 007 132	96 317 228	123 628 755	112 748 543
2.	Sumatera Utara	289 249 771	263 801 190	229 337 171	242 514 468
3.	Sumatera Barat	80 602 797	80 348 993	93 871 535	99 508 220
4.	R i a u	131 607 412	139 601 792	146 463 620	166 746 206
5.	J a m b i	21 703 149	29 984 606	26 879 028	40 000 000
6.	Sumatera Selatan	78 956 548	85 892 644	59 352 769	113 471 240
7.	Bengkulu	12 488 395	7 636 009	12 069 161	13 980 842
8.	Lampung	19 398 638	21 270 704	25 144 919	24 352 983
9.	Bangka Belitung	4 016 266	7 193 086	5 390 252	7 500 000
10.	Kepulauan Riau	0	0	2 559 183	0
11.	DKI Jakarta	278 789 768	351 823 211	397 234 722	447 550 000
12.	Jawa Barat	229 147 336	232 647 377	261 601 089	273 408 000
13.	Jawa Tengah	211 976 159	238 231 933	263 267 978	279 440 000
14.	D I Yogyakarta	28 961 383	35 492 533	40 817 517	45 505 543
15.	Jawa Timur	365 149 165	352 899 912	332 020 395	339 967 745
16.	Banten	31 532 942	32 293 949	38 331 096	38 600 000
17.	B a l i	70 314 131	76 701 656	106 105 514	74 476 425
18.	Nusa Tenggara Barat	135 639 075	53 821 736	52 715 118	93 287 340
19.	Nusa Tenggara Timur	33 862 764	42 740 305	53 317 241	55 816 821
20.	Kalimantan Barat	40 348 020	47 620 148	55 010 160	66 426 450
21.	Kalimantan Tengah	19 942 191	22 159 324	25 298 652	27 025 000
22.	Kalimantan Selatan	53 898	42 309 263	916 252	33 665 500
23.	Kalimantan Timur	215 652 587	208 293 801	291 684 072	273 175 200
24.	Sulawesi Utara	23 107 361	24 433 971	33 010 612	40 000 000
25.	Sulawesi Tengah	17 796 093	5 474 894	8 170 067	10 762 638
26.	Sulawesi Selatan	62 366 615	67 557 465	71 057 299	71 851 328
27.	Sulawesi Tenggara	13 488 191	25 046 620	23 843 795	24 000 000
28.	Gorontalo	0	0	0	4 000 000
29.	Sulawesi Barat	25 406	0	530 814	1 000 000
30.	M a l u k u	17 190 530	19 133 252	19 311 339	57 501 900
31.	Maluku Utara	65 943	73 140	170 360	0
32.	Papua Barat	4 961 194	8 809 755	13 020 674	13 000 000
33.	P a p u a	19 887 905	22 598 926	25 792 803	27 929 962
JUMLAH/TOTAL		2 524 288 765	2 642 209 423	2 837 923 962	3 119 212 354

*) Data APBD

TABEL 3.1.4 REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI LAIN-LAIN P.A.D. YANG SAH SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOV. FROM OTHER ORIGINAL PROVINCIAL GOV. REVENUE THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	141 235 574	111 608 357	442 613 529	289 874 777
2.	Sumatera Utara	116 790 810	118 734 427	97 337 309	149 676 245
3.	Sumatera Barat	100 569 507	112 492 332	152 546 569	193 962 165
4.	R i a u	296 410 496	378 316 636	443 803 266	326 264 060
5.	J a m b i	113 482 634	145 525 816	179 794 826	108 250 331
6.	Sumatera Selatan	86 962 010	98 651 071	63 224 806	76 666 126
7.	Bengkulu	88 745 060	98 228 710	106 670 639	106 636 943
8.	Lampung	167 642 021	192 509 537	190 143 822	183 686 846
9.	Bangka Belitung	33 288 341	30 964 044	37 616 283	36 493 293
10.	Kepulauan Riau	46 506 887	32 100 193	39 821 565	31 710 000
11.	DKI Jakarta	1 716 598 322	2 147 049 773	2 750 957 150	4 865 446 360
12.	Jawa Barat	526 273 202	543 729 384	798 707 990	491 389 309
13.	Jawa Tengah	688 660 764	732 228 669	1 163 391 972	893 309 042
14.	D I Yogyakarta	66 939 738	62 824 830	73 928 101	52 654 153
15.	Jawa Timur	1 168 865 638	1 437 313 188	1 753 840 466	1 373 709 738
16.	Banten	90 374 264	99 441 752	122 734 394	95 724 000
17.	B a l i	122 828 430	101 502 318	189 465 279	89 923 733
18.	Nusa Tenggara Barat	39 177 209	101 413 212	94 987 387	109 159 335
19.	Nusa Tenggara Timur	80 790 320	91 779 636	103 204 339	81 839 671
20.	Kalimantan Barat	53 947 867	40 936 870	54 760 360	47 147 813
21.	Kalimantan Tengah	81 364 175	79 736 329	87 906 430	91 637 750
22.	Kalimantan Selatan	183 893 592	266 340 231	343 945 425	271 722 724
23.	Kalimantan Timur	592 491 534	692 755 368	630 109 626	584 631 000
24.	Sulawesi Utara	25 912 319	39 580 320	63 430 045	46 070 000
25.	Sulawesi Tengah	66 897 879	102 469 744	95 356 615	70 705 000
26.	Sulawesi Selatan	56 448 289	68 966 125	175 031 729	138 438 000
27.	Sulawesi Tenggara	51 628 568	58 044 216	58 434 932	55 647 793
28.	Gorontalo	13 331 381	11 882 294	13 229 699	12 032 239
29.	Sulawesi Barat	15 860 128	19 034 936	18 473 209	35 717 643
30.	M a l u k u	14 419 893	18 500 537	23 257 716	14 086 800
31.	Maluku Utara	4 171 048	16 895 040	11 329 269	16 955 648
32.	Papua Barat	26 555 240	22 690 339	37 194 489	24 028 000
33.	P a p u a	49 231 908	183 098 381	93 713 109	86 509 846
JUMLAH/TOTAL		6 928 295 048	8 257 344 615	10 510 962 345	11 051 706 383

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.2

**REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI DANA PERIMBANGAN SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2011-2014**
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM BALANCED BUDGET
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014**

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	2 262 044 905	1 334 800 286	2 675 448 212	2 462 715 671
2.	Sumatera Utara	1 373 897 545	1 605 181 560	1 710 602 556	1 906 486 133
3.	Sumatera Barat	897 640 879	1 143 895 852	1 240 879 867	1 359 925 006
4.	R i a u	3 226 836 381	3 618 842 731	3 610 182 230	3 638 491 673
5.	J a m b i	1 075 207 719	1 332 579 087	1 489 852 560	1 631 447 786
6.	Sumatera Selatan	1 992 557 000	2 378 798 651	2 649 216 454	3 841 411 648
7.	Bengkulu	712 256 295	882 996 673	977 347 954	1 074 576 601
8.	Lampung	1 063 287 255	1 280 851 522	1 384 043 537	1 471 956 084
9.	Bangka Belitung	700 510 364	821 499 996	907 835 915	1 126 642 872
10.	Kepulauan Riau	1 246 904 170	1 594 446 909	1 753 710 493	1 871 268 804
11.	DKI Jakarta	9 149 708 963	11 554 964 808	9 387 539 402	17 770 000 000
12.	Jawa Barat	2 526 078 027	2 832 746 609	2 950 532 546	2 820 258 175
13.	Jawa Tengah	1 950 189 365	2 318 806 100	2 467 814 629	2 606 901 162
14.	D I Yogyakarta	722 339 653	894 544 325	957 561 851	1 038 621 026
15.	Jawa Timur	2 528 086 450	3 069 016 102	2 919 371 008	3 459 730 702
16.	Banten	849 490 704	1 015 105 168	1 126 004 172	1 151 026 982
17.	B a l i	705 288 133	908 371 147	980 714 800	1 065 533 024
18.	Nusa Tenggara Barat	855 310 099	1 054 470 183	1 075 004 986	1 215 275 789
19.	Nusa Tenggara Timur	887 291 439	1 098 619 869	1 165 848 623	1 290 418 373
20.	Kalimantan Barat	1 037 860 159	1 249 834 007	1 382 042 462	1 511 410 039
21.	Kalimantan Tengah	1 083 088 116	1 296 011 128	1 442 477 674	1 516 383 568
22.	Kalimantan Selatan	1 195 565 014	1 534 463 778	1 505 123 319	1 374 100 536
23.	Kalimantan Timur	5 295 875 915	6 071 586 086	5 335 759 150	6 186 052 364
24.	Sulawesi Utara	729 361 142	933 366 697	1 029 942 557	1 109 527 682
25.	Sulawesi Tengah	864 098 666	1 042 926 565	1 160 797 527	1 237 627 671
26.	Sulawesi Selatan	1 106 989 189	1 349 192 581	1 422 165 817	1 575 061 517
27.	Sulawesi Tenggara	817 385 234	1 020 125 146	1 160 895 854	1 212 197 396
28.	Gorontalo	515 369 177	637 007 089	722 098 488	801 585 807
29.	Sulawesi Barat	512 742 098	671 146 618	772 106 138	849 334 743
30.	M a l u k u	828 272 878	959 240 295	1 026 829 361	1 180 985 112
31.	Maluku Utara	691 007 327	858 295 011	940 667 169	1 119 301 843
32.	Papua Barat	1 483 865 431	1 516 156 701	2 992 755 350	2 393 668 735
33.	P a p u a	1 893 484 847	2 118 450 110	2 511 020 686	2 604 847 531
JUMLAH/TOTAL		52 779 890 539	61 998 339 390	64 834 193 347	77 474 772 055

*) Data APBD

TABEL 3.2.1 REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
TABLE 3.2.1 **INDONESIA (ribu rupiah), 2011-2014**
ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM TAX SHARES THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	224 636 959	251 127 885	254 514 663	250 706 191
2.	Sumatera Utara	379 382 434	451 848 733	424 244 826	467 151 977
3.	Sumatera Barat	90 617 394	183 066 225	131 404 781	167 070 500
4.	R i a u	465 189 186	502 497 680	618 581 036	525 984 814
5.	J a m b i	165 268 384	217 355 132	246 548 942	239 090 645
6.	Sumatera Selatan	379 632 596	490 241 630	572 654 634	683 024 160
7.	Bengkulu	18 519 664	61 848 269	53 933 686	50 540 235
8.	Lampung	126 734 977	164 927 667	145 424 014	147 746 141
9.	Bangka Belitung	55 995 923	63 591 599	60 622 259	93 000 000
10.	Kepulauan Riau	217 469 127	1 110 423 502	198 090 541	161 259 571
11.	DKI Jakarta	8 747 636 170	10 984 787 700	8 863 205 864	17 434 000 000
12.	Jawa Barat	999 708 518	1 199 350 816	1 026 017 163	859 786 759
13.	Jawa Tengah	511 527 047	610 215 375	583 478 946	589 474 308
14.	D I Yogyakarta	75 967 202	112 691 591	89 148 689	101 555 821
15.	Jawa Timur	1 110 351 896	1 507 072 635	1 134 478 292	1 255 344 937
16.	Banten	341 626 487	451 137 610	494 140 096	402 493 470
17.	B a l i	128 698 319	180 266 157	131 057 469	191 634 801
18.	Nusa Tenggara Barat	131 498 518	169 222 739	148 645 947	165 721 034
19.	Nusa Tenggara Timur	86 798 049	100 345 548	83 417 371	83 304 726
20.	Kalimantan Barat	126 761 996	154 586 920	131 778 562	127 272 902
21.	Kalimantan Tengah	138 131 347	163 501 928	169 674 606	135 025 000
22.	Kalimantan Selatan	133 959 403	196 743 601	195 943 995	159 000 000
23.	Kalimantan Timur	688 989 457	715 648 111	825 858 411	820 000 000
24.	Sulawesi Utara	67 711 925	92 316 876	84 261 033	93 300 000
25.	Sulawesi Tengah	73 268 339	83 175 645	81 976 567	74 059 324
26.	Sulawesi Selatan	230 606 605	299 680 577	256 812 149	279 891 983
27.	Sulawesi Tenggara	64 314 517	69 714 283	67 214 668	60 039 386
28.	Gorontalo	26 066 409	30 667 268	26 408 286	24 523 089
29.	Sulawesi Barat	34 885 738	43 462 087	39 214 271	20 947 570
30.	M a l u k u	75 254 690	82 945 042	72 694 999	86 039 712
31.	Maluku Utara	67 685 366	66 657 071	50 805 123	82 094 136
32.	Papua Barat	193 485 191	191 649 305	232 101 384	210 250 935
33.	P a p u a	269 335 254	311 768 070	287 065 667	317 422 781
JUMLAH/TOTAL		16 447 715 087	21 314 535 277	17 781 418 940	26 358 756 908

*) Data APBD

TABEL 3.2.2
REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM PEMERINTAH
PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2011-2014
ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM NON TAX SHARES / NATURAL
RESOURCES THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 270 150 474	122 177 984	1 253 339 521	937 442 903
2.	Sumatera Utara	7 162 107	8 315 200	8 088 878	10 564 030
3.	Sumatera Barat	1 609 290	9 768 542	5 610 600	8 860 000
4.	R i a u	2 324 772 671	2 564 673 767	2 226 231 958	2 247 784 765
5.	J a m b i	301 321 322	350 162 175	353 397 070	394 663 919
6.	Sumatera Selatan	933 824 103	1 127 002 330	1 180 856 653	2 110 089 828
7.	Bengkulu	49 738 995	17 216 628	17 179 110	15 014 159
8.	Lampung	124 369 040	145 696 928	117 848 110	139 305 282
9.	Bangka Belitung	145 043 626	98 684 932	85 902 968	183 446 266
10.	Kepulauan Riau	611 786 301	0	862 879 432	970 321 825
11.	DKI Jakarta	192 163 351	294 849 251	225 151 072	250 000 000
12.	Jawa Barat	299 051 801	315 078 753	371 990 322	194 570 000
13.	Jawa Tengah	110 692 295	141 067 324	130 953 804	134 330 425
14.	D I Yogyakarta	6 070 523	5 743 298	5 582 494	10 045
15.	Jawa Timur	15 201 655	16 892 271	240 250 663	235 961 610
16.	Banten	2 300 934	3 446 980	4 181 762	3 325 530
17.	B a l i	0	0	13 456 075	0
18.	Nusa Tenggara Barat	31 176 098	22 303 389	9 598 323	14 500 985
19.	Nusa Tenggara Timur	1 036 546	538 607	616 889	1 190 147
20.	Kalimantan Barat	27 244 775	28 104 240	31 378 670	30 724 801
21.	Kalimantan Tengah	97 225 434	131 068 852	146 986 818	167 000 000
22.	Kalimantan Selatan	519 483 059	646 336 615	584 114 343	488 375 000
23.	Kalimantan Timur	4 517 251 513	5 268 684 084	4 446 313 563	5 307 355 949
24.	Sulawesi Utara	12 650 010	6 975 400	5 651 107	6 700 000
25.	Sulawesi Tengah	9 489 468	14 426 121	18 212 925	11 740 853
26.	Sulawesi Selatan	17 738 615	9 797 950	11 317 890	12 594 313
27.	Sulawesi Tenggara	18 429 560	45 493 192	59 378 675	39 771 989
28.	Gorontalo	127 466	191 189	392 411	409 220
29.	Sulawesi Barat	416 862	217 890	377 275	1 587 341
30.	M a l u k u	4 366 535	8 741 099	3 052 290	5 106 928
31.	Maluku Utara	31 698 350	50 620 895	47 582 504	55 961 067
32.	Papua Barat	549 396 430	384 475 833	1 630 850 129	999 937 411
33.	P a p u a	275 748 035	130 708 426	200 789 929	175 716 769
JUMLAH/TOTAL		12 508 737 244	11 969 460 145	14 299 514 233	15 154 363 360

*) Data APBD

TABEL 3.2.3 REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM GENERAL ALLOCATION FUNDS THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	716 646 172	911 080 707	1 092 445 518	1 201 612 787
2.	Sumatera Utara	948 867 504	1 103 389 237	1 223 445 404	1 349 132 276
3.	Sumatera Barat	764 680 895	918 560 365	1 039 922 511	1 129 886 306
4.	R i a u	380 051 124	489 179 914	726 630 916	820 984 584
5.	J a m b i	583 882 413	731 952 242	836 578 062	948 337 712
6.	Sumatera Selatan	646 813 301	716 153 261	870 516 767	985 542 760
7.	Bengkulu	607 388 036	775 311 166	854 647 828	955 095 187
8.	Lampung	769 973 038	939 139 287	1 060 663 183	1 136 053 041
9.	Bangka Belitung	481 589 915	634 087 815	717 140 118	806 820 146
10.	Kepulauan Riau	395 745 542	460 857 807	656 067 610	698 009 318
11.	DKI Jakarta	209 909 442	275 327 857	299 182 466	86 000 000
12.	Jawa Barat	1 181 553 108	1 269 960 760	1 472 453 011	1 687 686 386
13.	Jawa Tengah	1 276 180 223	1 516 892 951	1 670 859 369	1 803 931 189
14.	D I Yogyakarta	620 812 328	757 056 696	828 334 768	899 923 550
15.	Jawa Timur	1 347 501 699	1 491 561 136	1 496 594 268	1 866 548 185
16.	Banten	460 383 683	530 833 378	617 081 101	728 490 012
17.	B a l i	560 673 539	694 079 080	792 365 876	832 297 473
18.	Nusa Tenggara Barat	646 671 083	809 617 715	859 353 026	980 390 340
19.	Nusa Tenggara Timur	752 057 444	940 646 764	1 003 991 703	1 131 687 590
20.	Kalimantan Barat	845 483 888	1 023 229 807	1 144 712 840	1 290 222 856
21.	Kalimantan Tengah	795 816 335	951 256 068	1 062 516 940	1 152 428 738
22.	Kalimantan Selatan	504 876 152	652 535 312	683 511 441	701 725 536
23.	Kalimantan Timur	51 446 845	52 637 761	55 539 336	57 312 515
24.	Sulawesi Utara	619 711 007	790 534 491	885 684 277	949 852 622
25.	Sulawesi Tengah	743 161 759	902 087 729	994 658 685	1 087 885 014
26.	Sulawesi Selatan	816 757 969	996 939 584	1 089 771 438	1 209 598 741
27.	Sulawesi Tenggara	700 836 557	870 257 871	981 035 741	1 053 636 011
28.	Gorontalo	461 118 102	582 140 302	652 284 261	734 279 438
29.	Sulawesi Barat	441 578 798	590 680 361	685 497 592	776 214 122
30.	M a l u k u	703 993 953	829 491 474	897 657 192	1 019 704 312
31.	Maluku Utara	540 389 811	703 159 025	772 591 162	906 623 550
32.	Papua Barat	700 444 910	901 398 453	1 064 872 637	1 122 264 659
33.	P a p u a	1 276 285 908	1 569 782 444	1 889 267 850	1 991 202 341
JUMLAH/TOTAL		22 553 282 483	27 381 818 820	30 977 874 897	34 101 379 297

*) Data APBD

TABEL 3.2.4 REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM SPECIAL ALLOCATION FUNDS THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	50 611 300	50 413 710	75 148 510	72 953 790
2.	Sumatera Utara	38 485 500	41 628 390	54 823 448	79 637 850
3.	Sumatera Barat	40 733 300	32 500 720	63 941 975	54 108 200
4.	R i a u	56 823 400	62 491 370	38 738 320	43 737 510
5.	J a m b i	24 735 600	33 109 538	53 328 486	49 355 510
6.	Sumatera Selatan	32 287 000	45 401 430	25 188 400	62 754 900
7.	Bengkulu	36 609 600	28 620 610	51 587 330	53 927 020
8.	Lampung	42 210 200	31 087 640	60 108 230	48 851 620
9.	Bangka Belitung	17 880 900	25 135 650	44 170 570	43 376 460
10.	Kepulauan Riau	21 903 200	23 165 600	36 672 910	41 678 090
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	45 764 600	48 356 280	80 072 050	78 215 030
13.	Jawa Tengah	51 789 800	50 630 450	82 522 510	79 165 240
14.	D I Yogyakarta	19 489 600	19 052 740	34 495 900	37 131 610
15.	Jawa Timur	55 031 200	53 490 060	48 047 785	101 875 970
16.	Banten	45 179 600	29 687 200	10 601 213	16 717 970
17.	B a l i	15 916 275	34 025 910	43 835 380	41 600 750
18.	Nusa Tenggara Barat	45 964 400	53 326 340	57 407 690	54 663 430
19.	Nusa Tenggara Timur	47 399 400	57 088 950	77 822 660	74 235 910
20.	Kalimantan Barat	38 369 500	43 913 040	74 172 390	63 189 480
21.	Kalimantan Tengah	51 915 000	50 184 280	63 299 310	61 929 830
22.	Kalimantan Selatan	37 246 400	38 848 250	41 553 540	25 000 000
23.	Kalimantan Timur	38 188 100	34 616 130	8 047 840	1 383 900
24.	Sulawesi Utara	29 288 200	43 539 930	54 346 140	59 675 060
25.	Sulawesi Tengah	38 179 100	43 237 070	65 949 350	63 942 480
26.	Sulawesi Selatan	41 886 000	42 774 470	64 264 340	72 976 480
27.	Sulawesi Tenggara	33 804 600	34 659 800	53 266 770	58 750 010
28.	Gorontalo	28 057 200	24 008 330	43 013 530	42 374 060
29.	Sulawesi Barat	35 860 700	36 786 280	47 017 000	50 585 710
30.	M a l u k u	44 657 700	38 062 680	53 424 880	70 134 160
31.	Maluku Utara	51 233 800	37 858 020	69 688 380	74 623 090
32.	Papua Barat	40 538 900	38 633 110	64 931 200	61 215 730
33.	P a p u a	72 115 650	106 191 170	133 897 240	120 505 640
JUMLAH/TOTAL		1 270 155 725	1 332 525 148	1 775 385 277	1 860 272 490

*) Data APBD

TABEL
TABLE

3.3

REALISASI PENDAPATAN LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2011-2014
ACTUAL OTHER LEGAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	4 545 435 067	6 943 622 386	6 670 943 217	7 389 321 777
2.	Sumatera Utara	6 122 275	1 544 552 842	1 596 098 329	1 637 655 857
3.	Sumatera Barat	26 216 547	553 220 265	540 782 390	568 815 110
4.	R i a u	3 473 322	639 784 644	658 840 062	648 146 530
5.	J a m b i	19 366 614	326 292 542	332 530 443	377 473 487
6.	Sumatera Selatan	122 308 054	843 346 041	797 226 450	813 335 450
7.	Bengkulu	13 797 738	195 760 447	193 814 032	198 000 910
8.	Lampung	69 027 926	773 451 562	746 609 142	821 506 013
9.	Bangka Belitung	33 778 571	125 063 816	125 479 292	134 613 130
10.	Kepulauan Riau	9 073 500	155 910 740	182 025 258	223 505 562
11.	DKI Jakarta	1 321 665 225	1 783 413 796	3 277 812 157	7 386 319 950
12.	Jawa Barat	25 138 406	4 062 464 971	3 926 968 894	4 050 158 243
13.	Jawa Tengah	33 247 287	2 746 365 589	2 662 743 057	2 782 382 356
14.	D I Yogyakarta	15 458 293	273 126 857	409 392 163	827 838 055
15.	Jawa Timur	66 672 450	2 748 395 878	2 857 020 921	2 836 281 806
16.	Banten	10 554 077	1 002 716 972	985 673 926	1 051 919 000
17.	B a l i	233 171 247	682 671 342	598 686 858	588 827 750
18.	Nusa Tenggara Barat	92 749 975	442 367 135	446 134 510	504 538 105
19.	Nusa Tenggara Timur	45 350 000	683 264 995	698 389 683	735 139 275
20.	Kalimantan Barat	83 900 826	518 653 402	532 875 213	561 822 350
21.	Kalimantan Tengah	23 611 982	272 657 453	272 796 979	281 102 229
22.	Kalimantan Selatan	83 882 074	329 628 135	343 407 921	351 631 760
23.	Kalimantan Timur	20 013 984	404 935 033	410 675 898	424 113 280
24.	Sulawesi Utara	101 256 327	267 891 058	242 508 778	275 218 045
25.	Sulawesi Tengah	26 520 527	313 645 165	309 910 862	372 305 489
26.	Sulawesi Selatan	44 061 750	885 994 043	885 381 161	911 826 127
27.	Sulawesi Tenggara	125 424 663	352 675 057	296 806 997	314 273 770
28.	Gorontalo	24 123 537	116 123 470	115 842 912	127 221 030
29.	Sulawesi Barat	91 818 081	147 486 011	147 622 197	161 485 520
30.	M a l u k u	88 032 346	209 902 388	214 270 809	219 128 410
31.	Maluku Utara	160 973 154	222 546 023	209 345 039	295 450 530
32.	Papua Barat	2 063 854 826	2 181 781 583	2 408 658 394	2 672 863 930
33.	P a p u a	3 970 959 548	4 720 432 216	5 252 411 330	7 122 110 960
JUMLAH/TOTAL		13 601 040 199	37 470 143 857	39 349 685 274	47 666 331 796

*) Data APBD

TABEL 3.B REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE ACTUAL FINANCING RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 306 726 214	1 508 840 609	1 968 699 122	2 203 619 848
2.	Sumatera Utara	404 884 723	720 866 154	14 107 542	37 657 126
3.	Sumatera Barat	335 221 212	361 250 283	276 750 267	225 000 000
4.	R i a u	421 520 453	1 906 680 479	1 978 312 715	1 150 102 342
5.	J a m b i	353 260 385	632 401 128	690 767 077	283 338 396
6.	Sumatera Selatan	390 314 822	477 175 785	521 334 563	280 690 624
7.	Bengkulu	39 678 718	197 339 471	241 356 037	103 660 555
8.	Lampung	161 181 629	117 688 684	23 710 615	25 997 615
9.	Bangka Belitung	240 432 353	242 123 559	285 022 225	260 398 812
10.	Kepulauan Riau	375 005 362	290 737 799	514 289 374	524 312 618
11.	DKI Jakarta	4 926 078 266	6 475 552 012	9 463 721 531	7 284 400 000
12.	Jawa Barat	2 449 742 872	3 003 186 559	2 934 630 844	1 588 816 675
13.	Jawa Tengah	1 239 075 792	707 735 960	1 306 017 472	300 000 000
14.	D I Yogyakarta	254 231 964	293 608 593	403 200 659	280 821 707
15.	Jawa Timur	1 564 783 382	1 359 475 042	1 753 509 144	813 990 632
16.	Banten	535 848 290	374 844 507	450 814 202	759 418 050
17.	B a l i	704 385 153	787 311 641	899 202 574	751 494 035
18.	Nusa Tenggara Barat	17 280 030	17 713 224	28 134 779	10 650 000
19.	Nusa Tenggara Timur	120 234 844	188 710 799	245 944 915	97 957 302
20.	Kalimantan Barat	231 734 083	383 302 411	222 258 326	100 000 000
21.	Kalimantan Tengah	132 100 592	451 605 920	559 334 316	234 500 000
22.	Kalimantan Selatan	324 878 615	933 954 408	1 203 925 399	655 000 000
23.	Kalimantan Timur	1 652 437 549	2 837 723 895	3 198 903 975	1 800 000 000
24.	Sulawesi Utara	109 273 479	189 114 090	252 914 032	148 282 819
25.	Sulawesi Tengah	220 705 398	209 216 673	147 788 886	67 536 399
26.	Sulawesi Selatan	290 514 746	212 338 656	149 803 013	296 444 645
27.	Sulawesi Tenggara	198 733 017	23 590 982	203 679 670	180 608 336
28.	Gorontalo	96 844 215	63 968 779	101 032 865	101 576 219
29.	Sulawesi Barat	25 751 453	19 000 000	101 379 671	81 067 249
30.	M a l u k u	55 485 451	78 105 094	149 438 146	87 015 918
31.	Maluku Utara	15 732 309	199 701 142	125 225 151	30 000 000
32.	Papua Barat	353 183 633	398 118 932	372 575 438	649 880 134
33.	P a p u a	955 938 778	779 591 449	768 415 821	825 969 000
JUMLAH/TOTAL		20 503 199 782	26 442 574 719	31 556 200 366	22 240 207 056

*) Data APBD

TABEL

TABLE 4.

<http://www.stops.go.id>

TABEL 4 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA MENURUT
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		66 590 354 071	101 468 624 588	109 747 735 878	128 701 851 991
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	24 825 623 272	27 208 539 791	28 592 924 382	34 182 666 154
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	14 724 999	25 975 172	35 990 508	82 466 380
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	39 552 236	26 641 086	25 717 306	46 329 630
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	7 368 705 579	33 608 704 717	35 964 403 377	34 998 065 805
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	4 007 604 216	1 402 416 897	2 267 140 617	2 616 413 499
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	17 300 751 767	20 956 233 374	22 612 403 925	29 376 172 398
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	12 842 293 763	18 004 216 615	20 047 554 907	26 287 459 817
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	191 098 239	235 896 936	201 600 856	1 112 278 308
B. BELANJA LANGSUNG		65 627 357 161	77 977 219 171	94 000 696 054	128 307 059 087
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	5 637 664 281	6 637 103 062	7 873 832 502	8 418 772 634
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	33 656 718 936	41 370 226 739	49 557 469 337	58 964 331 789
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	26 332 973 944	29 969 889 370	36 569 394 215	60 923 954 664
C. PEMBIAYAAN DAERAH		28 286 729 646	33 007 127 158	33 588 047 492	10 748 676 319
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		160 504 440 878	212 452 970 917	237 336 479 424	267 757 587 397

*) Data APBD

TABEL 4.1 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.1 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF ACEH BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		2 527 577 357	3 408 378 593	3 464 270 270	5 876 206 989
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	811 497 925	774 594 474	819 274 025	990 954 148
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	614 246 212	1 065 211 457	1 219 682 993	777 424 057
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	611 421 678	515 656 041	292 533 440	352 580 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	236 584 907	262 803 876	269 719 474	300 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	204 184 835	693 635 000	801 680 060	3 384 248 784
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	49 641 800	96 477 745	61 380 278	71 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		4 847 047 931	5 348 941 351	7 756 157 285	7 491 821 486
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	252 925 171	303 248 909	487 041 503	517 091 102
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	3 120 139 312	4 230 353 664	5 618 995 231	4 007 558 725
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 473 983 448	815 338 778	1 650 120 551	2 967 171 659
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		1 542 421 072	1 931 663 713	1 420 098 087	0
JUMLAH/TOTAL		8 917 046 360	10 688 983 657	12 640 525 642	13 368 028 475

*) Data APBD

TABEL 4.2 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.2 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA UTARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		2 339 178 887	5 159 086 805	5 004 403 323	5 706 320 027
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	758 989 636	955 151 592	924 490 865	1 134 078 627
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	307 507 090	1 781 350 465	1 825 737 597	1 702 570 852
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	44 335 343	25 858 294	43 718 380	1 065 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	801 034 520	549 531 770	522 121 373	1 685 553 895
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	427 157 798	1 844 619 727	1 687 837 008	1 175 551 653
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	154 500	2 574 957	498 100	7 500 000
B. BELANJA LANGSUNG		2 272 298 276	2 474 547 705	2 256 064 927	2 819 980 928
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	156 928 569	160 000 784	167 575 793	127 342 162
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 052 132 331	1 510 939 323	1 327 766 717	1 279 711 571
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 063 237 376	803 607 598	760 722 417	1 412 927 195
C. PEMBIAYAAN DAERAH		751 889 462	289 070 937	151 626 064	0
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		5 363 366 625	7 922 705 447	7 412 094 314	8 526 300 955

*) Data APBD

TABEL 4.3 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.3 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 150 643 751	1 592 402 826	1 668 156 981	1 830 141 858
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	532 674 804	524 517 313	562 989 640	622 380 704
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	44 217 000	647 568 586	572 705 110	552 263 610
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	95 346 158	13 934 490	28 909 462	0
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	402 995 188	390 898 542	416 913 494	539 172 265
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	68 280 083	15 483 895	85 739 275	97 904 033
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	7 130 518	0	900 000	18 421 246
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 178 121 323	1 369 888 390	1 445 156 684	1 778 746 816
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	90 591 859	117 389 700	117 827 070	111 041 633
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	493 293 534	606 885 148	635 840 015	844 998 333
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	594 235 930	645 613 542	691 489 599	822 706 850
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		77 617 334	321 541 207	311 276 961	113 408 384
JUMLAH/TOTAL		2 406 382 408	3 283 832 423	3 424 590 626	3 722 297 058

*) Data APBD

TABEL 4.4 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.4 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF RIAU BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 726 941 928	3 245 053 341	3 292 872 527	3 745 616 753
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	701 024 526	790 433 933	877 503 081	976 393 702
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	4 999 254	5 000 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	230 628 149	1 459 570 748	1 251 675 819	1 038 882 030
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	197 806 681	20 053 500	20 887 500	17 427 500
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	511 015 529	796 726 772	874 713 339	1 023 499 608
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	86 365 493	178 268 388	263 093 534	674 413 913
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	101 550	0	0	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		2 538 187 733	3 425 711 796	4 232 409 979	4 531 134 590
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	235 117 018	247 361 895	319 820 084	256 575 271
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	960 890 615	1 216 684 489	1 667 282 867	2 544 200 513
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 342 180 100	1 961 665 412	2 245 307 028	1 730 358 806
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		1 596 831 277	2 083 231 162	1 447 676 414	0
JUMLAH/TOTAL		5 861 960 938	8 753 996 299	8 972 958 920	8 276 751 343

*) Data APBD

TABEL 4.5 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.5 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAMBI BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		760 339 472	1 245 496 974	1 271 925 809	1 423 218 996
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	386 627 385	446 994 502	434 868 794	576 858 408
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	135 000	237 500	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	22 187 375	356 592 340	335 646 046	405 577 981
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	56 918 574	65 500 450	33 441 017	36 056 900
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	291 345 988	298 917 433	315 495 683	250 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	0	74 860 636	150 386 797	152 725 707
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	3 125 150	2 394 113	2 087 472	2 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		989 902 384	1 286 101 339	1 738 815 356	1 842 110 750
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	68 132 244	84 157 929	98 333 655	112 356 750
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	403 019 557	523 196 634	702 495 631	854 879 831
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	518 750 583	678 746 776	937 986 070	874 874 169
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		681 825 442	755 497 052	566 330 980	0
JUMLAH/TOTAL		2 432 067 298	3 287 095 365	3 577 072 145	3 265 329 746

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.6

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA SELATAN BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		2 007 450 230	3 194 440 679	3 683 194 508	4 541 033 134
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	594 719 564	618 614 096	731 001 398	748 352 506
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	1 217 160	2 606 928	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	523 331 096	1 515 320 781	2 031 305 992	1 483 903 056
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	54 575 151	507 000	399 597	600 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	373 395 018	500 000 000	115 227 612	600 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	459 523 741	556 429 130	804 677 610	1 380 328 744
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	688 500	962 744	582 299	327 848 828
B. BELANJA LANGSUNG		1 798 629 605	1 866 482 043	1 995 509 103	2 007 020 915
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	107 182 811	28 994 537	58 351 300	29 076 980
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	552 326 637	820 354 604	1 074 254 135	1 148 234 749
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 139 120 157	1 017 132 902	862 903 668	829 709 186
C. PEMBIAYAAN DAERAH		548 219 953	640 137 144	310 770 643	869 512 451
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		4 354 299 788	5 701 059 866	5 989 474 254	7 417 566 500

*) Data APBD

TABEL 4.7 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.7 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BENGKULU BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	494 038 124	786 792 391	795 311 582	867 945 517
	INDIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	364 245 284	407 803 333	425 728 526	471 784 714
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	19 369 140	221 706 458	209 507 795	219 541 850
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	9 608 034	0	0	149 066 995
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	100 815 666	153 837 811	142 626 514	16 644 798
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	0	3 444 789	15 627 639	0
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	0	1 821 108	10 907 160
B.	BELANJA LANGSUNG	515 176 929	731 660 414	931 694 776	1 028 685 974
	DIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	56 696 707	72 673 925	90 923 857	98 717 235
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	237 590 663	368 721 830	563 392 939	635 715 765
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	220 889 559	290 264 659	277 377 980	294 252 974
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	197 445 911	241 412 061	210 719 600	12 544 684
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 206 660 964	1 759 864 866	1 937 725 958	1 909 176 175

*) Data APBD

TABEL 4.8 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.8 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF LAMPUNG BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 143 029 305	1 942 405 359	1 811 879 220	2 101 431 890
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	441 136 156	488 121 065	497 662 948	599 415 921
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	35 896 755	741 234 652	761 045 629	951 865 931
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	110 677 874	7 840 000	5 448 514	1 115 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	406 965 252	472 103 539	357 471 263	522 787 638
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	113 366 500	211 493 780	170 214 409	20 228 400
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	34 986 768	21 612 323	20 036 457	6 019 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 423 049 501	1 892 330 184	2 072 655 734	2 216 773 492
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	107 811 859	135 197 636	100 476 762	90 288 827
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	683 987 620	925 181 888	1 168 089 647	1 269 457 999
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	631 250 022	831 950 660	804 089 325	857 026 666
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		123 093 725	24 957 424	41 126 275	6 500 000
JUMLAH/TOTAL		2 689 172 531	3 859 692 967	3 925 661 229	4 324 705 382

*) Data APBD

TABEL 4.9 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.9 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANGKA BELITUNG BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	496 255 478	764 754 923	808 318 501	970 282 490
	INDIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	191 385 033	216 271 988	246 900 473	301 920 581
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	65 764 441	197 922 560	220 160 776	210 447 757
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	21 922 054	669 500	2 611 950	1 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	132 893 987	212 792 436	177 383 056	190 125 679
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	84 289 963	137 098 439	161 262 246	262 171 365
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	0	0	4 617 108
B.	BELANJA LANGSUNG	680 428 338	567 283 797	801 348 925	1 045 576 791
	DIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	36 150 068	49 903 758	79 233 302	73 061 918
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	156 720 935	226 599 151	319 349 046	523 568 067
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	487 557 335	290 780 888	402 766 577	448 946 806
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	257 245 782	295 022 224	204 466 081	0
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 433 929 598	1 627 060 944	1 814 133 507	2 015 859 281

*) Data APBD

TABEL 4.10 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.10 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KEPULAUAN RIAU BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran Kind of Expenditure	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		861 648 228	1 041 488 315	1 195 146 662	1 246 421 282
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	192 313 329	212 470 060	220 943 360	224 017 024
2.	Belanja Bunga Interest Expenditure	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi Subsidies Expenditure	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah Grant Expenditure	82 918 650	278 411 673	365 873 250	517 745 820
5.	Belanja Bantuan Sosial Social Assistance Expenditure	189 914 670	115 916 316	134 215 225	44 490 000
6.	Belanja Bagi Hasil Sharing Fund Expenditure	255 569 138	256 225 110	283 495 455	254 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan Financial Assistance Expenditure	140 932 441	177 255 623	188 604 802	202 128 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga Unpredicted Expenditure	0	1 209 533	2 014 570	4 040 438
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 085 945 217	1 208 337 100	1 520 685 847	2 213 578 718
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	140 004 976	165 484 844	189 822 416	199 416 052
2.	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	686 032 380	780 511 969	937 953 666	1 214 653 395
3.	Belanja Modal Capital Expenditure	259 907 861	262 340 287	392 909 765	799 509 271
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		304 291 009	514 323 993	642 174 655	35 000 000
JUMLAH/TOTAL		2 251 884 454	2 764 149 408	3 358 007 164	3 495 000 000

*) Data APBD

TABEL 4.11 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.11 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		9 627 347 327	11 673 114 294	13 148 602 086	15 876 621 735
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	8 757 472 026	9 688 176 243	10 046 180 477	11 919 071 742
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	4 353 525	3 172 975	2 191 752	4 353 828
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	825 595 987	1 933 097 204	1 999 968 587	2 617 224 715
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	38 587 206	15 993 940	1 044 598 130	1 220 977 870
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	0	0	0	0
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	1 338 583	30 186 259	44 286 271	36 350 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	2 487 673	11 376 869	78 643 580
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		16 796 334 862	19 885 592 605	25 152 900 311	49 006 125 408
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 138 088 013	1 397 773 926	1 815 488 704	2 865 725 367
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	8 341 913 514	9 703 452 919	12 641 399 413	17 104 026 839
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	7 316 333 335	8 784 365 760	10 696 012 194	29 036 373 202
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		6 799 757 252	10 296 025 165	10 679 763 146	7 117 387 800
JUMLAH/TOTAL		33 223 439 441	41 854 732 064	48 981 265 543	72 000 134 943

*) Data APBD

TABEL 4.12 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.12 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		7 606 879 466	13 648 410 111	14 724 113 008	17 276 335 039
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 442 284 168	1 511 157 915	1 535 932 802	1 574 914 368
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	8 962 780	15 055	2 940 521	10 000 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	814 847 123	6 136 668 844	5 673 020 648	6 381 478 662
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	491 978 475	16 685 225	13 600 215	15 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	2 720 212 920	3 161 224 937	3 994 277 232	4 921 517 482
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	2 127 594 000	2 815 801 802	3 504 341 590	4 259 949 527
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 000 000	6 856 333	0	113 475 000
B. BELANJA LANGSUNG		2 688 690 379	3 274 067 487	3 672 632 315	3 918 029 729
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	317 690 461	404 836 267	426 605 110	318 076 978
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 652 349 083	1 733 979 983	1 973 247 376	2 210 131 103
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	718 650 835	1 135 251 237	1 272 779 829	1 389 821 648
C. PEMBIAYAAN DAERAH		3 208 032 615	2 958 837 956	3 775 496 831	302 424 759
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		13 503 602 460	19 881 315 554	22 172 242 154	21 496 789 527

*) Data APBD

TABEL 4.13 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.13 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TENGAH BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		5 259 700 529	8 540 012 837	9 213 696 623	9 837 614 877
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 141 188 386	1 241 600 972	1 368 517 191	1 956 121 339
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	104 349 805	3 123 911 500	3 499 864 177	3 038 721 398
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	385 841 980	7 548 325	14 362 375	31 666 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	1 694 471 481	2 253 337 259	1 825 598 247	2 720 713 995
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	1 931 020 531	1 908 190 238	2 503 166 398	2 060 392 145
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 828 346	5 424 543	2 188 235	30 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		2 517 005 298	2 906 831 268	3 511 079 685	4 159 543 306
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	240 493 048	318 033 645	373 147 586	315 497 018
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 812 185 242	1 977 523 313	2 143 191 579	2 402 069 877
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	464 327 008	611 274 310	994 740 520	1 441 976 411
C. PEMBIAYAAN DAERAH		1 010 039 769	955 371 554	1 924 599 491	40 000 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		8 786 745 596	12 402 215 659	14 649 375 799	14 037 158 183

*) Data APBD

TABEL 4.14 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.14 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DI YOGYAKARTA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	665 763 670	1 239 114 375	1 440 462 297	1 547 087 119
	INDIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	387 412 234	455 794 240	491 077 276	525 443 856
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	17 578 562	369 002 245	437 147 781	488 152 851
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	114 820 605	24 153 330	12 509 469	14 631 602
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	0	314 308 555	376 702 291	378 007 606
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	145 929 020	74 683 445	123 025 480	130 851 204
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	23 249	1 172 560	0	10 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG	628 457 725	814 711 584	1 069 181 078	1 782 982 231
	DIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	111 340 357	116 229 478	143 754 843	96 354 896
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	374 323 535	482 062 124	556 030 441	1 287 507 707
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	142 793 833	216 419 982	369 395 794	399 119 628
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	564 921 400	411 516 942	476 614 048	50 950 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 859 142 795	2 465 342 901	2 986 257 423	3 381 019 350

*) Data APBD

TABEL 4.15 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.15 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TIMUR BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	6 589 867 568	9 633 570 876	10 689 813 108	12 405 627 170
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 407 956 634	1 486 342 134	1 620 351 902	1 586 557 147
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	4 422 499	6 036 025	5 108 753	4 174 939
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	1 121 554 739	3 865 450 910	4 903 476 408	4 477 219 660
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	99 096 200	44 990 102	32 672 903	12 149 380
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	2 674 049 069	2 702 288 007	3 081 718 245	4 443 118 748
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	1 237 764 963	1 477 431 620	986 232 679	1 703 157 577
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	45 023 464	51 032 078	60 252 218	179 249 719
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	5 096 053 104	5 677 971 455	6 048 844 119	6 391 307 540
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	895 165 704	1 019 269 017	1 070 076 913	1 047 758 930
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	3 155 525 486	3 601 337 254	3 803 016 160	4 123 498 808
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 045 361 914	1 057 365 184	1 175 751 046	1 220 049 802
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	1 372 238 293	1 590 972 260	2 387 620 461	816 633 232
JUMLAH/TOTAL		13 058 158 965	16 902 514 591	19 126 277 688	19 613 567 942

*) Data APBD

TABEL 4.16 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.16 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANTEN BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		2 081 522 312	3 300 647 526	3 316 069 657	4 022 622 862
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	320 486 551	384 981 221	423 141 044	558 508 214
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	349 780 525	1 288 347 988	1 331 719 638	1 367 549 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	79 829 561	38 852 100	36 185 650	91 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	1 016 068 937	1 177 659 226	1 334 273 510	1 766 695 512
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	315 290 000	410 060 815	190 749 815	233 870 136
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	66 738	746 176	0	5 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		1 819 695 803	2 017 087 962	1 979 069 495	3 326 779 170
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	129 669 563	148 070 031	181 862 098	159 273 206
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	972 617 438	951 318 823	983 932 220	1 472 890 242
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	717 408 802	917 699 108	813 275 177	1 694 615 722
C. PEMBIAYAAN DAERAH		390 244 507	470 814 203	1 385 904 864	288 088 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		4 291 462 622	5 788 549 691	6 681 044 016	7 637 490 032

*) Data APBD

TABEL 4.17 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MENURUT JENIS PENGELUARAN
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.17 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BALI BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	1 796 767 358	2 430 673 383	2 607 826 785	3 062 433 701
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	521 535 198	581 866 718	624 347 012	904 232 769
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	3 999 840	3 594 375	3 999 800	10 000 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	226 902 827	798 197 590	689 580 542	690 470 769
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	361 339 672	25 229 500	144 236 452	156 441 220
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	640 351 377	833 781 099	671 432 090	755 723 903
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	33 256 221	180 142 797	472 642 328	523 168 603
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	9 382 223	7 861 304	1 588 561	22 396 437
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	768 034 137	1 132 059 614	1 260 913 651	1 427 233 338
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	31 609 717	39 820 073	41 906 917	47 282 650
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	509 304 627	748 605 554	764 537 190	942 988 206
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	227 119 793	343 633 987	454 469 544	436 962 482
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	801 660 774	857 712 229	1 139 839 942	220 000 001
JUMLAH/TOTAL		3 366 462 269	4 420 445 226	5 008 580 378	4 709 667 040

*) Data APBD

TABEL 4.18 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.18 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	886 085 265	1 344 468 440	1 482 172 654	1 699 164 494
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	426 228 699	436 435 436	472 165 454	546 751 639
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	2 994 069	241 576	197 768	250 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	138 283 581	549 159 045	669 157 984	562 619 400
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	99 291 085	82 354 460	55 886 880	57 731 530
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	176 666 844	195 501 621	215 435 740	457 677 925
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	40 632 980	72 567 932	67 117 173	65 134 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 988 007	8 208 370	2 211 655	9 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	764 516 010	844 713 401	897 421 047	1 135 040 248
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	37 987 372	73 718 885	81 597 916	95 633 100
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	276 464 886	366 001 340	365 543 941	540 867 315
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	450 063 752	404 993 176	450 279 190	498 539 833
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	56 030 004	71 348 512	28 134 779	40 000 000
JUMLAH/TOTAL		1 706 631 279	2 260 530 353	2 407 728 480	2 874 204 742

*) Data APBD

TABEL 4.19 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.19 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA TIMUR BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		572 612 934	1 439 363 825	1 590 293 920	1 756 409 172
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	403 101 909	426 109 148	439 173 808	485 428 565
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	6 747 249	798 677 253	960 359 791	923 507 620
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	65 081 292	64 755 830	29 518 270	40 940 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	88 049 947	136 640 474	141 657 476	254 525 387
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	8 792 886	12 888 770	15 209 207	34 507 600
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	839 651	292 350	4 375 368	17 500 000
B. BELANJA LANGSUNG		659 269 779	724 991 767	791 017 156	981 651 706
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	71 725 069	87 761 374	105 220 376	78 695 054
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	392 209 058	392 479 928	460 616 404	490 379 722
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	195 335 652	244 750 465	225 180 376	412 576 930
C. PEMBIAYAAN DAERAH		212 822 303	265 897 258	257 704 279	80 870 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		1 444 705 016	2 430 252 850	2 639 015 355	2 818 930 878

*) Data APBD

TABEL 4.20 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.20 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		930 490 053	1 803 799 149	1 764 246 629	2 088 595 918
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	390 996 533	433 187 735	441 182 327	576 580 333
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	76 363 000	770 670 616	598 994 336	670 195 350
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	14 225 000	665 000	948 000	1 582 883
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	290 528 444	447 341 470	455 946 490	431 811 552
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	158 377 076	147 081 933	267 175 476	403 425 800
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	4 852 395	0	5 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		1 065 833 493	1 240 157 756	1 532 360 118	1 666 301 414
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	76 343 884	97 802 602	143 022 608	150 045 294
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	570 405 689	787 874 946	898 826 047	975 709 452
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	419 083 920	354 480 208	490 511 463	540 546 668
C. PEMBIAYAAN DAERAH		437 627 574	272 258 327	187 965 679	75 000 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		2 433 951 120	3 316 215 232	3 484 572 426	3 829 897 332

*) Data APBD

TABEL 4.21 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.21 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TENGAH BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	712 053 813	1 229 065 954	1 361 950 809	1 520 005 100
	INDIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	294 770 418	321 002 514	346 955 356	413 478 671
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	20 580 943	18 438 992	13 579 963	21 079 630
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	21 500 735	357 148 366	289 034 924	294 508 620
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	82 097 684	116 714 897	59 366 720	68 776 445
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	248 637 425	372 548 061	485 973 440	561 334 380
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	42 852 965	43 083 828	165 887 728	159 162 887
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 613 643	129 296	1 152 678	1 664 467
B.	BELANJA LANGSUNG	812 290 457	1 122 281 366	1 566 774 812	1 698 901 962
	DIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	64 050 675	65 931 229	67 960 906	74 592 568
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	315 899 790	420 535 875	558 211 280	876 107 668
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	432 339 992	635 814 262	940 602 626	748 201 726
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	529 701 185	614 289 889	439 704 834	57 500 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 054 045 455	2 965 637 209	3 368 430 455	3 276 407 062

*) Data APBD

TABEL 4.22 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.22 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN SELATAN BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		1 195 209 614	2 284 975 632	2 056 784 526	2 513 515 098
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	481 313 704	503 465 989	518 257 961	727 171 339
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	62 913 943	387 088 001	411 285 086	396 545 759
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	78 488 029	25 619 950	239 550	10 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	544 807 040	1 347 484 542	1 088 250 666	1 372 388 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	25 948 829	18 573 830	36 878 830	7 400 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 738 069	2 743 320	1 872 433	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		1 270 524 101	1 719 293 695	2 693 290 021	2 752 810 918
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	108 353 995	110 249 234	175 877 019	139 772 830
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	565 324 723	753 427 953	1 177 554 354	1 276 270 906
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	596 845 383	855 616 508	1 339 858 648	1 336 767 182
C. PEMBIAYAAN DAERAH		1 007 187 782	1 311 295 560	804 661 308	90 000 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		3 472 921 497	5 315 564 887	5 554 735 855	5 356 326 016

*) Data APBD

TABEL 4.23 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.23 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TIMUR BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		4 679 991 711	6 126 151 181	7 103 434 642	6 872 727 947
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	697 747 236	765 957 565	779 583 156	1 020 799 376
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	683 777 651	856 807 353	1 567 763 966	1 149 714 680
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	130 812 760	7 073 500	3 940 000	5 500 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	1 863 896 580	2 132 835 257	2 692 808 046	2 428 968 391
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	1 303 592 971	2 354 896 682	2 059 339 474	2 247 745 500
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	164 513	8 580 824	0	20 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		3 463 280 908	5 231 046 557	6 676 810 264	6 932 272 053
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	279 925 762	493 003 243	568 035 669	473 642 448
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 407 152 366	2 221 477 609	2 457 642 779	2 880 628 390
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 776 202 780	2 516 565 705	3 651 131 816	3 578 001 215
C. PEMBIAYAAN DAERAH		3 326 264 857	3 366 996 662	1 050 356 121	125 000 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		11 469 537 476	14 724 194 400	14 830 601 027	13 930 000 000

*) Data APBD

TABEL 4.24 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.24 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI UTARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		626 908 175	860 233 283	921 771 690	1 327 670 218
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	368 886 616	380 581 934	395 525 193	545 711 385
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	39 085 000	279 993 486	262 920 572	317 328 833
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	29 553 813	500 000	5 230 000	20 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	187 539 904	198 156 413	256 177 100	362 250 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	1 043 603	931 330	899 998	72 380 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	799 239	70 120	1 018 827	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		658 956 657	910 885 053	1 103 819 186	1 124 948 328
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	55 670 172	56 662 658	70 928 416	45 345 819
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	369 656 152	503 625 677	645 754 385	569 828 076
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	233 630 333	350 596 718	387 136 385	509 774 433
C. PEMBIAYAAN DAERAH		189 114 091	252 904 042	289 406 246	25 000 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		1 474 978 923	2 024 022 378	2 314 997 122	2 477 618 546

*) Data APBD

TABEL 4.25 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.25 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGAH BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	698 081 241	961 116 052	942 898 008	1 172 861 714
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	329 217 099	339 580 347	350 485 761	388 057 708
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	169 233	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	107 750 566	350 879 809	328 963 444	363 350 200
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	13 158 770	6 705 100	3 116 500	5 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	179 200 037	221 449 610	194 496 854	293 005 337
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	66 280 191	41 098 927	65 745 494	118 448 469
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 474 578	1 233 026	89 955	5 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	728 001 093	1 051 905 688	1 202 329 811	1 267 622 159
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	75 293 666	114 424 678	140 508 898	152 779 848
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	444 210 633	612 618 687	706 301 866	836 656 288
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	208 496 794	324 862 323	355 519 047	278 186 023
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	205 216 673	158 588 100	135 496 072	6 700 000
JUMLAH/TOTAL		1 631 299 007	2 171 609 840	2 280 723 891	2 447 183 873

*) Data APBD

TABEL 4.26 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.26 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI SELATAN BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 820 969 739	3 135 433 892	3 193 410 492	3 619 754 401
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	609 703 853	713 658 235	736 658 019	894 612 727
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	65 198	0	8 715 554	39 500 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	97 116 152	1 205 710 313	1 028 773 966	930 600 850
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	19 510 370	0	0	0
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	630 352 515	676 635 863	843 117 427	1 098 762 495
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	463 265 651	538 874 428	572 441 642	641 278 329
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	956 000	555 053	3 703 884	15 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 356 073 571	1 468 214 388	1 730 806 859	2 219 122 760
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	146 363 314	157 196 580	186 117 682	163 675 705
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	742 024 940	933 865 895	1 054 475 228	1 301 250 273
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	467 685 317	377 151 913	490 213 949	754 196 782
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		224 038 277	42 653 396	93 178 272	51 499 999
JUMLAH/TOTAL		3 401 081 587	4 646 301 676	5 017 395 623	5 890 377 160

*) Data APBD

TABEL 4.27 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.27 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGGARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	699 679 828	1 163 334 848	1 060 331 581	1 189 771 764
	INDIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	346 075 531	421 500 309	431 361 209	509 165 405
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	14 762 534	18 329 792	31 250 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	9 616 003	390 194 203	295 628 063	323 766 770
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	18 176 488	0	0	0
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	73 047 479	104 260 188	214 814 429	198 938 120
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	250 939 327	232 530 147	96 245 018	106 651 469
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 825 000	87 467	3 953 070	20 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG	628 344 872	551 561 176	752 613 024	996 398 633
	DIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	62 281 697	72 313 877	62 484 468	45 349 167
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	224 565 348	275 044 116	259 411 676	333 067 303
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	341 497 827	204 203 183	430 716 880	617 982 163
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	159 688 045	120 679 286	363 294 946	50 085 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 487 712 745	1 835 575 310	2 176 239 551	2 236 255 397

*) Data APBD

TABEL 4.28 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.28 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF GORONTALO BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	323 980 000	465 099 947	506 042 855	597 770 374
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	187 796 432	209 099 424	224 332 890	275 667 240
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	1 995 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	1 662 444	1 506 660	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	66 763 216	182 988 988	171 421 290	177 263 395
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	6 965 536	39 250	556 000	1 500 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	51 024 380	55 182 733	78 238 394	114 779 414
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	8 098 192	16 088 905	31 158 408	21 170 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 669 800	193 987	335 873	5 395 325
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	400 548 423	419 921 214	544 773 920	696 887 990
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	27 894 843	32 854 602	36 434 870	34 462 682
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	225 445 501	248 669 038	323 379 712	389 267 270
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	147 208 079	138 397 574	184 959 338	273 158 038
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	69 891 823	112 117 553	102 841 865	10 000 000
JUMLAH/TOTAL		794 420 246	997 138 714	1 153 658 640	1 304 658 364

*) Data APBD

TABEL 4.29 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE *ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014*

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		207 595 524	328 534 121	438 697 989	464 558 038
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	99 184 433	127 058 283	200 211 221	150 058 557
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	65 619 895	149 806 420	158 222 764	186 199 940
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	4 384 472	56 500	122 400	12 437 061
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	35 104 574	44 733 370	51 538 654	70 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	3 011 500	6 306 177	28 337 950	43 362 480
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	290 650	573 371	265 000	2 500 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		523 772 291	539 598 513	605 373 178	840 682 015
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	60 784 227	75 318 392	34 830 232	64 344 788
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	232 296 315	328 893 109	387 091 610	499 145 337
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	230 691 749	135 387 012	183 451 336	277 191 890
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		13 254 702	109 896 935	131 168 699	2 000 000
JUMLAH/TOTAL		744 622 517	978 029 569	1 175 239 866	1 307 240 053

*) Data APBD

TABEL 4.30 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS
TABLE 4.30 PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		426 861 315	739 129 513	939 228 838	925 435 987
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	288 445 809	321 492 983	360 075 315	424 288 457
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	5 883 777	1 834 405	1 644 657	1 192 613
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	20 292 109	309 662 975	459 681 993	297 355 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	26 361 523	10 556 957	4 992 696	5 896 090
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	59 843 044	81 427 724	91 395 308	139 444 595
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	7 668 832	12 543 203	19 008 296	39 759 232
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	18 366 221	1 611 266	2 430 573	17 500 000
B. BELANJA LANGSUNG		683 060 114	616 858 597	637 219 990	981 196 692
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	75 806 228	75 586 968	64 172 558	44 165 840
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	352 314 914	359 287 327	379 456 442	582 275 467
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	254 938 972	181 984 302	193 590 990	354 755 385
C. PEMBIAYAAN DAERAH		83 751 369	158 762 191	118 453 994	20 085 885
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		1 193 672 798	1 514 750 301	1 694 902 822	1 926 718 564

*) Data APBD

TABEL 4.31 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.31 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU UTARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	235 889 454	450 872 973	591 900 918	609 315 158
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	154 479 487	200 362 804	215 957 878	343 519 078
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	2 347 000	169 693 350	315 975 829	205 475 300
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	39 178 677	30 979 064	26 406 259	17 500 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	37 742 597	43 144 197	33 534 852	39 420 780
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	900 000	739 549	0	900 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 241 693	5 954 009	26 100	2 500 000
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	488 485 594	808 787 045	795 692 214	957 837 841
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	51 878 753	51 649 027	69 715 759	71 837 807
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	248 539 893	338 549 685	336 245 301	453 217 755
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	188 066 948	418 588 333	389 731 154	432 782 279
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	228 149 330	136 787 480	53 531 135	82 500 001
JUMLAH/TOTAL		952 524 378	1 396 447 498	1 441 124 267	1 649 653 000

*) Data APBD

TABEL 4.32 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 4.32 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		2 145 191 201	2 055 364 553	2 577 912 070	3 223 823 560
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	150 883 802	171 578 191	172 542 175	329 896 700
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	430 006 447	377 022 796	467 016 555	437 125 130
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	133 090 172	6 397 320	38 319 893	32 044 750
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	472 872 918	448 054 264	777 049 506	917 961 475
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	958 337 862	1 052 311 982	1 120 101 441	1 486 795 505
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	0	2 882 500	20 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		1 484 768 754	1 843 567 358	1 934 518 145	2 646 386 416
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	104 762 956	110 328 271	128 783 417	151 838 663
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	773 885 467	879 370 336	972 065 646	1 114 910 451
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	606 120 331	853 868 751	833 669 082	1 379 637 302
C. PEMBIAYAAN DAERAH		423 107 844	372 575 438	1 497 841 857	49 986 123
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		4 053 067 799	4 271 507 349	6 010 272 072	5 920 196 099

*) Data APBD

TABEL 4.33 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS
TABLE 4.33 **PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2014**
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3 293 803 214	4 235 837 617	5 080 595 310	6 783 511 609
	INDIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	643 842 872	652 577 095	657 545 845	880 473 204
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	133 847 556	693 635 742	651 084 026	841 468 959
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	283 208 629	110 610 956	178 167 170	202 227 273
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	103 669 062	114 401 215	232 800 665	267 343 418
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	2 126 256 726	2 664 612 609	3 348 440 831	4 541 898 755
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 978 369	0	12 556 773	50 100 000
B.	BELANJA LANGSUNG	2 996 572 499	3 003 829 503	3 090 757 039	4 421 566 770
	DIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	222 943 523	153 855 088	175 893 795	167 654 046
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 351 970 752	1 540 796 548	1 694 118 393	1 978 658 386
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 421 658 224	1 309 177 867	1 220 744 851	2 275 254 338
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	893 108 210	1 001 969 303	958 202 863	110 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		7 183 483 923	8 241 636 423	9 129 555 212	11 315 078 379

*) Data APBD

TABEL

TABLE 5.

<http://www.tops.go.id>

TABEL
TABLE

5.A

**REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2011-2014**
**ACTUAL INDIRECT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014**

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	2 527 577 357	3 408 378 593	3 464 270 270	5 876 206 989
2.	Sumatera Utara	2 339 178 887	5 159 086 805	5 004 403 323	5 706 320 027
3.	Sumatera Barat	1 150 643 751	1 592 402 826	1 668 156 981	1 830 141 858
4.	R i a u	1 726 941 928	3 245 053 341	3 292 872 527	3 745 616 753
5.	J a m b i	760 339 472	1 245 496 974	1 271 925 809	1 423 218 996
6.	Sumatera Selatan	2 007 450 230	3 194 440 679	3 683 194 508	4 541 033 134
7.	Bengkulu	494 038 124	786 792 391	795 311 582	867 945 517
8.	Lampung	1 143 029 305	1 942 405 359	1 811 879 220	2 101 431 890
9.	Bangka Belitung	496 255 478	764 754 923	808 318 501	970 282 490
10.	Kepulauan Riau	861 648 228	1 041 488 315	1 195 146 662	1 246 421 282
11.	DKI Jakarta	9 627 347 327	11 673 114 294	13 148 602 086	15 876 621 735
12.	Jawa Barat	7 606 879 466	13 648 410 111	14 724 113 008	17 276 335 039
13.	Jawa Tengah	5 259 700 529	8 540 012 837	9 213 696 623	9 837 614 877
14.	D I Yogyakarta	665 763 670	1 239 114 375	1 440 462 297	1 547 087 119
15.	Jawa Timur	6 589 867 568	9 633 570 876	10 689 813 108	12 405 627 170
16.	Banten	2 081 522 312	3 300 647 526	3 316 069 657	4 022 622 862
17.	B a l i	1 796 767 358	2 430 673 383	2 607 826 785	3 062 433 701
18.	Nusa Tenggara Barat	886 085 265	1 344 468 440	1 482 172 654	1 699 164 494
19.	Nusa Tenggara Timur	572 612 934	1 439 363 825	1 590 293 920	1 756 409 172
20.	Kalimantan Barat	930 490 053	1 803 799 149	1 764 246 629	2 088 595 918
21.	Kalimantan Tengah	712 053 813	1 229 065 954	1 361 950 809	1 520 005 100
22.	Kalimantan Selatan	1 195 209 614	2 284 975 632	2 056 784 526	2 513 515 098
23.	Kalimantan Timur	4 679 991 711	6 126 151 181	7 103 434 642	6 872 727 947
24.	Sulawesi Utara	626 908 175	860 233 283	921 771 690	1 327 670 218
25.	Sulawesi Tengah	698 081 241	961 116 052	942 898 008	1 172 861 714
26.	Sulawesi Selatan	1 820 969 739	3 135 433 892	3 193 410 492	3 619 754 401
27.	Sulawesi Tenggara	699 679 828	1 163 334 848	1 060 331 581	1 189 771 764
28.	Gorontalo	323 980 000	465 099 947	506 042 855	597 770 374
29.	Sulawesi Barat	207 595 524	328 534 121	438 697 989	464 558 038
30.	M a l u k u	426 861 315	739 129 513	939 228 838	925 435 987
31.	Maluku Utara	235 889 454	450 872 973	591 900 918	609 315 158
32.	Papua Barat	2 145 191 201	2 055 364 553	2 577 912 070	3 223 823 560
33.	P a p u a	3 293 803 214	4 235 837 617	5 080 595 310	6 783 511 609
JUMLAH/TOTAL		66 590 354 071	101 468 624 588	109 747 735 878	128 701 851 991

*) Data APBD

TABEL 5.A.1 REALISASI BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE ACTUAL INDIRECT PERSONNEL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	811 497 925	774 594 474	819 274 025	990 954 148
2.	Sumatera Utara	758 989 636	955 151 592	924 490 865	1 134 078 627
3.	Sumatera Barat	532 674 804	524 517 313	562 989 640	622 380 704
4.	R i a u	701 024 526	790 433 933	877 503 081	976 393 702
5.	J a m b i	386 627 385	446 994 502	434 868 794	576 858 408
6.	Sumatera Selatan	594 719 564	618 614 096	731 001 398	748 352 506
7.	Bengkulu	364 245 284	407 803 333	425 728 526	471 784 714
8.	Lampung	441 136 156	488 121 065	497 662 948	599 415 921
9.	Bangka Belitung	191 385 033	216 271 988	246 900 473	301 920 581
10.	Kepulauan Riau	192 313 329	212 470 060	220 943 360	224 017 024
11.	DKI Jakarta	8 757 472 026	9 688 176 243	10 046 180 477	11 919 071 742
12.	Jawa Barat	1 442 284 168	1 511 157 915	1 535 932 802	1 574 914 368
13.	Jawa Tengah	1 141 188 386	1 241 600 972	1 368 517 191	1 956 121 339
14.	D I Yogyakarta	387 412 234	455 794 240	491 077 276	525 443 856
15.	Jawa Timur	1 407 956 634	1 486 342 134	1 620 351 902	1 586 557 147
16.	Banten	320 486 551	384 981 221	423 141 044	558 508 214
17.	B a l i	521 535 198	581 866 718	624 347 012	904 232 769
18.	Nusa Tenggara Barat	426 228 699	436 435 436	472 165 454	546 751 639
19.	Nusa Tenggara Timur	403 101 909	426 109 148	439 173 808	485 428 565
20.	Kalimantan Barat	390 996 533	433 187 735	441 182 327	576 580 333
21.	Kalimantan Tengah	294 770 418	321 002 514	346 955 356	413 478 671
22.	Kalimantan Selatan	481 313 704	503 465 989	518 257 961	727 171 339
23.	Kalimantan Timur	697 747 236	765 957 565	779 583 156	1 020 799 376
24.	Sulawesi Utara	368 886 616	380 581 934	395 525 193	545 711 385
25.	Sulawesi Tengah	329 217 099	339 580 347	350 485 761	388 057 708
26.	Sulawesi Selatan	609 703 853	713 658 235	736 658 019	894 612 727
27.	Sulawesi Tenggara	346 075 531	421 500 309	431 361 209	509 165 405
28.	Gorontalo	187 796 432	209 099 424	224 332 890	275 667 240
29.	Sulawesi Barat	99 184 433	127 058 283	200 211 221	150 058 557
30.	M a l u k u	288 445 809	321 492 983	360 075 315	424 288 457
31.	Maluku Utara	154 479 487	200 362 804	215 957 878	343 519 078
32.	Papua Barat	150 883 802	171 578 191	172 542 175	329 896 700
33.	P a p u a	643 842 872	652 577 095	657 545 845	880 473 204
JUMLAH/TOTAL		24 825 623 272	27 208 539 791	28 592 924 382	34 182 666 154

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BUNGA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2011-2014
TABEL 5.A.2
TABLE 5.A.2 ACTUAL INTEREST EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	0	0	0	0
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0
3.	Sumatera Barat	0	0	0	0
4.	R i a u	0	0	0	0
5.	J a m b i	0	0	0	0
6.	Sumatera Selatan	0	0	0	0
7.	Bengkulu	0	0	0	0
8.	Lampung	0	0	0	0
9.	Bangka Belitung	0	0	0	0
10.	Kepulauan Riau	0	0	0	0
11.	DKI Jakarta	4 353 525	3 172 975	2 191 752	4 353 828
12.	Jawa Barat	0	0	0	0
13.	Jawa Tengah	0	0	0	0
14.	D I Yogyakarta	0	0	0	0
15.	Jawa Timur	4 422 499	6 036 025	5 108 753	4 174 939
16.	Banten	0	0	0	0
17.	B a l i	0	0	0	0
18.	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0
19.	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0
20.	Kalimantan Barat	0	0	0	0
21.	Kalimantan Tengah	0	0	0	0
22.	Kalimantan Selatan	0	0	0	0
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24.	Sulawesi Utara	0	0	0	0
25.	Sulawesi Tengah	0	169 233	0	0
26.	Sulawesi Selatan	65 198	0	8 715 554	39 500 000
27.	Sulawesi Tenggara	0	14 762 534	18 329 792	31 250 000
28.	Gorontalo	0	0	0	1 995 000
29.	Sulawesi Barat	0	0	0	0
30.	M a l u k u	5 883 777	1 834 405	1 644 657	1 192 613
31.	Maluku Utara	0	0	0	0
32.	Papua Barat	0	0	0	0
33.	P a p u a	0	0	0	0
JUMLAH/TOTAL		14 724 999	25 975 172	35 990 508	82 466 380

*) Data APBD

REALISASI BELANJA SUBSIDY PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2011-2014
TABEL 5.A.3 **ACTUAL SUBSIDIES EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT**
INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	0	0	0	0
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0
3.	Sumatera Barat	0	0	0	0
4.	R i a u	0	0	4 999 254	5 000 000
5.	J a m b i	135 000	237 500	0	0
6.	Sumatera Selatan	1 217 160	2 606 928	0	0
7.	Bengkulu	0	0	0	0
8.	Lampung	0	0	0	0
9.	Bangka Belitung	0	0	0	0
10.	Kepulauan Riau	0	0	0	0
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	8 962 780	15 055	2 940 521	10 000 000
13.	Jawa Tengah	0	0	0	0
14.	D I Yogyakarta	0	0	0	0
15.	Jawa Timur	0	0	0	0
16.	Banten	0	0	0	0
17.	B a l i	3 999 840	3 594 375	3 999 800	10 000 000
18.	Nusa Tenggara Barat	2 994 069	241 576	197 768	250 000
19.	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0
20.	Kalimantan Barat	0	0	0	0
21.	Kalimantan Tengah	20 580 943	18 438 992	13 579 963	21 079 630
22.	Kalimantan Selatan	0	0	0	0
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24.	Sulawesi Utara	0	0	0	0
25.	Sulawesi Tengah	0	0	0	0
26.	Sulawesi Selatan	0	0	0	0
27.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
28.	Gorontalo	1 662 444	1 506 660	0	0
29.	Sulawesi Barat	0	0	0	0
30.	M a l u k u	0	0	0	0
31.	Maluku Utara	0	0	0	0
32.	Papua Barat	0	0	0	0
33.	P a p u a	0	0	0	0
JUMLAH/TOTAL		39 552 236	26 641 086	25 717 306	46 329 630

*) Data APBD

REALISASI BELANJA HIBAH PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2011-2014

TABEL 5.A.4
TABLE ACTUAL GRANT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	614 246 212	1 065 211 457	1 219 682 993	777 424 057
2.	Sumatera Utara	307 507 090	1 781 350 465	1 825 737 597	1 702 570 852
3.	Sumatera Barat	44 217 000	647 568 586	572 705 110	552 263 610
4.	R i a u	230 628 149	1 459 570 748	1 251 675 819	1 038 882 030
5.	J a m b i	22 187 375	356 592 340	335 646 046	405 577 981
6.	Sumatera Selatan	523 331 096	1 515 320 781	2 031 305 992	1 483 903 056
7.	Bengkulu	19 369 140	221 706 458	209 507 795	219 541 850
8.	Lampung	35 896 755	741 234 652	761 045 629	951 865 931
9.	Bangka Belitung	65 764 441	197 922 560	220 160 776	210 447 757
10.	Kepulauan Riau	82 918 650	278 411 673	365 873 250	517 745 820
11.	DKI Jakarta	825 595 987	1 933 097 204	1 999 968 587	2 617 224 715
12.	Jawa Barat	814 847 123	6 136 668 844	5 673 020 648	6 381 478 662
13.	Jawa Tengah	104 349 805	3 123 911 500	3 499 864 177	3 038 721 398
14.	D I Yogyakarta	17 578 562	369 002 245	437 147 781	488 152 851
15.	Jawa Timur	1 121 554 739	3 865 450 910	4 903 476 408	4 477 219 660
16.	Banten	349 780 525	1 288 347 988	1 331 719 638	1 367 549 000
17.	B a l i	226 902 827	798 197 590	689 580 542	690 470 769
18.	Nusa Tenggara Barat	138 283 581	549 159 045	669 157 984	562 619 400
19.	Nusa Tenggara Timur	6 747 249	798 677 253	960 359 791	923 507 620
20.	Kalimantan Barat	76 363 000	770 670 616	598 994 336	670 195 350
21.	Kalimantan Tengah	21 500 735	357 148 366	289 034 924	294 508 620
22.	Kalimantan Selatan	62 913 943	387 088 001	411 285 086	396 545 759
23.	Kalimantan Timur	683 777 651	856 807 353	1 567 763 966	1 149 714 680
24.	Sulawesi Utara	39 085 000	279 993 486	262 920 572	317 328 833
25.	Sulawesi Tengah	107 750 566	350 879 809	328 963 444	363 350 200
26.	Sulawesi Selatan	97 116 152	1 205 710 313	1 028 773 966	930 600 850
27.	Sulawesi Tenggara	9 616 003	390 194 203	295 628 063	323 766 770
28.	Gorontalo	66 763 216	182 988 988	171 421 290	177 263 395
29.	Sulawesi Barat	65 619 895	149 806 420	158 222 764	186 199 940
30.	M a l u k u	20 292 109	309 662 975	459 681 993	297 355 000
31.	Maluku Utara	2 347 000	169 693 350	315 975 829	205 475 300
32.	Papua Barat	430 006 447	377 022 796	467 016 555	437 125 130
33.	P a p u a	133 847 556	693 635 742	651 084 026	841 468 959
JUMLAH/TOTAL		7 368 705 579	33 608 704 717	35 964 403 377	34 998 065 805

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2011-2014
TABEL 5.A.5 ACTUAL SOCIAL ASSISTANCE EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	611 421 678	515 656 041	292 533 440	352 580 000
2.	Sumatera Utara	44 335 343	25 858 294	43 718 380	1 065 000
3.	Sumatera Barat	95 346 158	13 934 490	28 909 462	0
4.	R i a u	197 806 681	20 053 500	20 887 500	17 427 500
5.	J a m b i	56 918 574	65 500 450	33 441 017	36 056 900
6.	Sumatera Selatan	54 575 151	507 000	399 597	600 000
7.	Bengkulu	9 608 034	0	0	149 066 995
8.	Lampung	110 677 874	7 840 000	5 448 514	1 115 000
9.	Bangka Belitung	21 922 054	669 500	2 611 950	1 000 000
10.	Kepulauan Riau	189 914 670	115 916 316	134 215 225	44 490 000
11.	DKI Jakarta	38 587 206	15 993 940	1 044 598 130	1 220 977 870
12.	Jawa Barat	491 978 475	16 685 225	13 600 215	15 000 000
13.	Jawa Tengah	385 841 980	7 548 325	14 362 375	31 666 000
14.	D I Yogyakarta	114 820 605	24 153 330	12 509 469	14 631 602
15.	Jawa Timur	99 096 200	44 990 102	32 672 903	12 149 380
16.	Banten	79 829 561	38 852 100	36 185 650	91 000 000
17.	B a l i	361 339 672	25 229 500	144 236 452	156 441 220
18.	Nusa Tenggara Barat	99 291 085	82 354 460	55 886 880	57 731 530
19.	Nusa Tenggara Timur	65 081 292	64 755 830	29 518 270	40 940 000
20.	Kalimantan Barat	14 225 000	665 000	948 000	1 582 883
21.	Kalimantan Tengah	82 097 684	116 714 897	59 366 720	68 776 445
22.	Kalimantan Selatan	78 488 029	25 619 950	239 550	10 000
23.	Kalimantan Timur	130 812 760	7 073 500	3 940 000	5 500 000
24.	Sulawesi Utara	29 553 813	500 000	5 230 000	20 000 000
25.	Sulawesi Tengah	13 158 770	6 705 100	3 116 500	5 000 000
26.	Sulawesi Selatan	19 510 370	0	0	0
27.	Sulawesi Tenggara	18 176 488	0	0	0
28.	Gorontalo	6 965 536	39 250	556 000	1 500 000
29.	Sulawesi Barat	4 384 472	56 500	122 400	12 437 061
30.	M a l u k u	26 361 523	10 556 957	4 992 696	5 896 090
31.	Maluku Utara	39 178 677	30 979 064	26 406 259	17 500 000
32.	Papua Barat	133 090 172	6 397 320	38 319 893	32 044 750
33.	P a p u a	283 208 629	110 610 956	178 167 170	202 227 273
JUMLAH/TOTAL		4 007 604 216	1 402 416 897	2 267 140 617	2 616 413 499

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BAGI HASIL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2011-2014
TABEL 5.A.6 **ACTUAL SHARING FUND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT**
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	236 584 907	262 803 876	269 719 474	300 000 000
2.	Sumatera Utara	801 034 520	549 531 770	522 121 373	1 685 553 895
3.	Sumatera Barat	402 995 188	390 898 542	416 913 494	539 172 265
4.	R i a u	511 015 529	796 726 772	874 713 339	1 023 499 608
5.	J a m b i	291 345 988	298 917 433	315 495 683	250 000 000
6.	Sumatera Selatan	373 395 018	500 000 000	115 227 612	600 000 000
7.	Bengkulu	100 815 666	153 837 811	142 626 514	16 644 798
8.	Lampung	406 965 252	472 103 539	357 471 263	522 787 638
9.	Bangka Belitung	132 893 987	212 792 436	177 383 056	190 125 679
10.	Kepulauan Riau	255 569 138	256 225 110	283 495 455	254 000 000
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	2 720 212 920	3 161 224 937	3 994 277 232	4 921 517 482
13.	Jawa Tengah	1 694 471 481	2 253 337 259	1 825 598 247	2 720 713 995
14.	D I Yogyakarta	0	314 308 555	376 702 291	378 007 606
15.	Jawa Timur	2 674 049 069	2 702 288 007	3 081 718 245	4 443 118 748
16.	Banten	1 016 068 937	1 177 659 226	1 334 273 510	1 766 695 512
17.	B a l i	640 351 377	833 781 099	671 432 090	755 723 903
18.	Nusa Tenggara Barat	176 666 844	195 501 621	215 435 740	457 677 925
19.	Nusa Tenggara Timur	88 049 947	136 640 474	141 657 476	254 525 387
20.	Kalimantan Barat	290 528 444	447 341 470	455 946 490	431 811 552
21.	Kalimantan Tengah	248 637 425	372 548 061	485 973 440	561 334 380
22.	Kalimantan Selatan	544 807 040	1 347 484 542	1 088 250 666	1 372 388 000
23.	Kalimantan Timur	1 863 896 580	2 132 835 257	2 692 808 046	2 428 968 391
24.	Sulawesi Utara	187 539 904	198 156 413	256 177 100	362 250 000
25.	Sulawesi Tengah	179 200 037	221 449 610	194 496 854	293 005 337
26.	Sulawesi Selatan	630 352 515	676 635 863	843 117 427	1 098 762 495
27.	Sulawesi Tenggara	73 047 479	104 260 188	214 814 429	198 938 120
28.	Gorontalo	51 024 380	55 182 733	78 238 394	114 779 414
29.	Sulawesi Barat	35 104 574	44 733 370	51 538 654	70 000 000
30.	M a l u k u	59 843 044	81 427 724	91 395 308	139 444 595
31.	Maluku Utara	37 742 597	43 144 197	33 534 852	39 420 780
32.	Papua Barat	472 872 918	448 054 264	777 049 506	917 961 475
33.	P a p u a	103 669 062	114 401 215	232 800 665	267 343 418
JUMLAH/TOTAL		17 300 751 767	20 956 233 374	22 612 403 925	29 376 172 398

*) Data APBD

**REALISASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2011-2014**

TABEL 5.A.7 **ACTUAL FINANCIAL ASSISTANCE EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014**

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	204 184 835	693 635 000	801 680 060	3 384 248 784
2.	Sumatera Utara	427 157 798	1 844 619 727	1 687 837 008	1 175 551 653
3.	Sumatera Barat	68 280 083	15 483 895	85 739 275	97 904 033
4.	R i a u	86 365 493	178 268 388	263 093 534	674 413 913
5.	J a m b i	0	74 860 636	150 386 797	152 725 707
6.	Sumatera Selatan	459 523 741	556 429 130	804 677 610	1 380 328 744
7.	Bengkulu	0	3 444 789	15 627 639	0
8.	Lampung	113 366 500	211 493 780	170 214 409	20 228 400
9.	Bangka Belitung	84 289 963	137 098 439	161 262 246	262 171 365
10.	Kepulauan Riau	140 932 441	177 255 623	188 604 802	202 128 000
11.	DKI Jakarta	1 338 583	30 186 259	44 286 271	36 350 000
12.	Jawa Barat	2 127 594 000	2 815 801 802	3 504 341 590	4 259 949 527
13.	Jawa Tengah	1 931 020 531	1 908 190 238	2 503 166 398	2 060 392 145
14.	D I Yogyakarta	145 929 020	74 683 445	123 025 480	130 851 204
15.	Jawa Timur	1 237 764 963	1 477 431 620	986 232 679	1 703 157 577
16.	Banten	315 290 000	410 060 815	190 749 815	233 870 136
17.	B a l i	33 256 221	180 142 797	472 642 328	523 168 603
18.	Nusa Tenggara Barat	40 632 980	72 567 932	67 117 173	65 134 000
19.	Nusa Tenggara Timur	8 792 886	12 888 770	15 209 207	34 507 600
20.	Kalimantan Barat	158 377 076	147 081 933	267 175 476	403 425 800
21.	Kalimantan Tengah	42 852 965	43 083 828	165 887 728	159 162 887
22.	Kalimantan Selatan	25 948 829	18 573 830	36 878 830	7 400 000
23.	Kalimantan Timur	1 303 592 971	2 354 896 682	2 059 339 474	2 247 745 500
24.	Sulawesi Utara	1 043 603	931 330	899 998	72 380 000
25.	Sulawesi Tengah	66 280 191	41 098 927	65 745 494	118 448 469
26.	Sulawesi Selatan	463 265 651	538 874 428	572 441 642	641 278 329
27.	Sulawesi Tenggara	250 939 327	232 530 147	96 245 018	106 651 469
28.	Gorontalo	8 098 192	16 088 905	31 158 408	21 170 000
29.	Sulawesi Barat	3 011 500	6 306 177	28 337 950	43 362 480
30.	M a l u k u	7 668 832	12 543 203	19 008 296	39 759 232
31.	Maluku Utara	900 000	739 549	0	900 000
32.	Papua Barat	958 337 862	1 052 311 982	1 120 101 441	1 486 795 505
33.	P a p u a	2 126 256 726	2 664 612 609	3 348 440 831	4 541 898 755
JUMLAH/TOTAL		12 842 293 763	18 004 216 615	20 047 554 907	26 287 459 817

*) Data APBD

REALISASI BELANJA TAK TERDUGA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2011-2014

TABEL 5.A.8
TABLE 5.A.8 **ACTUAL UNPREDICTED EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT**
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	49 641 800	96 477 745	61 380 278	71 000 000
2.	Sumatera Utara	154 500	2 574 957	498 100	7 500 000
3.	Sumatera Barat	7 130 518	0	900 000	18 421 246
4.	R i a u	101 550	0	0	10 000 000
5.	J a m b i	3 125 150	2 394 113	2 087 472	2 000 000
6.	Sumatera Selatan	688 500	962 744	582 299	327 848 828
7.	Bengkulu	0	0	1 821 108	10 907 160
8.	Lampung	34 986 768	21 612 323	20 036 457	6 019 000
9.	Bangka Belitung	0	0	0	4 617 108
10.	Kepulauan Riau	0	1 209 533	2 014 570	4 040 438
11.	DKI Jakarta	0	2 487 673	11 376 869	78 643 580
12.	Jawa Barat	1 000 000	6 856 333	0	113 475 000
13.	Jawa Tengah	2 828 346	5 424 543	2 188 235	30 000 000
14.	D I Yogyakarta	23 249	1 172 560	0	10 000 000
15.	Jawa Timur	45 023 464	51 032 078	60 252 218	179 249 719
16.	Banten	66 738	746 176	0	5 000 000
17.	B a l i	9 382 223	7 861 304	1 588 561	22 396 437
18.	Nusa Tenggara Barat	1 988 007	8 208 370	2 211 655	9 000 000
19.	Nusa Tenggara Timur	839 651	292 350	4 375 368	17 500 000
20.	Kalimantan Barat	0	4 852 395	0	5 000 000
21.	Kalimantan Tengah	1 613 643	129 296	1 152 678	1 664 467
22.	Kalimantan Selatan	1 738 069	2 743 320	1 872 433	10 000 000
23.	Kalimantan Timur	164 513	8 580 824	0	20 000 000
24.	Sulawesi Utara	799 239	70 120	1 018 827	10 000 000
25.	Sulawesi Tengah	2 474 578	1 233 026	89 955	5 000 000
26.	Sulawesi Selatan	956 000	555 053	3 703 884	15 000 000
27.	Sulawesi Tenggara	1 825 000	87 467	3 953 070	20 000 000
28.	Gorontalo	1 669 800	193 987	335 873	5 395 325
29.	Sulawesi Barat	290 650	573 371	265 000	2 500 000
30.	M a l u k u	18 366 221	1 611 266	2 430 573	17 500 000
31.	Maluku Utara	1 241 693	5 954 009	26 100	2 500 000
32.	Papua Barat	0	0	2 882 500	20 000 000
33.	P a p u a	2 978 369	0	12 556 773	50 100 000
JUMLAH/TOTAL		191 098 239	235 896 936	201 600 856	1 112 278 308

*) Data APBD

TABEL 5.B REALISASI BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE 5.B ACTUAL DIRECT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	4 847 047 931	5 348 941 351	7 756 157 285	7 491 821 486
2.	Sumatera Utara	2 272 298 276	2 474 547 705	2 256 064 927	2 819 980 928
3.	Sumatera Barat	1 178 121 323	1 369 888 390	1 445 156 684	1 778 746 816
4.	R i a u	2 538 187 733	3 425 711 796	4 232 409 979	4 531 134 590
5.	J a m b i	989 902 384	1 286 101 339	1 738 815 356	1 842 110 750
6.	Sumatera Selatan	1 798 629 605	1 866 482 043	1 995 509 103	2 007 020 915
7.	Bengkulu	515 176 929	731 660 414	931 694 776	1 028 685 974
8.	Lampung	1 423 049 501	1 892 330 184	2 072 655 734	2 216 773 492
9.	Bangka Belitung	680 428 338	567 283 797	801 348 925	1 045 576 791
10.	Kepulauan Riau	1 085 945 217	1 208 337 100	1 520 685 847	2 213 578 718
11.	DKI Jakarta	16 796 334 862	19 885 592 605	25 152 900 311	49 006 125 408
12.	Jawa Barat	2 688 690 379	3 274 067 487	3 672 632 315	3 918 029 729
13.	Jawa Tengah	2 517 005 298	2 906 831 268	3 511 079 685	4 159 543 306
14.	D I Yogyakarta	628 457 725	814 711 584	1 069 181 078	1 782 982 231
15.	Jawa Timur	5 096 053 104	5 677 971 455	6 048 844 119	6 391 307 540
16.	Banten	1 819 695 803	2 017 087 962	1 979 069 495	3 326 779 170
17.	B a l i	768 034 137	1 132 059 614	1 260 913 651	1 427 233 338
18.	Nusa Tenggara Barat	764 516 010	844 713 401	897 421 047	1 135 040 248
19.	Nusa Tenggara Timur	659 269 779	724 991 767	791 017 156	981 651 706
20.	Kalimantan Barat	1 065 833 493	1 240 157 756	1 532 360 118	1 666 301 414
21.	Kalimantan Tengah	812 290 457	1 122 281 366	1 566 774 812	1 698 901 962
22.	Kalimantan Selatan	1 270 524 101	1 719 293 695	2 693 290 021	2 752 810 918
23.	Kalimantan Timur	3 463 280 908	5 231 046 557	6 676 810 264	6 932 272 053
24.	Sulawesi Utara	658 956 657	910 885 053	1 103 819 186	1 124 948 328
25.	Sulawesi Tengah	728 001 093	1 051 905 688	1 202 329 811	1 267 622 159
26.	Sulawesi Selatan	1 356 073 571	1 468 214 388	1 730 806 859	2 219 122 760
27.	Sulawesi Tenggara	628 344 872	551 561 176	752 613 024	996 398 633
28.	Gorontalo	400 548 423	419 921 214	544 773 920	696 887 990
29.	Sulawesi Barat	523 772 291	539 598 513	605 373 178	840 682 015
30.	M a l u k u	683 060 114	616 858 597	637 219 990	981 196 692
31.	Maluku Utara	488 485 594	808 787 045	795 692 214	957 837 841
32.	Papua Barat	1 484 768 754	1 843 567 358	1 934 518 145	2 646 386 416
33.	P a p u a	2 996 572 499	3 003 829 503	3 090 757 039	4 421 566 770
JUMLAH/TOTAL		65 627 357 161	77 977 219 171	94 000 696 054	128 307 059 087

*) Data APBD

TABEL 5.B.1 REALISASI BELANJA PEGAWAI LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE ACTUAL DIRECT PERSONNEL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	252 925 171	303 248 909	487 041 503	517 091 102
2.	Sumatera Utara	156 928 569	160 000 784	167 575 793	127 342 162
3.	Sumatera Barat	90 591 859	117 389 700	117 827 070	111 041 633
4.	R i a u	235 117 018	247 361 895	319 820 084	256 575 271
5.	J a m b i	68 132 244	84 157 929	98 333 655	112 356 750
6.	Sumatera Selatan	107 182 811	28 994 537	58 351 300	29 076 980
7.	Bengkulu	56 696 707	72 673 925	90 923 857	98 717 235
8.	Lampung	107 811 859	135 197 636	100 476 762	90 288 827
9.	Bangka Belitung	36 150 068	49 903 758	79 233 302	73 061 918
10.	Kepulauan Riau	140 004 976	165 484 844	189 822 416	199 416 052
11.	DKI Jakarta	1 138 088 013	1 397 773 926	1 815 488 704	2 865 725 367
12.	Jawa Barat	317 690 461	404 836 267	426 605 110	318 076 978
13.	Jawa Tengah	240 493 048	318 033 645	373 147 586	315 497 018
14.	D I Yogyakarta	111 340 357	116 229 478	143 754 843	96 354 896
15.	Jawa Timur	895 165 704	1 019 269 017	1 070 076 913	1 047 758 930
16.	Banten	129 669 563	148 070 031	181 862 098	159 273 206
17.	B a l i	31 609 717	39 820 073	41 906 917	47 282 650
18.	Nusa Tenggara Barat	37 987 372	73 718 885	81 597 916	95 633 100
19.	Nusa Tenggara Timur	71 725 069	87 761 374	105 220 376	78 695 054
20.	Kalimantan Barat	76 343 884	97 802 602	143 022 608	150 045 294
21.	Kalimantan Tengah	64 050 675	65 931 229	67 960 906	74 592 568
22.	Kalimantan Selatan	108 353 995	110 249 234	175 877 019	139 772 830
23.	Kalimantan Timur	279 925 762	493 003 243	568 035 669	473 642 448
24.	Sulawesi Utara	55 670 172	56 662 658	70 928 416	45 345 819
25.	Sulawesi Tengah	75 293 666	114 424 678	140 508 898	152 779 848
26.	Sulawesi Selatan	146 363 314	157 196 580	186 117 682	163 675 705
27.	Sulawesi Tenggara	62 281 697	72 313 877	62 484 468	45 349 167
28.	Gorontalo	27 894 843	32 854 602	36 434 870	34 462 682
29.	Sulawesi Barat	60 784 227	75 318 392	34 830 232	64 344 788
30.	M a l u k u	75 806 228	75 586 968	64 172 558	44 165 840
31.	Maluku Utara	51 878 753	51 649 027	69 715 759	71 837 807
32.	Papua Barat	104 762 956	110 328 271	128 783 417	151 838 663
33.	P a p u a	222 943 523	153 855 088	175 893 795	167 654 046
JUMLAH/TOTAL		5 637 664 281	6 637 103 062	7 873 832 502	8 418 772 634

*) Data APBD

TABEL 5.B.2 REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2011-2014
TABLE ACTUAL GOODS AND SERVICES EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	3 120 139 312	4 230 353 664	5 618 995 231	4 007 558 725
2.	Sumatera Utara	1 052 132 331	1 510 939 323	1 327 766 717	1 279 711 571
3.	Sumatera Barat	493 293 534	606 885 148	635 840 015	844 998 333
4.	R i a u	960 890 615	1 216 684 489	1 667 282 867	2 544 200 513
5.	J a m b i	403 019 557	523 196 634	702 495 631	854 879 831
6.	Sumatera Selatan	552 326 637	820 354 604	1 074 254 135	1 148 234 749
7.	Bengkulu	237 590 663	368 721 830	563 392 939	635 715 765
8.	Lampung	683 987 620	925 181 888	1 168 089 647	1 269 457 999
9.	Bangka Belitung	156 720 935	226 599 151	319 349 046	523 568 067
10.	Kepulauan Riau	686 032 380	780 511 969	937 953 666	1 214 653 395
11.	DKI Jakarta	8 341 913 514	9 703 452 919	12 641 399 413	17 104 026 839
12.	Jawa Barat	1 652 349 083	1 733 979 983	1 973 247 376	2 210 131 103
13.	Jawa Tengah	1 812 185 242	1 977 523 313	2 143 191 579	2 402 069 877
14.	D I Yogyakarta	374 323 535	482 062 124	556 030 441	1 287 507 707
15.	Jawa Timur	3 155 525 486	3 601 337 254	3 803 016 160	4 123 498 808
16.	Banten	972 617 438	951 318 823	983 932 220	1 472 890 242
17.	B a l i	509 304 627	748 605 554	764 537 190	942 988 206
18.	Nusa Tenggara Barat	276 464 886	366 001 340	365 543 941	540 867 315
19.	Nusa Tenggara Timur	392 209 058	392 479 928	460 616 404	490 379 722
20.	Kalimantan Barat	570 405 689	787 874 946	898 826 047	975 709 452
21.	Kalimantan Tengah	315 899 790	420 535 875	558 211 280	876 107 668
22.	Kalimantan Selatan	565 324 723	753 427 953	1 177 554 354	1 276 270 906
23.	Kalimantan Timur	1 407 152 366	2 221 477 609	2 457 642 779	2 880 628 390
24.	Sulawesi Utara	369 656 152	503 625 677	645 754 385	569 828 076
25.	Sulawesi Tengah	444 210 633	612 618 687	706 301 866	836 656 288
26.	Sulawesi Selatan	742 024 940	933 865 895	1 054 475 228	1 301 250 273
27.	Sulawesi Tenggara	224 565 348	275 044 116	259 411 676	333 067 303
28.	Gorontalo	225 445 501	248 669 038	323 379 712	389 267 270
29.	Sulawesi Barat	232 296 315	328 893 109	387 091 610	499 145 337
30.	M a l u k u	352 314 914	359 287 327	379 456 442	582 275 467
31.	Maluku Utara	248 539 893	338 549 685	336 245 301	453 217 755
32.	Papua Barat	773 885 467	879 370 336	972 065 646	1 114 910 451
33.	P a p u a	1 351 970 752	1 540 796 548	1 694 118 393	1 978 658 386
JUMLAH/TOTAL		33 656 718 936	41 370 226 739	49 557 469 337	58 964 331 789

*) Data APBD

REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2011-2014
TABEL 5.B.3
TABLE ACTUAL CAPITAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 473 983 448	815 338 778	1 650 120 551	2 967 171 659
2.	Sumatera Utara	1 063 237 376	803 607 598	760 722 417	1 412 927 195
3.	Sumatera Barat	594 235 930	645 613 542	691 489 599	822 706 850
4.	R i a u	1 342 180 100	1 961 665 412	2 245 307 028	1 730 358 806
5.	J a m b i	518 750 583	678 746 776	937 986 070	874 874 169
6.	Sumatera Selatan	1 139 120 157	1 017 132 902	862 903 668	829 709 186
7.	Bengkulu	220 889 559	290 264 659	277 377 980	294 252 974
8.	Lampung	631 250 022	831 950 660	804 089 325	857 026 666
9.	Bangka Belitung	487 557 335	290 780 888	402 766 577	448 946 806
10.	Kepulauan Riau	259 907 861	262 340 287	392 909 765	799 509 271
11.	DKI Jakarta	7 316 333 335	8 784 365 760	10 696 012 194	29 036 373 202
12.	Jawa Barat	718 650 835	1 135 251 237	1 272 779 829	1 389 821 648
13.	Jawa Tengah	464 327 008	611 274 310	994 740 520	1 441 976 411
14.	D I Yogyakarta	142 793 833	216 419 982	369 395 794	399 119 628
15.	Jawa Timur	1 045 361 914	1 057 365 184	1 175 751 046	1 220 049 802
16.	Banten	717 408 802	917 699 108	813 275 177	1 694 615 722
17.	B a l i	227 119 793	343 633 987	454 469 544	436 962 482
18.	Nusa Tenggara Barat	450 063 752	404 993 176	450 279 190	498 539 833
19.	Nusa Tenggara Timur	195 335 652	244 750 465	225 180 376	412 576 930
20.	Kalimantan Barat	419 083 920	354 480 208	490 511 463	540 546 668
21.	Kalimantan Tengah	432 339 992	635 814 262	940 602 626	748 201 726
22.	Kalimantan Selatan	596 845 383	855 616 508	1 339 858 648	1 336 767 182
23.	Kalimantan Timur	1 776 202 780	2 516 565 705	3 651 131 816	3 578 001 215
24.	Sulawesi Utara	233 630 333	350 596 718	387 136 385	509 774 433
25.	Sulawesi Tengah	208 496 794	324 862 323	355 519 047	278 186 023
26.	Sulawesi Selatan	467 685 317	377 151 913	490 213 949	754 196 782
27.	Sulawesi Tenggara	341 497 827	204 203 183	430 716 880	617 982 163
28.	Gorontalo	147 208 079	138 397 574	184 959 338	273 158 038
29.	Sulawesi Barat	230 691 749	135 387 012	183 451 336	277 191 890
30.	M a l u k u	254 938 972	181 984 302	193 590 990	354 755 385
31.	Maluku Utara	188 066 948	418 588 333	389 731 154	432 782 279
32.	Papua Barat	606 120 331	853 868 751	833 669 082	1 379 637 302
33.	P a p u a	1 421 658 224	1 309 177 867	1 220 744 851	2 275 254 338
JUMLAH/TOTAL		26 332 973 944	29 969 889 370	36 569 394 215	60 923 954 664

*) Data APBD

TABEL 5.C REALISASI BELANJA PEMBIAYAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2011-2014
TABLE ACTUAL FINANCING EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2011-2014

No.	Provinsi/Province	2011	2012	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 542 421 072	1 931 663 713	1 420 098 087	0
2.	Sumatera Utara	751 889 462	289 070 937	151 626 064	0
3.	Sumatera Barat	77 617 334	321 541 207	311 276 961	113 408 384
4.	R i a u	1 596 831 277	2 083 231 162	1 447 676 414	0
5.	J a m b i	681 825 442	755 497 052	566 330 980	0
6.	Sumatera Selatan	548 219 953	640 137 144	310 770 643	869 512 451
7.	Bengkulu	197 445 911	241 412 061	210 719 600	12 544 684
8.	Lampung	123 093 725	24 957 424	41 126 275	6 500 000
9.	Bangka Belitung	257 245 782	295 022 224	204 466 081	0
10.	Kepulauan Riau	304 291 009	514 323 993	642 174 655	35 000 000
11.	DKI Jakarta	6 799 757 252	10 296 025 165	10 679 763 146	7 117 387 800
12.	Jawa Barat	3 208 032 615	2 958 837 956	3 775 496 831	302 424 759
13.	Jawa Tengah	1 010 039 769	955 371 554	1 924 599 491	40 000 000
14.	D I Yogyakarta	564 921 400	411 516 942	476 614 048	50 950 000
15.	Jawa Timur	1 372 238 293	1 590 972 260	2 387 620 461	816 633 232
16.	Banten	390 244 507	470 814 203	1 385 904 864	288 088 000
17.	B a l i	801 660 774	857 712 229	1 139 839 942	220 000 001
18.	Nusa Tenggara Barat	56 030 004	71 348 512	28 134 779	40 000 000
19.	Nusa Tenggara Timur	212 822 303	265 897 258	257 704 279	80 870 000
20.	Kalimantan Barat	437 627 574	272 258 327	187 965 679	75 000 000
21.	Kalimantan Tengah	529 701 185	614 289 889	439 704 834	57 500 000
22.	Kalimantan Selatan	1 007 187 782	1 311 295 560	804 661 308	90 000 000
23.	Kalimantan Timur	3 326 264 857	3 366 996 662	1 050 356 121	125 000 000
24.	Sulawesi Utara	189 114 091	252 904 042	289 406 246	25 000 000
25.	Sulawesi Tengah	205 216 673	158 588 100	135 496 072	6 700 000
26.	Sulawesi Selatan	224 038 277	42 653 396	93 178 272	51 499 999
27.	Sulawesi Tenggara	159 688 045	120 679 286	363 294 946	50 085 000
28.	Gorontalo	69 891 823	112 117 553	102 841 865	10 000 000
29.	Sulawesi Barat	13 254 702	109 896 935	131 168 699	2 000 000
30.	M a l u k u	83 751 369	158 762 191	118 453 994	20 085 885
31.	Maluku Utara	228 149 330	136 787 480	53 531 135	82 500 001
32.	Papua Barat	423 107 844	372 575 438	1 497 841 857	49 986 123
33.	P a p u a	893 108 210	1 001 969 303	958 202 863	110 000 000
JUMLAH/TOTAL		28 286 729 646	33 007 127 158	33 588 047 492	10 748 676 319

*) Data APBD

STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI 2011-2014

Anggota Tim Penyusun :

Koordinator : Sentot Bangun Widoyono, M.A.

Editor : Mila Hertinmalyana, M.Comm.
Agus Nuwibowo, S.Si., M.M.

Penulis : Desy Apresziyanti, SST

Pengolah Data : Husnul Chotimah, SST

<http://www.dps.go.id>

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Financial Statistics of Province Government

2011 - 2014

<http://www.dps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

